

Seri Menyongsong SDGs Menantang Batas: Kesiapan Kabupaten Mewujudkan Sustainable Development Goals



Zuzy Anna | Ahmad Komarulzaman | Restu Almiati

Menantang Batas: Kesiapan Kabupaten Mewujudkan Sustainable Development Goals

Buku Seri Menyongsong SDGs, Menantang Batas: Kesiapan Kabupaten Mewujudkan Sustainable Development Goals menyajikan Baseline Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Kabupaten Bandung Barat yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan dan proyeksi pencapaian indikator SDGs.

Analisis mendalam dilakukan terhadap 63 indikator (92 indikator dengan memperhitungkan disagregasi) dari 13 tujuan TPB/SDGs, sesuai dengan metadata I dan II. Proyeksi pencapaian TPB/SDGs tahun 2030 terhadap target TPB/SDGs 2030 disajikan dalam bentuk *scorecard* dengan penilaian A, B, C, D, dan E.

Kabupaten Bandung Barat memiliki capaian yang baik dengan 37 indikator memperoleh nilai A dan 11 indikator memperoleh nilai B. Namun, terdapat juga 21 indikator dengan nilai C, 12 indikator dengan nilai D, dan 7 indikator dengan nilai E. Selain itu, terdapat 4 indikator lainnya yang belum dapat diproyeksikan. Hasil ini menyoroti tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai TPB/SDGs. Kondisi ini mendorong perlunya upaya tambahan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, seiring dengan skala prioritas yang harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumber daya di wilayah.

Dengan pemetaan dan *scorecard* yang disajikan secara detail untuk setiap indikator TPB/SDGs, buku ini memberikan gambaran yang berharga bagi pembaca untuk memahami kondisi sekarang dan arah yang harus diambil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami berharap buku ini akan menjadi sumber inspirasi bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dan menghadapi tantangan dengan semangat baru, guna mewujudkan visi SDGs secara holistik dan berkelanjutan.



Seri Menyongsong SDGs

**Menantang Batas: Kesiapan
Kabupaten Mewujudkan
Sustainable Development Goals**

Zuzy Anna

Ahmad Komaruzaman

Restu Almiati



Judul : Menantang Batas: Kesiapan Kabupaten Mewujudkan Sustainable Development Goals

Penulis : Zuzy Anna, Ahmad Komarulzaman, Restu Almiati

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, 2023

Diterbitkan oleh Unpad Press

Gedung Rektorat Unpad, Kampus Jatinangor

Jln. Ir. Soekarno Km. 21 Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang 45363

Jawa Barat

e-mail: press@unpad.ac.id dan website <https://press.unpad.ac.id/>

Anggota IKAPI dan APPTI

ISBN: 978-623-352-333-2

Tata Letak Isi : Restu Almiati

Desainer Sampul : Adhi Susatyo

Sambutan

RINI SARTIKA, S.Sos., M.Si.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengucapkan terima kasih kepada SDGs Center Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi penyusunan buku “Menantang Batas: Kesiapan Kabupaten Mewujudkan Sustainable Development Goals”.

Buku ini sangat penting karena telah memuat informasi mengenai hasil pengukuran pencapaian indikator, pemetaan dan *scorecard* tiap indikator serta proyeksi pencapaian indikator SDGs (Sustainable Development Goals)/TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Buku ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka meningkatkan kontribusinya masing-masing dalam pencapaian SDGs/TPB Kabupaten Bandung Barat khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

Februari 2023



RINI SARTIKA, S.Sos., M.Si.

Prakata

Dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tim Penulis telah menyelesaikan buku “Menantang Batas: Kesiapan Kabupaten Mewujudkan Sustainable Development Goals”. Buku ini memuat kemajuan dan proyeksi baseline pencapaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, buku ini juga mencakup pemetaan dan *scorecard* untuk setiap indikator SDGs di Kabupaten Bandung Barat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan terutama Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut, sehingga dapat membantu pencapaian TPB/SDGs secara nasional.

Bandung, Februari 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Sambutan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab 1 Rasional Studi Baseline TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat	1
Bab 2 <i>Mainstreaming</i> TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat	4
2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)	4
2.2 Kajian SDGs Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.....	11
Bab 3 Metodologi Baseline TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat .	15
3.1 Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat	15
3.2 Metadata Indikator TPB/SDGs	33
3.3 Proyeksi <i>Baseline</i> Indikator TPB/SDGs	104
3.4 Target Indikator TPB/SDGs dan <i>Scorecard</i>	106
3.5 Konsistensi Data di Tingkat Kabupaten/Kota	117
Bab 4 Baseline dan Proyeksi Pencapaian Indikator TPB/SDGs	120
4.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.....	120
4.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	137
4.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	146
4.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	156
4.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender	192
4.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	198

4.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	203
4.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	205
4.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	219
4.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	221
4.11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan ..	224
4.12	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat	226
4.13	Tujuan 17 Kemitraan dan Mencapai Tujuan.....	231
4.14	Indikator TPB/SDGs Tambahan Kabupaten Bandung Barat	232
Bab 5 Penutup.....		268
Daftar Pustaka.....		275

Daftar Tabel

Tabel 3-1	Daftar Indikator Terpilih untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat	18
Tabel 3-2	Jenis <i>Trend</i> dan Spesifikasi Model Regresi.....	106
Tabel 3-3	Target Kuantitatif Indikator SDGs Kabupaten Bekasi pada Tahun 2030	108
Tabel 3-4	Sistem Penilaian <i>Scorecard</i> SDGs Tahun 2030	116
Tabel 4-1	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 1	121
Tabel 4-2	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 2	137
Tabel 4-3	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 3	146
Tabel 4-4	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 4	157
Tabel 4-5	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 5	192
Tabel 4-6	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 6	198
Tabel 4-7	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 7	204
Tabel 4-8	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 8	206
Tabel 4-9	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 9	220
Tabel 4-10	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 10 ...	221
Tabel 4-11	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 11 ...	224
Tabel 4-12	Data indikator 11.5.1*	226
Tabel 4-13	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 16 ...	227
Tabel 4-14	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 17 ...	231
Tabel 4-15	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator SDGs	234
Tabel 4-16	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 1	241
Tabel 4-17	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 2	243
Tabel 4-18	Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 3	246

Tabel 4-19 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 4.....	249
Tabel 4-20 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 5.....	252
Tabel 4-21 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 9.....	253
Tabel 4-22 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 10...	256
Tabel 4-23 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 11...	257
Tabel 4-24 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 16...	258
Tabel 4-25 Data, target, dan <i>scorecard</i> indikator pada tujuan 17...	264

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Dimensi SDGs (5P)	5
Gambar 2.2	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	7
Gambar 2.3	Jaringan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terintegrasi.....	9
Gambar 3.4	Bagan Perjalanan Wisatawan Nusantara.....	90
Gambar 4.1	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.....	124
Gambar 4.2	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%).....	125
Gambar 4.3	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40) .	126
Gambar 4.4	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	127
Gambar 4.5	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40).....	128
Gambar 4.6	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (B40) (%)	129

Gambar 4.7	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%).....	130
Gambar 4.8	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%).....	131
Gambar 4.9	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (B40).....	132
Gambar 4.10	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (B40).....	134
Gambar 4.11	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa	135
Gambar 4.12	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah tipe kepemilikan milik sendiri	136
Gambar 4.13	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	139
Gambar 4.14	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita....	140
Gambar 4.15	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita....	141

Gambar 4.16	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan).....	142
Gambar 4.17	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	143
Gambar 4.18	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)	145
Gambar 4.19	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita	145
Gambar 4.20	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	148
Gambar 4.21	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	149
Gambar 4.22	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	151
Gambar 4.23	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	152
Gambar 4.24	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total	

	pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 10% total pengeluaran rumah tangga).....	153
Gambar 4.25	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga).....	154
Gambar 4.26	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	155
Gambar 4.27	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SD/MI/ sederajat.....	162
Gambar 4.28	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMP/MTS/sederajat.....	163
Gambar 4.29	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMA/SMK/Sederajat.....	164
Gambar 4.30	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun keatas	165
Gambar 4.31	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	166
Gambar 4.32	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat..	167
Gambar 4.33	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat ..	167
Gambar 4.34	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir	168

Gambar 4.35	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	169
Gambar 4.36	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	170
Gambar 4.37	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	171
Gambar 4.38	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	172
Gambar 4.39	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki.....	173
Gambar 4.40	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	174
Gambar 4.41	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	175
Gambar 4.42	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas.....	176
Gambar 4.43	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ Sederajat untuk perempuan/ laki-laki	177
Gambar 4.44	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	

	SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	178
Gambar 4.45	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	179
Gambar 4.46	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	180
Gambar 4.47	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki.....	181
Gambar 4.48	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas ...	182
Gambar 4.49	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	183
Gambar 4.50	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas.....	184
Gambar 4.51	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki ..	185
Gambar 4.52	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas.....	186

Gambar 4.53	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	187
Gambar 4.54	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	188
Gambar 4.55	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ arab/ lainnya	189
Gambar 4.56	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ arab/ lainnya	190
Gambar 4.57	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ arab/ lainnya	191
Gambar 4.58	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	194
Gambar 4.59	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	195
Gambar 4.60	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	196
Gambar 4.61	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menguasai/ memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	197

Gambar 4.62	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	200
Gambar 4.63	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	200
Gambar 4.64	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	202
Gambar 4.65	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	203
Gambar 4.66	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 rasio penggunaan gas rumah tangga.	205
Gambar 4.67	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per kapita	208
Gambar 4.68	Grafik data historis PDB per kapita (ribu rupiah) ..	209
Gambar 4.69	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	210
Gambar 4.70	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi lapangan kerja informal.	211
Gambar 4.71	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja formal.	212
Gambar 4.72	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja informal sektor pertanian..	213
Gambar 4.73	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 upah rata-rata per jam kerja (rupiah).	214

Gambar 4.74	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 tingkat pengangguran terbuka.....	215
Gambar 4.75	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 tingkat setengah pengangguran.....	216
Gambar 4.76	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET).	218
Gambar 4.77	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta).	219
Gambar 4.78	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	220
Gambar 4.79	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 koefisien gini.	222
Gambar 4.80	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk yang hidup 50 persen dari median pendapatan.....	223
Gambar 4.81	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.....	225
Gambar 4.82	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.....	228
Gambar 4.83	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi.....	229

Gambar 4.84	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran.....	230
Gambar 4.85	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi individu yang menggunakan internet.	232
Gambar 4.86	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	242
Gambar 4.87	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	244
Gambar 4.88	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.....	245
Gambar 4.89	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Prevalensi anemia pada ibu hamil.....	245
Gambar 4.90	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).....	247
Gambar 4.91	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	248
Gambar 4.92	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi sekolah dengan akses ke sarana dan prasarana: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis	

	kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).....	250
Gambar 4.93	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, dan PLB yang bersertifikat pendidik	251
Gambar 4.94	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	253
Gambar 4.95	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	254
Gambar 4.96	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	255
Gambar 4.97	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal ..	256
Gambar 4.98	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	258
Gambar 4.99	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	260
Gambar 4.100	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pemerintah Daerah.....	261
Gambar 4.101	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan	

	Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	262
Gambar 4.102	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.....	263
Gambar 4.103	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik.....	265
Gambar 4.104	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	266
Gambar 4.105	Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS.....	267

Bab 1

Rasional Studi Baseline TPB/SDGs

Kabupaten Bandung Barat

Berakhirnya periode *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadakan sebuah konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada bulan Juni 2012, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Hasil dari konferensi ini adalah dokumen yang dikenal sebagai "*The Future We Want*" yang kemudian menjadi dasar untuk pembentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015. TPB/SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, namun dengan visi yang lebih komprehensif, holistik, dan global. Pada bulan September 2015, Indonesia juga mengambil bagian dalam deklarasi "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" yang juga dikenal sebagai agenda TPB/SDGs (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 244 indikator. Namun, saat ini, indikator-indikator SDGs ini perlu direvisi secara berkala. Berdasarkan metadata indikator SDGs Indonesia edisi II, terdapat sebanyak 289 indikator yang telah diketahui (Bappenas, 2020). SDGs tidak hanya fokus pada meningkatkan kesejahteraan, melainkan juga mencakup prinsip keadilan yang tidak mendiskriminasi siapa pun dan bersifat komprehensif (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Perencanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia dijelaskan dalam beberapa dokumen, termasuk Peta Jalan Nasional (*Roadmap* SDGs), Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Target dan indikator yang terkait dengan 17 TPB/SDGs telah dimasukkan ke dalam 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, organisasi non-pemerintah, komunitas masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah berhasil, pelaksanaan TPB/SDGs secara berkala dipantau dan dievaluasi dengan koordinasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas. Proses pemantauan ini dilakukan setiap 6 bulan atau sesuai kebutuhan, dengan dukungan pengumpulan data dan informasi dari pemerintah tingkat kabupaten/kota. Inilah yang menjadi latar belakang untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian SDGs di Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun 2021, Indonesia telah mencapai peringkat 82 dari 163 negara dengan mencetak 69,16 poin, yang mengalami peningkatan dari posisi 101 dari 166 negara pada tahun 2020, seperti yang dilaporkan oleh Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, (2021). Untuk mencapai hasil yang optimal dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) hingga tahun 2030, diperlukan pengukuran dan pemantauan yang teliti. Dalam konteks ini, tujuan dari buku ini adalah memberikan informasi mengenai kondisi

pencapaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat, serta proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs hingga tahun 2030.

Bab 2

***Mainstreaming* TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat**

2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah inisiatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berakar pada prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan bersifat universal, holistik, terintegrasi, inklusif, serta membutuhkan kemitraan dan partisipasi lintas sektor. Berbeda dengan MDGs yang lebih menitikberatkan pada dimensi sosial, TPB/SDGs merangkul aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam cakupannya. Sebagai hasilnya, jumlah tujuan yang harus dicapai meningkat dari 8 tujuan pada MDGs menjadi 17 tujuan pada TPB/SDGs, yang dapat diidentifikasi dalam lima dimensi, yaitu: Manusia (*People*), Bumi (*Planet*), Kemakmuran (*Prosperity*), Perdamaian (*Peace*), dan Kerjasama (*Partnership*) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).



Gambar 2.1 Lima Dimensi SDGs

Sumber: website pressroom.oecd.org

TPB/SDGs membawa signifikansi dan pentingnya yang luar biasa dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan secara global. TPB/SDGs mencakup lima dimensi yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dimensi pertama adalah *People* yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan memperoleh hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Upaya dalam dimensi ini mencakup upaya menuju kesetaraan dan keadilan bagi semua.

Dimensi kedua adalah *Planet* yang berfokus pada perlindungan bumi dari dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perubahan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pembangunan berkelanjutan menuju pemenuhan kebutuhan masa depan secara berkelanjutan.

Kemudian, dimensi ketiga adalah *Prosperity* yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati kehidupan

yang sejahtera, cukup, dan dapat hidup berdampingan dengan alam. Aspek ekonomi dalam TPB/SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua.

Peace adalah dimensi keempat, dan menggarisbawahi bahwa tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial. Sebaliknya, perdamaian dan keamanan sosial menjadi pondasi yang penting bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, dimensi kelima adalah *Partnership*, keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerjasama global yang erat dengan asas solidaritas yang tinggi. TPB/SDGs mendorong partisipasi dan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional, untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengintegrasikan dan menguatkan setiap dimensi ini, TPB/SDGs membentuk pandangan yang luas dan holistik tentang pembangunan berkelanjutan yang dapat membawa dampak positif bagi dunia.

Indonesia, sebagai sebuah negara anggota PBB yang telah memverifikasi keterlibatannya dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), mengkoordinasikan upayanya dengan perencanaan nasional serta regulasi yang relevan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menyelaraskan perencanaannya melalui dokumen-dokumen seperti Peta Jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat provinsi.



Gambar 2.2 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: sdgs.bappenas.go.id

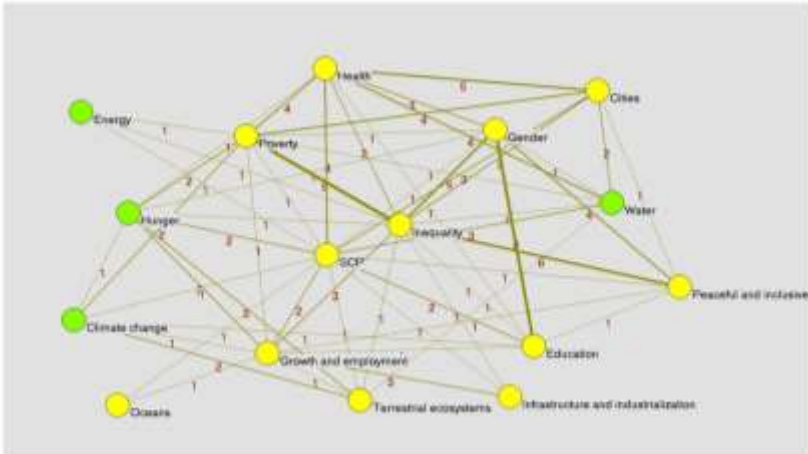
Di Indonesia, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diklasifikasikan ke dalam empat pilar (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018; Bappenas, 2017, 2020):

<p>Pilar Sosial, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Tanpa kemiskinan - Tujuan 2 Tanpa kelaparan - Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera - Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas - Tujuan 5 Kesetaraan Gender
<p>Pilar Ekonomi meliputi penyediaan energi untuk semua, faktor penting dalam mendukung pendidikan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau - Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

pelayanan kesehatan dan penurunan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur - Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan - Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Pilar Lingkungan merupakan landasan semangat transformatif pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak - Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan - Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan - Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim - Tujuan 14 Ekosistem Laut - Tujuan 15 Ekosistem Daratan
Pilar Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Setiap tujuan memiliki hubungan yang kompleks dengan tujuan lainnya, sehingga pencapaian satu tujuan dapat memiliki efek positif atau negatif pada tujuan lainnya. Ide ini sangat penting dalam memahami pandangan holistik tentang TPB/SDGs. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Le Blanc (2015), dia menjelaskan bahwa sebaiknya melihat banyaknya tujuan SDGs sebagai suatu jaringan yang terintegrasi dan saling terkait, bukan sebagai sesuatu yang rumit dan terisolasi. Konsep jaringan ini membantu kita untuk

mengidentifikasi dan memahami dampak dari tindakan dan kebijakan yang diambil dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.



Gambar 2.3 Jaringan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terintegrasi

Sumber: (Le Blanc, 2015)

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), penting untuk melaksanakannya secara efektif di tingkat regional dan nasional. Peran negara menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan SDGs dengan mengadopsi pendekatan dan strategi yang menggabungkan pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, yang disesuaikan dengan karakteristik dan prioritas individu masing-masing negara. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat sangat diperlukan. Peran multipihak dalam pencapaian TPB/SDGs melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintah/parlemen, organisasi masyarakat, akademisi dan ahli, pelaku bisnis, lembaga filantropi, serta media. Beberapa regulasi

telah ditetapkan untuk mengarahkan pelaksanaan peran tersebut (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018), termasuk:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dengan rincian tugas dan fungsi dalam pencapaian SDGs (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018), sebagai berikut:

Pemerintah/parlemen	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan, target, dan program • Menyusun indikator dan data • Menyusun regulasi dan anggaran • Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pelaku usaha dan filantropi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi sektor bisnis • Memfasilitasi program dengan cara menjalin komunikasi, <i>capacity building</i>

	dan berperan dalam kolaborasi anggaran
Akademisi dan pakar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan • Menyusun indikator dan data • <i>Capacity building</i> • Melakukan evaluasi
Organisasi kemasyarakatan dan media	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyebaran informasi dan advokasi • Memfasilitasi program • <i>Capacity building</i> • Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi

2.2 Kajian SDGs Kabupaten/ Kota di Jawa Barat

Pada tahun 2018, SDGs Center UNPAD melakukan sebuah penelitian mengenai "Persiapan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat" untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) (Yusuf et al., 2018). Dalam proses analisis data, studi ini merujuk pada metadata SDGs Edisi I dan menggunakan metode proyeksi tren atau *trend forecasting* (Anderson et al., 2012; Diebold, 2007; Wooldridge, 2015). Metode proyeksi tren ini melibatkan regresi antara variabel yang ingin diprediksi dengan variabel waktu (variabel bebas) dan menggunakan estimator *ordinary least square* (OLS) berdasarkan data deret waktu. Namun, adanya keterbatasan data historis pada beberapa indikator menyebabkan penelitian ini tidak

dapat dilakukan sepenuhnya. Hasil dari studi ini dipresentasikan dalam bentuk *scorecard*, yang membandingkan hasil proyeksi *baseline* dengan target SDGs pada tahun 2030. Metode ini juga akan menjadi fokus dalam Bab 3 buku ini, yang akan menjelaskan lebih rinci penggunaan dan penerapan metode proyeksi tren dalam penelitian mengenai persiapan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat dalam mencapai SDGs.

Hasil analisis 45 indikator dari 15 tujuan SDGs (kecuali tujuan ke-14 dan ke-17) untuk 26 kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa pencapaian SDGs di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara umum baru mencapai 2.16 (C) dari skala 0 hingga 4. Skor 4 (A) menunjukkan target SDGs diproyeksikan tercapai atau hampir tercapai pada tahun 2030, sementara skor 0 (E) menunjukkan target SDGs masih jauh untuk dicapai. Terdapat 14 kabupaten/kota yang skornya di atas rata-rata dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota yang skornya di bawah rata-rata Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang sudah relatif lebih maju perekonomiannya cenderung lebih siap dalam mencapai SDGs dibandingkan dengan yang lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, upaya pencapaian SDGs di Jawa Barat disarankan untuk memiliki prioritas pada beberapa hal berikut ini (Yusuf et al., 2018):

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh
- 3) Penguatan konektivitas antar wilayah
- 4) Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak
- 5) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan

6) Penguatan institusi dan tata kelola yang baik

Hasil penelitian yang sama menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki skor rata-rata kesiapan sekitar 2.23 (C), yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Yusuf et al., 2018). Berdasarkan analisis studi ini, ditemukan dua permasalahan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah ketidaksetaraan gender (tujuan 5), yang dapat dilihat dari rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang memadai (tujuan 6). Ini tercermin dari indikator rumah tangga dengan sanitasi yang belum memadai dan mendapatkan skor E.

Di sisi lain, terdapat dua tujuan SDGs yang telah mencapai tingkat kesiapan yang baik di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan pertama adalah tentang energi bersih dan terjangkau (tujuan 7), yang tercermin dalam pencapaian target elektrifikasi. Tujuan kedua adalah tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh (tujuan 16), yang dapat dilihat dari indikator seperti insiden pembunuhan, risiko tindak pidana yang dihadapi penduduk, dan jumlah anak di bawah usia 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran. Semua ini mendapatkan penilaian A (Yusuf et al., 2018).

Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kesiapan yang sangat baik dalam mencapai target SDGs tahun 2030 terkait dengan tujuan kesehatan dan pendidikan (Yusuf et al., 2018). Dalam bidang pendidikan, dua indikator, yaitu kesenjangan angka partisipasi siswa di SMA antara rumah tangga dengan pendapatan 10 persen teratas dan

rumah tangga dengan pendapatan 40 persen terbawah, serta angka melek huruf bagi individu usia 15-24 tahun, mendapatkan penilaian A. Di sisi lain, dalam hal tujuan kesehatan, beberapa indikator kesehatan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam mencapai target SDGs, seperti penurunan angka kematian neonatal dan pengurangan jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas. Semua indikator kesehatan tersebut mencerminkan kemajuan yang positif dalam upaya mencapai target SDGs.

Bab 3

Metodologi Baseline TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat

3.1 Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat

Indonesia berkontribusi dalam menetapkan 289 indikator TPB/SDGs melalui metadata indikator SDGs edisi II yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 (Bappenas, 2020). Dalam dokumen metadata edisi II, terdapat 289 indikator yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu indikator nasional yang sejalan dengan indikator global, indikator nasional yang digunakan sebagai pengganti indikator global, indikator nasional yang ditambahkan sebagai pelengkap indikator global, dan indikator nasional yang berfungsi sebagai penyempurna indikator global. Informasi lebih rinci dapat ditemukan dalam penjelasan berikut ini:

1. Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global (sebanyak 136 indikator), contoh: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (1.2.1*).
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi terhadap metadata indikator global (sebanyak 100 indikator), contoh: proporsi remaja (usia 15-24

tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (4.4.1(a)).

3. Indikator nasional sebagai tambahan indikator global adalah indikator nasional yang telah disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan data serta belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia (sebanyak 44 indikator), misalnya: rasio penggunaan gas rumah tangga (7.1.2(b)).
4. Indikator nasional sebagai indikator pengayaan sebanyak 9 indikator, misalnya *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan (3.8.1.(a)).

Analisis *baseline* TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 53 indikator dari 13 tujuan berdasarkan metadata edisi I (Bappenas, 2017) dan edisi II (Bappenas, 2020). Keterbatasan data menjadi kendala dalam melakukan analisis *baseline* indikator TPB/SDGs secara menyeluruh, sehingga hanya 53 dari 289 indikator yang dapat dianalisis. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak dianalisis meliputi tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim, tujuan 14 - Ekosistem Lautan, dan tujuan 15 - Ekosistem Daratan. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatin Kemnaker), serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Terdapat beberapa indikator yang sama, namun berada pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbeda berdasarkan metadata edisi I diantaranya:

- 1.2.1* / 10.1.1.(a) - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
- 4.1.1.(f)/ 5.3.1.(c) - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.
- 5.b.1* / 9.c.1.(a) - Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.
- 9.c.1.(b) / 17.8.1* - Proporsi individu yang menggunakan internet.
- 16.1.3.(a)/11.7.2.(a) – Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Dengan demikian, jumlah total indikator yang dianalisis mencapai 63 indikator, dan apabila memperhitungkan sub-indikator, jumlahnya menjadi 92 indikator. Daftar lengkap indikator yang tersedia berdasarkan seri waktu yang berbeda beserta sumber datanya dapat ditemukan pada Tabel 3.1.

Tabel 3-1 Daftar Indikator Terpilih untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2010-2020
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	BPS Susenas	2002-2019
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	BPS Susenas	2002-2019
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	BPS Susenas	2006-2019

Tujuan	Kode Indikator	Indikator				Sumber	Tahun
1	1.4.1.(g)	Angka SD/MI/ sederajat (B40) (%)	Partisipasi	Murni	(APM)	BPS Susenas	2001-2019
1	1.4.1.(h)	Angka SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)	Partisipasi	Murni	(APM)	BPS Susenas	2001-2019
1	1.4.1.(i)	Angka SMA/MA/ sederajat (B40) (%)	Partisipasi	Murni	(APM)	BPS Susenas	2001-2019
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)				BPS Susenas	2004-2020
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)				BPS Susenas	2001-2019
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan				Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
		jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Kontrak/Sewa)		
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Milik Sendiri)	Susenas KOR	2010-2020
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2017-2020
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	2007-2018
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber			Tahun
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.(0-59 Bulan)	Riset (RISKESDAS) Barat	Kesehatan Provinsi Jawa	Dasar Jawa	2007-2018
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Pemantauan Kesehatan KEMENKES	Status Gizi, Profil Indonesia,		2015-2017
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita. (0-59 Bulan)	Riset (RISKESDAS) Barat	Kesehatan Provinsi Jawa	Dasar Jawa	2007-2018
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Pemantauan Kesehatan KEMENKES	Status Gizi, Profil Indonesia,		2015-2017
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	BPS Susenas			2001-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	Susenas KOR	2015-2020
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	Susenas KOR	2010-2020
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	Susenas KOR	2010-2020
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	Susenas KOR	2018-2020
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah	Susenas KOR	2018-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
		Tangga (Lebih dari 25% Total Pengeluaran Rumah Tangga)		
3	3.a.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	Susenas KOR	2015-2020
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS Susenas	2001-2020
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	BPS Susenas	2001-2020
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS Susenas	2001-2020
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	BPS Susenas	2001-2020
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	Susenas KOR	2010-2020
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	Susenas KOR	2010-2020
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	Susenas KOR	2010-2020
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS Susenas	2001-2020
4	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS Susenas	2001-2020
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2010-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	Susenas KOR	2010-2020
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ arab/ lainnya	Susenas KOR	2010-2020
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun (%)		2001-2020
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)		2001-2020
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	Susenas KOR	2010-2020
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		2010-2020
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	Susenas KOR	2015-2020
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Susenas KOR	2010-2020
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	BPS	2002-2020
6	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas KOR	2017-2020
6	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Susenas KOR	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Susenas KOR	2010-2020
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	2011-2020
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	BPS	2010-2020
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	2011-2020
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	BPS Sakernas	2010-2020
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS Sakernas	2007-2020
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS Sakernas	2007-2019
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	BPS Sakernas	2007-2019
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS Sakernas	2007-2020
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS Sakernas	2010-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS Sakernas	2017-2020
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	BPS Susenas	2002-2017
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS Sakernas	2010-2020
10	10.1.1*	Koefisien Gini	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2001-2020
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	Susenas KOR	2001-2020
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS Susenas	2012-2020

Tujuan	Kode Indikator	Indikator	Sumber	Tahun
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	DIBI	2010-2019
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	DIBI	2010-2019
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS Susenas	2001-2020
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	Susenas KOR	2010-2020
16	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	Susenas KOR	2010-2020
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS Susenas	2010-2020

3.2 Metadata Indikator TPB/SDGs

Indonesia menyusun indikator TPB/SDGs dalam sebuah dokumen yang disebut metadata indikator TPB/SDGs (Bappenas, 2017, 2020). Proses penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah, Akademisi, Pakar, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Organisasi Kemasyarakatan, dan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Metadata indikator TPB/SDGs Indonesia bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang seragam bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, sehingga dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, serta memungkinkan keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil dari proses penyusunan metadata ini berupa dokumen Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. Pedoman ini memberikan informasi yang komprehensif tentang konsep dan definisi indikator, metode penghitungan, manfaat, sumber dan cara pengumpulan data, disagregasi, serta frekuensi waktu pengumpulan data. Pada awalnya, metadata TPB/SDGs Indonesia mencakup 319 indikator yang terkait dengan 169 target dari 17 tujuan (edisi I), namun melalui proses reviu dan evaluasi, jumlah indikator tersebut telah dikurangi menjadi 289 indikator (edisi II). Dokumen Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia terdiri dari:

- a. Terjemahan Tujuan dan Target
- b. Ringkasan Metadata
- c. Metadata setiap Pilar

Data indikator dalam buku ini dilakukan dengan mengacu kepada metadata indikator TPB/SDGs edisi I dan II (Bappenas, 2017, 2020) dengan rincian indikator terpilih dapat dilihat pada uraian berikut ini.

3.2.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun)

Indikator 1.2.1* Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%) atau representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen.

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Dimana:

- PPM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
- JPM : Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JP15 - 49} \times 100\%$$

Dimana:

P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah)

JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melakukan persalinan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah)

Indikator 1.4.1.(d) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$P\ AML = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$$

Dimana:

- P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- JRTML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak)
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(e) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan

indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$P\ LSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Dimana:

- P LSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya (40% berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(f) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (B40)

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$P\ RTKP = \frac{JRTKP}{J RTP} \times 100\%$$

Dimana:

- P RTKP : Persentase rumah tangga kumuh perkotaan

- JRTKP : Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)
- JRTP : Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat (B40) (%)

APM SD/ MI/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$APM\ SD = \frac{JMSD}{JP7 - 12} \times 100\%$$

Dimana:

- APM SD : Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat
- JMSD : Jumlah murid tingkat SD/ MI/ sederajat umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)
- JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat (B40) (%)

APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{JMSMP}}{\text{JP13 - 15}} \times 100\%$$

Dimana:

APM SMP : Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/ MTs/ sederajat

JMSMP : Jumlah murid tingkat SMP/ MTs/ sederajat umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat (B40) (%)

APM SMA/ MA/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/ MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan

indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$APM\ SMA = \frac{JMSMA}{JP16 - 18} \times 100\%$$

Dimana:

- APM SMA : Angka Partisipasi Murni (APM) di SMA/MA/ sederajat
- JMSMA : Jumlah murid tingkat SMA/MA/sederajat umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(j) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (B40)

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/ dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

$$PKAL = \frac{JPKAL}{JP0 - 17} \times 100\%$$

Dimana:

- PKAL : Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
- JPKAL : Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JP0-17 : Jumlah penduduk umur 0-17 tahun pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(k) Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik, Baik dari PLN dan Bukan PLN (B40)

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN adalah jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%). Sumber listrik bukan PLN meliputi sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari aki, generator, pembangkit listrik tenaga surya (*solar cell*).

$$PSPU = \frac{JRTSPU}{JRTS} \times 100\%$$

Dimana:

- PSPU : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
- JRTSPU : Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JRTS : Jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan (penduduk 40% penduduk terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.2* Proporsi dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan

Hak atas hunian terjamin meliputi dua sub komponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin. Jumlah rumah tangga bersumber dari hasil proyeksi penduduk yang dibuat berdasarkan data sensus penduduk terakhir. Penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang berumur dibawah 18 tahun tetapi sudah kawin.

Indikator ini dihitung menurut jenis kepemilikan, yaitu milik sendiri, kontrak dan sewa. **Milik sendiri** apabila tempat tinggal tersebut pada

waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (krt) atau salah satu seorang anggota rumah tangga (art). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri. **Kontrak** apabila tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan **sewa** apabila tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Rumus kepemilikan rumah hak milik sendiri:

$$\%HM = \frac{JRT\ HM}{JRT} \times 100\%$$

Dimana:

- %HM : Proporsi rumah tangga dengan Rumah Hak Milik
- JRT HM : Jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa
- JRT : Jumlah rumah tangga pada periode yang sama

Rumus kepemilikan rumah sewa:

$$\%Sewa = \frac{JRT\ Sewa}{JRT} \times 100\%$$

Dimana:

- % Sewa : Proporsi rumah tangga dengan rumah Sewa
- JRT Sewa : Jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa

JRT : Jumlah rumah tangga pada periode yang sama
Rumus kepemilikan rumah kontrak:

$$\% \text{Kontrak} = \frac{\text{JRT Kontrak}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Dimana:

% Kontrak : Proporsi rumah tangga dengan rumah kontrak
JRT Kontrak : Jumlah rumah tangga menghuni rumah kontrak
JRT : Jumlah rumah tangga pada periode yang sama

3.2.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)

Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
(*Prevalence of Undernourishment*)

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara reguler, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu

mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidacukupan konsumsi pangan).

$$PoU = \int x < MDER f(x)dx$$

Dimana:

- PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal
- MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement)
- f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu

Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada Anak Balita

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis.

Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.

- Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.

$$\text{PKG AB}(5) = \frac{\text{JAB}(5)\text{KG}}{\text{JAB}(5)} \times 100\%$$

Dimana:

PKG AB(5) : Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

JAB(5)KG : Jumlah seluruh anak balita yang menderita kekurangan gizi (*underweight*)

JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita

Indikator 2.2.1* Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

1. Sangat pendek: Zscore $< -3,0$
2. Pendek : Zscore $\geq -3,0$ s/d Zscore $< -2,0$

$$\text{PAB(5)PStunting} = \frac{\text{JAB(5)P stunting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Dimana:

- PAB(5)Pstunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek dan sangat pendek (*stunting*)
- JAB(5)Pstunting : Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Indikator 2.2.2* Prevalensi *Wasting* (Berat Badan/Tinggi Badan) pada Usia Kurang dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/ XII/2010:

1. Sangat Kurus : Zscore <-3,0
2. Kurus : Zscore \geq -3,0 s/d Zscore <-2,0

$$\text{PAB(5)K wasting} = \frac{\text{JAB(5) K wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Dimana:

- PAB(5)K wasting : Prevalensi anak balita yang menderita kurus dan sangat kurus (*wasting*)

- JAB(5) K *wasting* : Jumlah anak balita yang menderita kurus (*wasting*) pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

3.2.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Indikator 3.1.2* Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

$$P \text{ Salinakes} = \frac{JPMoTK}{JPM15 - 49} \times 100\%$$

Dimana:

- P Salinakes : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- JPMoTK : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir
- JPM15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir

Indikator 3.1.2* Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhir di Fasilitas Kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.

$$P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JP15 - 49} \times 100\%$$

Dimana:

- P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
- JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
- JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun pada periode waktu yang sama

Indikator 3.7.1* Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern

Proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern adalah perbandingan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memerlukan alat kontrasepsi.

Alat kontrasepsi metode modern terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL).

$$\text{CPR Modern} = \frac{\text{JPMdMAK}}{\text{JPMak}} \times 100\%$$

Dimana:

- CPR Modern : Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
- JPMdMAK : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern menggunakan alat kontrasepsi metode modern
- JPMAK : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memerlukan alat kontrasepsi

Indikator 3.8.1.(a) *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.

$$\text{UNPK} = \frac{\text{JPKPK}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Dimana:

- UNPK : *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan
- JPKPK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu
- JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 3.8.2. Proporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan

Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Dua ambang batas digunakan untuk mendefinisikan “pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan”: lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara total pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan (numerator) dan total pengeluaran rumah tangga atau total pendapatan rumah tangga (denominator).

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia dan untuk semua anggota rumah

tangga. Pengeluaran kesehatan ini secara langsung dibayar menggunakan pendapatan rumah tangga (termasuk pengiriman uang), tabungan atau pinjaman tetapi tidak termasuk penggantian pembayaran oleh pihak ketiga. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas pada pelayanan yang mampu dibayar sendiri, tanpa bantuan dari orang lain di luar rumah tangga tersebut dan semata-mata berdasarkan pada kemauan dan kemampuan rumah tangga untuk membayar. Berdasarkan klasifikasi pembiayaan kesehatan *the International Classification for Health Accounts* (ICHA), pembayaran pelayanan kesehatan secara langsung disebut pembayaran *Out-Of-Pocket* (OOP). Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dengan OOP merupakan sumber pembiayaan yang paling tidak equitable dalam sistem kesehatan.

Komponen pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan harus konsisten dengan *the UN Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) komponen 06 (divisi kesehatan), yang terdiri atas obat-obatan dan jasa medis (06.1), pelayanan rawat Jalan (06.2) dan pelayanan rawat inap (06.3).

Pengeluaran rumah tangga dan pendapatan rumah tangga merupakan ukuran dari kesejahteraan moneter. Pengeluaran rumah tangga merupakan proxy dari pendapatan yang merupakan ukuran kemampuan ekonomi jangka panjang suatu rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan Rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Informasi tentang pengeluaran rumah tangga biasanya dikumpulkan melalui survey rumah tangga.

Pendapatan Rumah tangga adalah seluruh *disposable income* rumah tangga, yang terdiri atas total pendapatan (setelah dikurangi pajak), gaji pokok dan denda. Total pendapatan umumnya terdiri dari pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari properti, pendapatan dari produksi rumah tangga untuk konsumsi sendiri, transfer yang diterima baik dalam bentuk uang maupun barang, serta transfer yang diterima dalam bentuk layanan.

$$\text{OOP Health} = \frac{\sum_i m_i w_i 1_{\left(\frac{\text{total pengeluaran untuk kesehatan pada rumah tangga } i}{\text{total pengeluaran pada rumah tangga } i} > r\right)}}{\sum_i m_i w_i} \times 100\%$$

Dimana:

i menunjukkan satu rumah tangga, $1_{(\)}$ adalah fungsi indikator yang mengambil nilai 1 jika benar, dan 0 jika salah, m_i sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga i , w_i sesuai dengan berat sampel rumah tangga i , t adalah ambang batas yang mengidentifikasi pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total konsumsi atau pendapatan rumah tangga (yaitu 10% dan 25%).

Indikator 3.a.1* Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir adalah perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%). Definisi rokok meliputi merokok tembakau maupun cerutu.

$$\%M \geq 15 = \frac{JP \geq 15yM}{JP \geq 15} \times 100\%$$

Dimana:

- $\%M_{\geq 15}$: Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
- $JP_{\geq 15yM}$: Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari dalam sebulan terakhir pada waktu tertentu
- $JP_{\geq 15}$: Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun pada periode yang sama

3.2.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)

Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (7-12 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan.

$$APK\ SD = \frac{JMSD}{JP7 - 12} \times 100\%$$

Dimana:

- APK SD : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
- JMSD : Jumlah murid pada SD/MI/ sederajat pada periode tertentu

JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan.

$$APK \text{ SMP} = \frac{JM \text{ SMP}}{JP13 - 15} \times 100\%$$

Dimana:

APK SMP : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

JM SMP : Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu

JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA / sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan.

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JM SMA}}{\text{JP16 - 18}} \times 100\%$$

Dimana:

- APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat
- JM SMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu
- JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.1.1.(g) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

$$\text{MYS} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } - i)$$

Dimana:

- MYS : *Mean Years of Schooling* atau Rata-Rata Lama Sekolah
- P15+ : Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun

Lama sekolah penduduk ke-i

- a. Tidak Pernah Sekolah : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama
- b. Masih sekolah di SD-S1 : konversi ijazah terakhir +kelas terakhir – 1
- c. Masih sekolah di S2/S3 : konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak sekolah lagi dan tamat di sekolah terakhir : konversi ijazah terakhir
- e. Tidak sekolah lagi dan tidak tamat di sekolah terakhir : konversi ijazah terakhir+kelas terakhir – 1

Indikator 4.1.2* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

**Tabel 3.1 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat,
SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat**

Jenjang Pendidikan	Usia Lulus pada Umumnya	Batas Bawah (Usia Lulus + 1)	Batas Atas (Usia Lulus + 3)	Rentang Usia yang Berlaku
SD/ sederajat	12	13	15	13-15 Tahun
SMP/ sederajat	15	16	18	16-18 Tahun
SMA/ sederajat	18	19	21	19-21 Tahun

Berdasarkan tabel tersebut, maka:

- Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/ sederajat merupakan persentase remaja usia 13 – 15 tahun yang telah lulus SD.
- Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/ sederajat merupakan persentase remaja usia 16 – 18 tahun yang telah lulus SMP.
- Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/ sederajat adalah persentase usia 19 – 21 tahun yang telah lulus SMA, yang dibuktikan dengan dokumen resmi hasil belajar di masing-masing jenjang tersebut.

$$TPI = \frac{NTPi}{Ni} \times 100\%$$

Dimana:

- TPi : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i
 NTPi : Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut
 Ni : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i

Indikator 4.2.2* Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Jenis Kelamin

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu

- a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD.
- b. Sekolah Dasar/ sederajat.

$$TP_6 = \left(\frac{N_{6PAUD} + N_{6SD}}{N_6} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- TP6 : Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun di program pembelajaran yang terorganisir
 N6PAUD : Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di PAUD pada periode tertentu

- N6SD : Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di SD pada periode tertentu
- N6 : Jumlah populasi anak usia 6 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB (Berbasis Kelompok Bermain)/Taman Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), PAUD-TAAM (Taman Asuh Anak Muslim), PAUD-PAK (Pelayanan Anak Agama Kristen), PAUD-BIA (Bina Iman Anak), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (*Day Care*).

$$APK\ PAUD = \frac{JMPAUD}{JP3 - 6} \times 100\%$$

Dimana:

- APK PAUD : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
- JMPAUD : Jumlah murid pada PAUD pada periode tertentu

JP3-6 : Jumlah penduduk umur 3-6 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun. Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

$$\text{APK PT} = \frac{\text{JMPT}}{\text{JP19-23}} \times 100\%$$

Dimana:

APK PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

JM PT : Jumlah murid pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2 pada periode tertentu

JP19-23 : Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.4.1.(a) Proporsi Remaja (Usia 15-24 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir).

Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone.

$$PR - TIK = \frac{JRAI}{JR15 - 24} \times 100\%$$

Dimana:

- PR-TIK : Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- JRAI : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- JR15-24 : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) pada periode yang sama

$$PD - TIK = \frac{JDAI}{JD15 - 59} \times 100\%$$

Dimana:

- PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- JDAI : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- JD15-59 : Jumlah penduduk remaja (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama

Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) Perempuan /Laki-Laki, (b) Pedesaan/Perkotaan, (c) Kuintil Terbawah/Teratas, (d) Disabilitas/Tanpa Disabilitas

Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/ sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/ laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan/ pedesaan), c) kuintil terendah/ kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/ tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denominator).

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menunjukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekati nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial.

Rasio APK Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APK tingkat SD perempuan terhadap APK tingkat SD laki-laki

$$RG\ SD = \frac{APK_{PSD}}{APK_{LSD}} \times 100\%$$

Dimana:

- RG SD : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APK_{PSD} : APK perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APK_{LSD} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APK Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ SD = \frac{APK_{RSD}}{APK_{TSD}} \times 100\%$$

Dimana:

- RK SD : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APK_{RSD} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APK_{TSD} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APK tingkat SMP perempuan terhadap APK tingkat SMP laki-laki

$$RG\ SMP = \frac{APK_{PSMP}}{APK_{LSMP}} \times 100\%$$

Dimana:

RG SMP : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{PSMP} : APK perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{LSMP} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ SMP = \frac{APK_{RSMP}}{APK_{TSMP}} \times 100\%$$

Dimana:

RK SMP : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{RSMP} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{TSMP} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APK Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APK tingkat SMA perempuan terhadap APK tingkat SMA laki-laki

$$RG\ SMA = \frac{APK_{PSMA}}{APK_{LSMA}} \times 100\%$$

Dimana:

RG SMA : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{PSMA} : APK perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{LSMA} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APK Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ SMA = \frac{APK_{RSMA}}{APK_{TSMA}} \times 100\%$$

Dimana:

RK SMA : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{RSMA} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{TSMA} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APK Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APK tingkat PT perempuan terhadap APK tingkat PT laki-laki

$$RG\ PT = \frac{APK_{PPT}}{APK_{LPT}} \times 100\%$$

Dimana:

- RG PT : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)
- APK_{PPT} : APK perempuan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)
- APK_{LPT} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Rasio APK Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ PT = \frac{APK_{RPT}}{APK_{TPT}} \times 100\%$$

Dimana:

- RK PT : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)
- APK_{RPT} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)
- APK_{TPT} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Rasio APM Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APM tingkat SD perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki

$$RG\ SD = \frac{APM_{PSD}}{APM_{LSD}} \times 100\%$$

Dimana:

- RG SD : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APM_{PSD} : APM perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APM_{LSD} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APM Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ SD = \frac{APM_{RSD}}{APM_{TSD}} \times 100\%$$

Dimana:

- RK SD : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APM_{RSD} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- APM_{TSD} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APM tingkat SMP perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki

$$RG\ SMP = \frac{APM_{PSMP}}{APM_{LSMP}} \times 100\%$$

Dimana:

RG SMP : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{PSMP} : APM perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{LSMP} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ SMP = \frac{APM_{RSMP}}{APM_{TSMP}} \times 100\%$$

Dimana:

RK SMP : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{RSMP} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{TSMP} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APM Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APM tingkat SMA perempuan terhadap APM tingkat SMA laki-laki

$$RG\ SMA = \frac{APM_{PSMA}}{APM_{LSMA}} \times 100\%$$

Dimana:

RG SMA : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{PSMA} : APM perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{LSMA} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APM Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK\ SMA = \frac{APM_{RSMA}}{APM_{TSMA}} \times 100\%$$

Dimana:

RK SMA : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{RSMA} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{TSMA} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APM Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APM tingkat PT perempuan terhadap APM tingkat PT laki-laki

$$RG\ PT = \frac{APM_{PPT}}{APM_{LPT}} \times 100\%$$

Dimana:

RG PT : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{PPT} : APM perempuan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{LPT} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Rasio APM Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$RK PT = \frac{APM_{RPT}}{APM_{TPT}} \times 100\%$$

Dimana:

RK PT : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{RPT} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{TPT} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

$$PAMH \geq 15 = \frac{JAMH \geq 15}{JP \geq 15} \times 100\%$$

Di mana:

- PAMH ≥ 15 : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
- JAMH ≥ 15 : Banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang melek huruf pada periode tertentu
- JP ≥ 15 : Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

AMH penduduk umur 15-24 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun.

AMH penduduk umur 15-59 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.

$$PAMH 15 - 24 = \frac{JAMH 15 - 24}{JP 15 - 24} \times 100\%$$

Di mana:

- PAMH 15-24 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun
- JAMH 15-24 : Banyaknya penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu

JP 15-24 : Jumlah penduduk umur 15-24 tahun pada periode yang sama

$$\text{PAMH } 15 - 59 = \frac{\text{JAMH } 15 - 59}{\text{JP } 15 - 59} \times 100\%$$

Di mana:

PAMH 15-59 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun

JAMH 15-59 : Banyaknya penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu

JP 15-59 : Jumlah penduduk umur 15-59 tahun pada periode yang sama

3.2.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan)

Indikator 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

$$PHB < 15 = \frac{JPHB < 15}{JP (20 - 24)} \times 100\%$$

Di mana:

- PHB <15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun
- JPHB<15 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun
- JP (20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

$$PHB < 18 = \frac{JPHB < 18}{JP (20 - 24)} \times 100\%$$

Di mana:

- PHB <18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun
- JPHB<18 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun
- JP (20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

Indikator 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat

Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

$$P\ PJP = \frac{JPJP}{JJP} \times 100\%$$

Di mana:

- P PJP : Proporsi Perempuan Pada Jabatan Pemerintah
JPJP : Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)
JJP : Jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

$$P\ PJM = \frac{JPJM}{JMLP} \times 100\%$$

Di mana:

- P PJM : Proporsi perempuan pada jabatan managerial
JPJM : Jumlah tenaga manajer perempuan
JMLP : Jumlah tenaga manajer laki-laki dan perempuan

Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam

Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah

perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

$$P\ ITG = \frac{JITGt}{JPt} \times 100\%$$

Di mana:

P ITG : Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam

JITGt : Jumlah individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam pada periode tertentu

JPt : Jumlah penduduk pada periode tertentu

3.2.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi (Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua)

Indikator 6.1.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman.

(1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. (2) Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. (3) Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. (4) Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. (5) Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

$$\text{PAMSA} = \frac{\text{JRTAMSA}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Di mana:

- PAMSA : Persentase rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun
- JRTAMSA : Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$P \text{ AML} = \frac{\text{JRTAML}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Di mana:

- P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
- JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Indikator 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

$$PPCSA = \frac{RTCSA}{JRT} \times 100\%$$

Di mana:

- PPCSA : Persentase penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
- RTCSA : Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
- JRT : Jumlah rumah tangga

$$PKCS = \frac{BPKCS}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

- PKCS : Persentase penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun
- BPKCS : Banyaknya penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air
- JP : Jumlah penduduk

Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Di mana:

- PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

3.2.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau (Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua)

Indikator 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (*liquefied petroleum gas* (LPG) dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga.

$$RGRT = \frac{RTG}{RT} \times 100\%$$

Di mana:

- RGRT : Rasio penggunaan gas rumah tangga
RTG : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (Gas LPG dan atau Jaringan Gas)
RT : Total rumah tangga

3.2.8 Tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua)

Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

PDB per kapita (Ribu Rupiah) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.

$$\text{Laju PDBpk} = \frac{(\text{PDBpk}_t + \text{PDBpk}_{t-1})}{\text{PDBpk}_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

- PDBpk : PDB per kapita
PDBpk_t : PDB per kapita pada periode ke t
PDBpk_{t-1} : PDB per kapita pada periode ke t-1

Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

$$\text{PDBpk} = \frac{\text{PDB ADHB}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Di mana:

- PDBpk : PDB per kapita
PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku
JP : Jumlah Penduduk

Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar

harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.

$$LP\ PDB\ ptk = \frac{(PDB\ ptk_t - PDB\ ptk_{t-1})}{PDB\ ptk_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

LP PDB ptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

PDB ptk_t : PDB per tenaga kerja pada periode t

PDB ptk_{t-1} : PDB per tenaga kerja pada periode t-1

Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

$$P\ LPINP = \frac{PINP}{PTINP} \times 100\%$$

Di mana:

P LPINP : Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian

PINP : Jumlah Penduduk yang bekerja informal di sektor non Pertanian

PTINP : Jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non Pertanian

Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

$$PTKF = \frac{JTKF}{JTK} \times 100\%$$

Di mana:

- P TKF : Persentase tenaga kerja formal
JTKF : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal
JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

$$P TKINP = \frac{JTKINP}{JTK} \times 100\%$$

Di mana:

- P TKINP : Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
JTKINP : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal pertanian
JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

$$U Rt = \frac{U}{JK \times 4}$$

Di mana:

- U Rt : Upah rata-rata per jam kerja (Rupiah)
U : Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan (Rupiah)
JK : Jumlah jam kerja aktual dalam seminggu (jam)

Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Di mana:

- TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)
PP : Jumlah pengangguran (orang)
PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

$$TSP = \frac{PB_{JK<35}}{PB} \times 100\%$$

Di mana:

- TSP : Tingkat setengah pengangguran (%)
 $PB_{JK<35}$: Jumlah pekerja yang tergolong setengah penganggur (orang)
PB : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)

Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment, or training atau NEET*) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan.

Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun.

$$\text{Pr NEET} = \frac{\text{PTB}_{15-24} + \text{PTS}_{15-24} + \text{PTT}_{15-24}}{P_{15-24}} \times 100\%$$

Di mana:

- Pr NEET : Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (%)
- PTS_{15-24} : Jumlah penduduk usia muda yang tidak sekolah (orang)
- PTB_{15-24} : Jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja (orang)
- PTT_{15-24} : Jumlah penduduk usia muda yang tidak mengikuti training/pelatihan (orang)
- P_{15-24} : Jumlah penduduk usia 15-24 tahun (orang)

Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh

penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria:

- a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi objek wisata komersial;
- b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;
- c. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).



Gambar 3.4 Bagan Perjalanan Wisatawan Nusantara

Sumber: Metadata Pilar Ekonomi Edisi II

3.2.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)

Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/ gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.

$$\text{Proporsi TK pada sektor IM} = \frac{\text{JTK IM}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Di mana:

- TK : Tenaga kerja
- IM : Industri manufaktur
- JTK IM : Jumlah tenaga kerja industri manufaktur
- JTK : Jumlah tenaga kerja

3.2.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)

Indikator 10.1.1* Koefisien Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

$$\text{Koefisien Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Di mana:

- f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
 F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1
 F_{ci-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Indikator 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

$$\text{PPHM} = \frac{\text{JPHM}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Dimana:

- PPHM : Persentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita
- JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita
- JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

3.2.11 Tujuan 11 Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas (Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan)

Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/ *Glass-Reinforced Concrete* (GRC) board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/ bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain

tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$$

Dimana:

PHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRT : Jumlah rumah tangga

Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB atau Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan

maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Berdasarkan definisi tersebut, jumlah korban bencana yang dihitung adalah korban meninggal, hilang, terluka/sakit, dan mengungsi.

$$JKM_{SR} = \left(\frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$$

Dimana:

JKM_{SR} : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

$$JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000$$

Dimana:

JKL_{SR} : Jumlah korban terluka per 100.000 orang

JKH : Jumlah korban terluka akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

Indikator 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, BNPB).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total pendapatan domestik bruto (PDB).

$$PKE = \left(\frac{KEK_1 + KEK_2 + \dots + KEK_n}{PDB} \right) \times 100$$

Dimana:

- PKE : Proporsi kerugian ekonomi langsung terhadap PDB
- KEK₁ : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota 1
- KEK₂ : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota 2
- KEK_n : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota n
- PDB : Pendapatan domestik bruto tahun yang sama dengan tahun terjadinya bencana

**3.2.12 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat
(Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai
Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses
Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan
Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua
Tingkatan)**

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

$$PPKK = \frac{JPKK}{JP} \times 100\%$$

Dimana:

- PPKK : Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JPKK : Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JP : Jumlah Penduduk

Indikator 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya.

Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, coleskan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

$$P\text{ PKP} = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$$

Dimana:

- P PKP : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKKP : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Indikator 16.9.1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

$$P\text{ BAL} = \frac{J\text{BAK}}{J\text{B}} \times 100\%$$

Dimana:

- P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur
- JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran
- JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

3.2.13 Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan)

Indikator 17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan internet

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses

ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon seluler, *personal digital assistant* (PDA), perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun seluler.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

$$P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

- P II : Proporsi individu yang menggunakan internet
JP5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet
JP : Jumlah penduduk

3.3 Proyeksi *Baseline* Indikator TPB/SDGs

Proyeksi *baseline* indikator TPB/SDGS di Kabupaten Bandung Barat menggunakan asumsi *Business as Usual* (BAU) atau mengikuti pola jangka panjang data tanpa adanya intervensi. Hasil proyeksi *baseline* BAU memberikan gambaran posisi Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target TPB/SDGs pada tahun 2030. Selain itu, hasil tersebut juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk

mengevaluasi arah kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

Metodologi proyeksi *baseline* menggunakan *trend projection* atau *trend forecasting* (Anderson, Sweeney, Williams, Camm, & Cochran, 2012; Diebold, 2007; Wooldridge, 2015) dengan melakukan regresi antara sebuah variabel yang nilainya pada waktu mendatang ingin diprediksi (sebagai variabel bebas) terhadap variabel waktu menggunakan estimator *Ordinary Least Square* (OLS) berdasarkan data *time series*. Namun, tidak semua indikator memiliki data historis yang cukup panjang untuk proses proyeksi.

Proses pemilihan model regresi untuk proyeksi *baseline* tidak hanya satu. Terdapat tiga model yang masing-masing menunjukkan pemilihan jenis tren untuk melakukan proyeksi. Pemilihan model yang tepat sangat penting karena harus sesuai dengan bentuk tren data *time series* yang sudah tersedia. Jenis tren yang umum digunakan untuk *trend projection* dan *trend forecasting* meliputi linear, eksponensial, dan logaritmik (Tabel 3-2). *Trend linear* digunakan untuk data yang memiliki pergerakan meningkat atau menurun dan membentuk garis lurus. *Trend exponensial* digunakan untuk menunjukkan pergerakan data dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang konstan dari waktu ke waktu. Sementara itu, *trend logarithmic* digunakan untuk mengilustrasikan pergerakan data yang awalnya mengalami peningkatan atau penurunan secara cepat, namun kemudian mengalami perubahan yang mendatar. Selain *trend forecasting*, juga dilakukan penghitungan rata-rata data historis untuk memproyeksikan indikator terpilih pada tahun 2030 dengan asumsi bahwa proyeksi tahun 2030

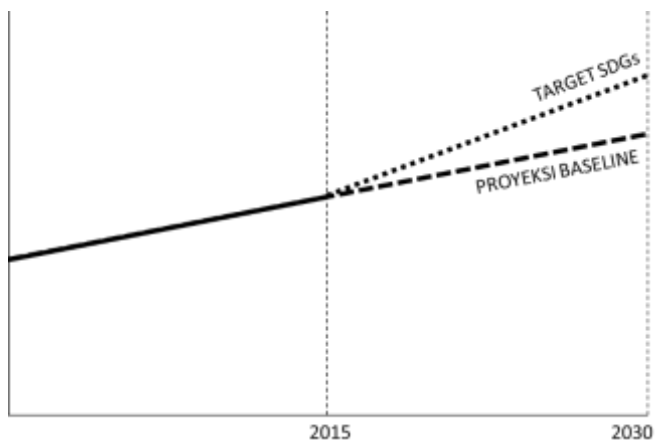
sama dengan data pada tahun terakhir, dan berdasarkan penilaian para ahli (*expert judgement*).

Tabel 3-2 Jenis *Trend* dan Spesifikasi Model Regresi

Jenis <i>Trend</i>	Spesifikasi Model Regresi
Linear	$y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{waktu}_t + \varepsilon_t$
Eksponensial	$\text{Ln}(y_t) = \text{Ln}(\beta_0) + \beta_1 \text{waktu}_t + \varepsilon_t$
Logaritmik	$y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}(\text{waktu}_t) + \varepsilon_t$

3.4 Target Indikator TPB/SDGs dan *Scorecard*

Untuk mendapatkan pemahaman tentang pencapaian indikator TPB/SDGs, diperlukan suatu ukuran atau target yang jelas pada tahun 2030. Target tersebut dapat bersifat kuantitatif dan ditetapkan baik secara global maupun nasional. Selain itu, terdapat pula target yang bersifat kualitatif, namun perlu diukur secara kuantitatif melalui penilaian ahli (*expert judgment*). Proyeksi pencapaian TPB/SDGs pada tahun 2030 dibandingkan dengan target TPB/SDGs 2030 dan disajikan dalam bentuk *scorecard* dengan penilaian tertentu.



Gambar 3.1 Ilustrasi Proyeksi Terhadap Target SDGs 2030

3.4.1 Target Indikator TPB/SDGs

Data Kabupaten Bandung Barat memiliki 39 target kuantitatif indikator TPB/SDGs (sekitar 60,9% dari total 63 indikator terpilih, atau 92 jika memperhitungkan sub-indikator). Sementara itu, 25 indikator lainnya memiliki target TPB/SDGs yang bersifat kualitatif, sehingga perlu kuantifikasi target TPB/SDGs agar dapat melakukan penilaian secara menyeluruh menggunakan *expert judgement*.

Target indikator terpilih berasal dari berbagai sumber, termasuk United Nations (UN), World Health Organization (WHO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Labour Organization (ILO), Rencana Aksi Nasional (RAN), Roadmap TPB/SDGs Indonesia, Metadata Edisi II, dan juga melibatkan *expert judgement*. Semua target ini tertera pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3-3 Target Kuantitatif Indikator SDGs Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2030

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
1. Tanpa Kemiskinan	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurun 50% dari 2015	UN
	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	100%	UN
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	100%	UN
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40)	0	UN
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	100%	UN
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	100%	UN

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Kontrak/Sewa)	Nilai max + 2*std	*
	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Milik Sendiri)	100%	*
2. Tanpa Kelaparan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	3,60%	Roadmap SDGS Indonesia
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	0	RAN
	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun 40%	UN, WHO
	2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Di bawah 5%	UN, WHO
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%	UN
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	100%	UN
	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	64,55%	Roadmap SDGS Indonesia
	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	0%	UN

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% total Pengeluaran Rumah Tangga)	0%	*
	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga)	0%	*
	3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	0%	OECD
4. Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100%	UN
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	100%	UN
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	100%	UN
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	12 Tahun	*
	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	100%	Metadata II
	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	100%	Metadata II
	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	100%	Metadata II
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	100%	Metadata II
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100%	UN
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Dua kali lipat dari 2015	*

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	100%	*
	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	100%	*
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ Sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/ teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	100%	UN

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	100%	Metadata II
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	100%	UN
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100%	UN
5. Kesetaraan Gender	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	0	UN
	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	0	UN
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	50%	ILO
	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	100%	*
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	88,20%	*
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	100%	UN
	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	100%	Roadmap SDGs Indonesia
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	100%	UN

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
7. Energi Bersih dan Terjangkau	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	100%	UN
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	7%	UN
	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	119.636 (Ribu rupiah)	*
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,78%	OECD
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	25%	*
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	75%	*
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurun	*
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	3,80%	Roadmap SDGs Indonesia
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran		
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	3,80%	*
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	Meningkat 50%	*

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
9. Industri Inovasi dan Infrastruktur	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat dua kali lipat di negara kurang berkembang	
10. Mengurangi Kesenjangan	10.1.1*	Koefisien gini	0,31	*
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	0%	OECD
11. Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	100%	UN
16. Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0	UN
	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	100%	*
	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	100%	UN
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	100%	*

Catatan: * Hasil kuantifikasi target oleh tim penyusun

3.4.2 Scorecard

Scorecard merupakan penilaian dari setiap indikator TPB/SDGs yang didapatkan melalui perbandingan persentase antara hasil proyeksi dengan target TPB/SDGs tahun 2030. Penilaian ini terbagi menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan penjelasan dan kriteria masing-masing seperti yang tertera pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3-4 Sistem Penilaian *Scorecard* SDGs Tahun 2030

A	Mencapai atau hampir mencapai target SDGs Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai 97.5% target SDGs.
B	Mendekati target SDGs Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mendekati target SDGs dan mencapai setidaknya 90% target SDGs.
C	Masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 75% target SDGs.
D	Baru setengah jalan menuju target SDGs Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 50% target SDGs.
E	Masih cukup jauh mencapai target SDGs Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut masih kurang dari 50% target SDGs.

3.5 Konsistensi Data di Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat akurasi hasil proyeksi dan analisis kesiapan pencapaian indikator TPB/SDGs sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya:

- Ketersediaan dan konsistensi data untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs. Data yang digunakan untuk mengukur indikator TPB/SDGs tidak selalu tersedia di tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa data yang tersedia terkadang tidak konsisten dengan data di tingkat provinsi dan/ atau nasional. Oleh karena itu, hanya 63 indikator (92 jika memperhitungkan sub-indikator) dari 13 tujuan SDGs yang datanya tersedia dan dapat diakses. Pencapaian TPB/SDGs dihitung menggunakan metode perhitungan yang sesuai dengan metadata SDGs Indonesia. Jumlah indikator yang dianalisis tersebut tentunya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah indikator yang digunakan oleh Indonesia (289 berdasarkan berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II dan 319 indikator berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi I).
- Penentuan target yang ingin dicapai pada tahun 2030. Dari 63 indikator (92 jika memperhitungkan sub-indikator) yang dianalisis, hanya 28 indikator (43,75%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari United Nations, 4 indikator (6,25%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari *Roadmap* SDGs Indonesia, 3 indikator (4,68%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari Metadata II, 1 indikator

(1,56%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari Rencana Aksi SDGs Indonesia, 3 indikator (4,68%) dengan target kuantitatif bersumber dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan 1 indikator (1,56%) dengan target kuantitatif yang bersumber dari International Labour Organization (ILO). Target kuantitatif untuk indikator lainnya ditentukan berdasarkan penilaian dari kesepakatan para ahli (*expert judgement*) dan dapat berbeda apabila ditentukan oleh para ahli yang lain. Oleh karena itu, hasil dari kuantifikasi target yang dihasilkan tentu bisa menimbulkan pro dan kontra dan menghasilkan nilai dan skor pencapaian SDGs yang berbeda pula.

- Metode tren yang digunakan untuk analisis. Pemilihan metode tren akan sangat mempengaruhi hasil proyeksi dan pada akhirnya nilai *scorecard* capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan model tren ini biasanya dilakukan dengan menggunakan acuan nilai R^2 tertinggi. Namun demikian, seringkali terdapat beberapa model yang memiliki R^2 yang relatif rendah sehingga, model tren tidak digunakan dan proyeksi digantikan dengan menggunakan nilai rata-rata ataupun nilai data terakhir. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil proyeksi dan pada akhirnya nilai *scorecard* capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat.
- Jumlah indikator yang digunakan dalam analisis. Nilai dari masing-masing indikator TPB/SDGs diakumulasi sehingga diperoleh *scorecard* untuk Kabupaten Bandung Barat. Apabila

terjadi penambahan indikator TPB/SDGs yang dianalisis, maka *scorecard* Kabupaten Bandung Barat juga dapat berubah.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diingat bahwa penilaian pencapaian TPB/SDGs harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Hasil analisis yang disajikan mungkin tidak mencerminkan proyeksi pencapaian TPB/SDGs secara menyeluruh. Selain itu, hasil proyeksi pencapaian TPB/SDGs dikalkulasikan dengan berbagai asumsi dalam perhitungan serta analisisnya.

Bab 4

Baseline dan Proyeksi Pencapaian Indikator TPB/SDGs

Data indikator TPB/SDGs yang telah dipilih diolah berdasarkan data historis (time series) sesuai dengan ketersediaan data yang berbeda-beda. Hasil pengolahan ini disajikan dalam bentuk grafik proyeksi pencapaian TPB/SDGs terhadap target TPB/SDGs tahun 2030, sehingga dapat ditentukan skor dari setiap indikator. Hasil pencapaian pada setiap tujuan untuk setiap indikator dipresentasikan dalam bentuk tabel yang mencakup data tahun 2015 (data terakhir MDGs sebelum SDGs) dan tahun 2020. Selain itu, terdapat proyeksi hasil pencapaian indikator pada tahun 2030, serta *scorecard* untuk masing-masing indikator.

4.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tanpa kemiskinan dapat diartikan dengan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Terdapat 11 indikator terpilih pada tujuan 1, dengan pemisahan analisis indikator 1.4.2* (berdasarkan kepemilikan kontrak/sewa dan milik sendiri) sehingga terdapat 12 indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1. *Scorecard* tujuan 1, Kabupaten Bandung Barat mencapai nilai cukup baik dengan 5 indikator memperoleh nilai *scorecard* A, 1 indikator yang menunjukkan nilai B, 3 indikator memiliki nilai C, 2 indikator dengan nilai D dan 1 indikator bernilai E. Indikator yang memperoleh

nilai C diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan sendiri. Sedangkan 2 indikator yang memperoleh nilai D adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan serta sanitasi layak dan berkelanjutan (B40). Dan 1 indikator yang memperoleh nilai E adalah proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa.

Tabel 4-1 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 1

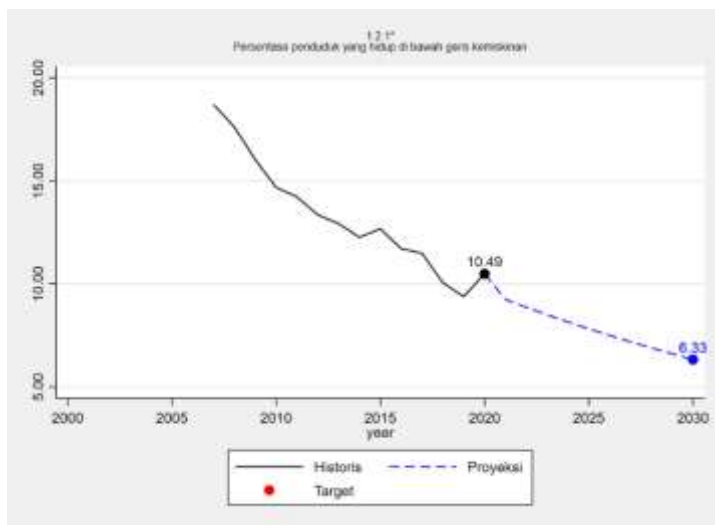
KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	12,67	10.49	6.33	6.335	A
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40)	69,91	b	100	100	A
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	47,62	61.13	74.02	100	D

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	layak dan berkelanjutan (B40)					
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	36,13	48.05	54.77	100	D
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40)	17.9	11.87	4.99	0	B
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (B40) (%)	96.82	97.45	100	100	A
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)	73.51	72.42	85.04	100	C
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)	40.03	51.74	83.01	100	C
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (B40)	64.25	77.03	100	100	A
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber	100	b	100	100	A

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (B40)					
1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa	2.60	3.71	5.39	38.34	E
1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan milik sendiri	91.44	83.89	83.60	100	C

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia.

Target 1.2 SDGs mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil dari proyeksi untuk 1 indikator pada target tersebut.

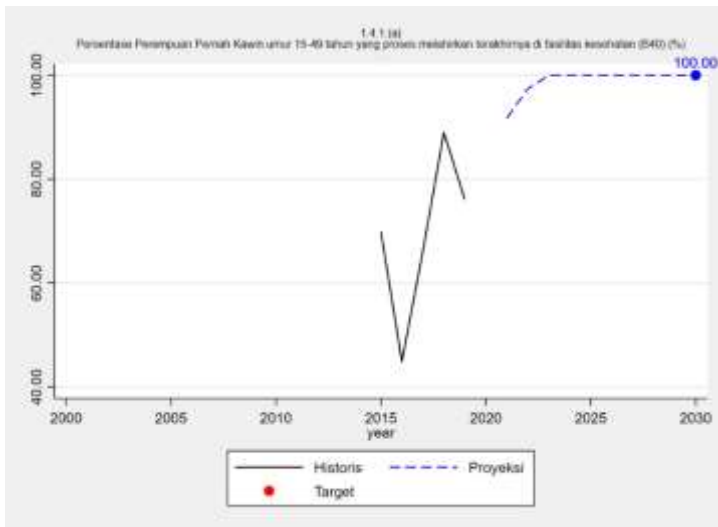


Gambar 4.1 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Berdasarkan data historis yang dikumpulkan dari tahun 2007 sampai 2020 untuk indikator (1.2.1*) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, indikator ini mengalami titik puncak pada tahun 2007 dengan nilai 18,7% (Gambar 4.1). Selain itu, nilai dari indikator ini berfluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Pencapaian pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 10,49% dengan proyeksi pencapaian untuk tahun 2030 sebesar 6,3%. Apabila dibandingkan dengan target kuantitatif yang telah ditentukan oleh United Nations yaitu menurun 50% dari tahun 2015 atau 6,3% pada tahun 2030, maka menghasilkan nilai *scorecard* A.

Pada target 1.4, hal yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya

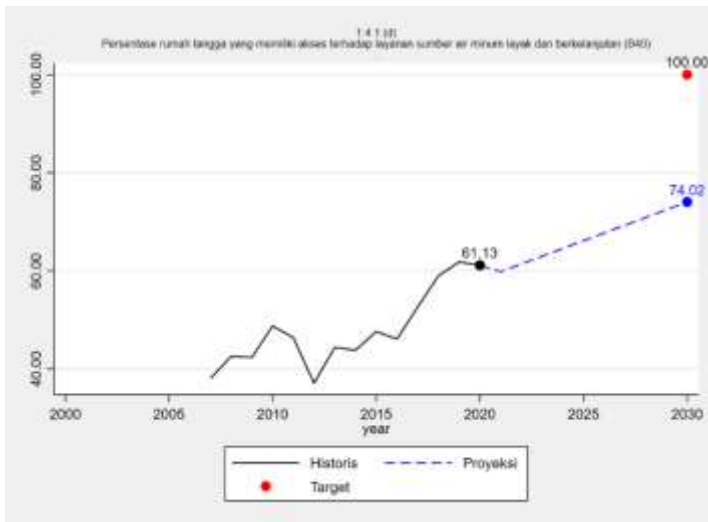
masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil dari proyeksi untuk 10 indikator pada target tersebut.



Gambar 4.2 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)

Proyeksi indikator (1.4.1.(a)) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan untuk kelompok 40 persen pendapatan terendah menggunakan data historis dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Data historis ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2015 (69,91%) ke tahun 2016 (44,88%), kemudian pada tahun setelahnya terjadi peningkatan kembali (Gambar 4.2). Hasil proyeksi untuk tahun 2030

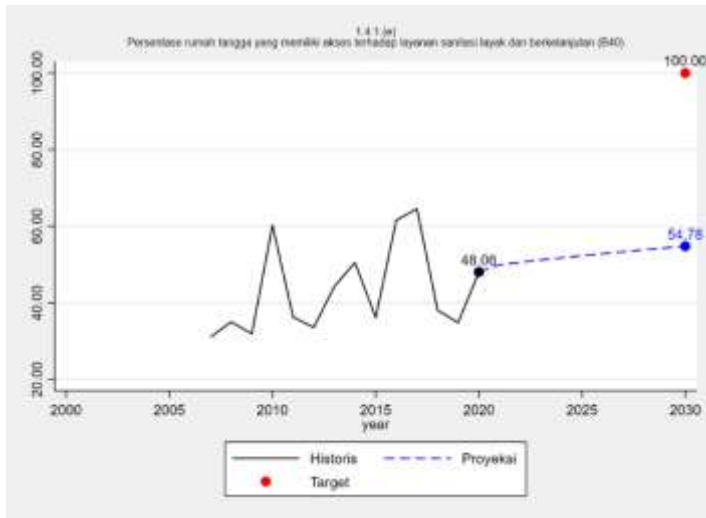
adalah 100% yang sebetulnya diproyeksikan akan tercapai dari tahun 2023. Perbandingan antara angka proyeksi tersebut dengan target kuantitatif yang telah ditentukan oleh United Nations (100%), maka Kabupaten Bandung Barat memperoleh *scorecard* A.



Gambar 4.3 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)

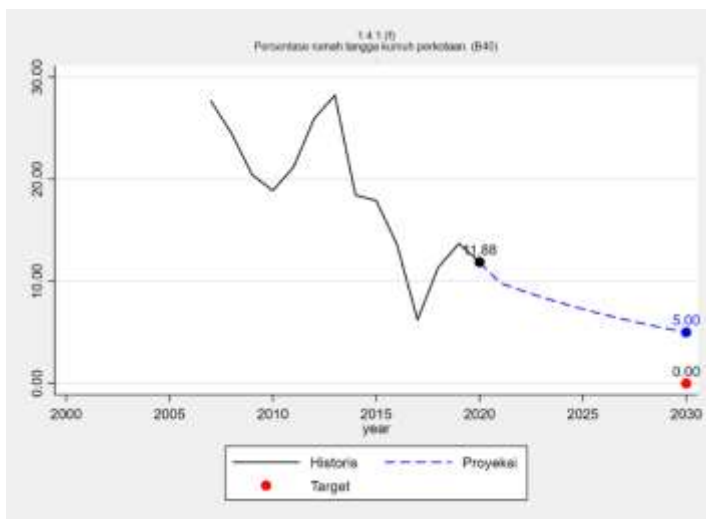
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa data historis dari tahun 2007 sampai tahun 2019 untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan untuk kelompok 40 persen pendapatan terendah memiliki nilai yang fluktuatif dengan titik terendah berada pada tahun 2012 sebesar 37,06% dan titik tertinggi sebesar 61,8% berada di tahun 2019, sehingga menghasilkan proyeksi pada tahun 2030 sebesar 74,02% yang masih jauh dari target kuantitatif yang telah ditentukan oleh

United Nations (100%). Oleh karena itu, perolehan nilai *scorecard* untuk indikator ini adalah D.



Gambar 4.4 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)

Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan untuk kelompok 40 persen pendapatan terendah menggunakan data historis yang diperoleh dari tahun 2007 sampai 2019 (Gambar 4.4). Data historis tersebut menunjukkan adanya tren sangat fluktuatif dengan angka terendah 31,06% pada tahun 2007 dan tertinggi pada tahun 2017 dengan angka 64,54%. Tahun 2019 bahkan turun kembali menjadi 34,8% sehingga menghasilkan proyeksi tahun 2030 54,77%. Angka tersebut masih jauh dari target kuantitatifnya sebagaimana ditetapkan oleh United nations yaitu 100%. Oleh karena itu, indikator ini memperoleh *scorecard* D.

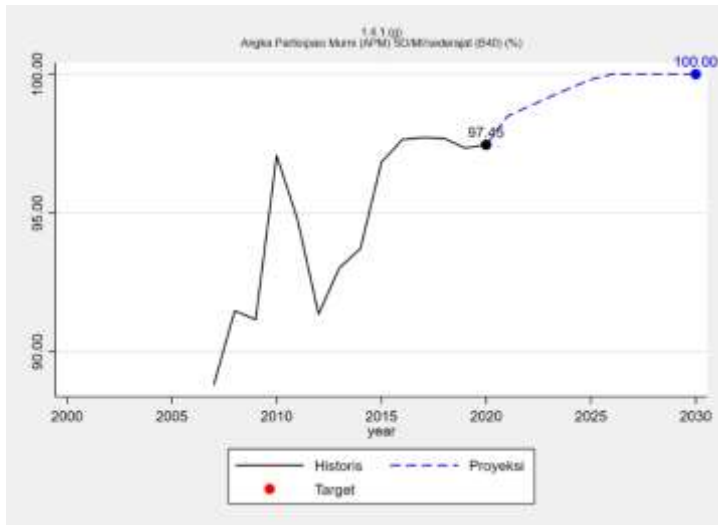


Gambar 4.5 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40)

Indikator persentase rumah tangga kumuh perkotaan untuk kelompok 40 persen pendapatan terendah dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat dan keberadaan masalah kemiskinan sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Secara garis besar sejak tahun 2007 persentase rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Bandung Barat cenderung menurun, meskipun sempat naik di tahun 2011 sampai dengan 2013, 2018 dan 2019 (13,68%). Tahun 2030 diproyeksikan mencapai 4,99% atau 5%, cukup mendekati target kuantitatif yang ditetapkan oleh United Nations yaitu 0%, sehingga menghasilkan *scorecard* B.

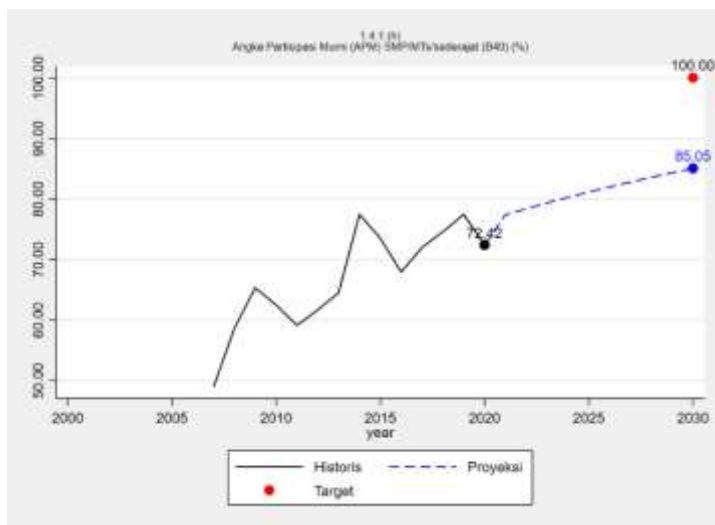
Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menggambarkan daya serap dari sistem pendidikan terhadap penduduk yang berada pada usia sekolah. Dari nilai APM ini dapat diukur penduduk berusia sekolah

yang dapat memperoleh dan menggunakan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.



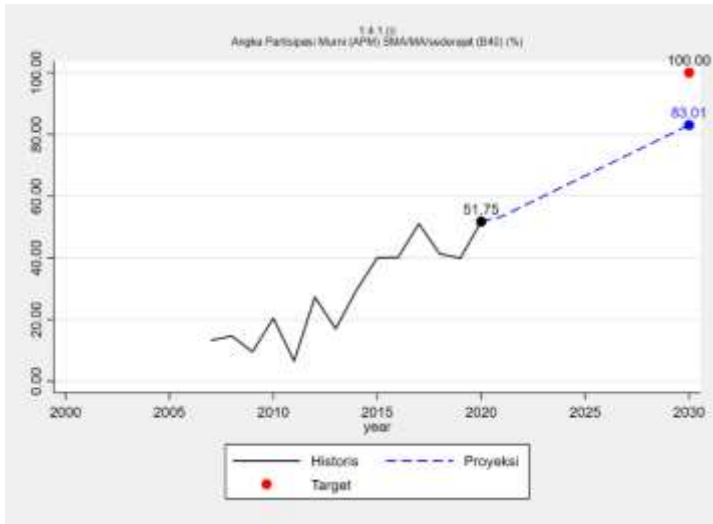
Gambar 4.6 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (B40) (%)

Data historis dari tahun 2007 sampai 2019 pada indikator APM SD/MI/ sederajat untuk penduduk yang berada pada 40% pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat cenderung mengalami kenaikan namun tidak signifikan (Gambar 4.6). Pada tahun 2019 data historis berada pada angka 97,33% dan proyeksi mencapai angka 100% yang merupakan target United Nations mulai tahun 2026, sehingga perolehan *scorecard* untuk indikator ini adalah A. Maka dapat dikatakan bahwa mulai tahun 2026 diproyeksikan seluruh anak yang berada pada usia SD/MI/ sederajat dari kelompok penduduk yang berada pada 40% pendapatan terendah dapat bersekolah tepat waktu.



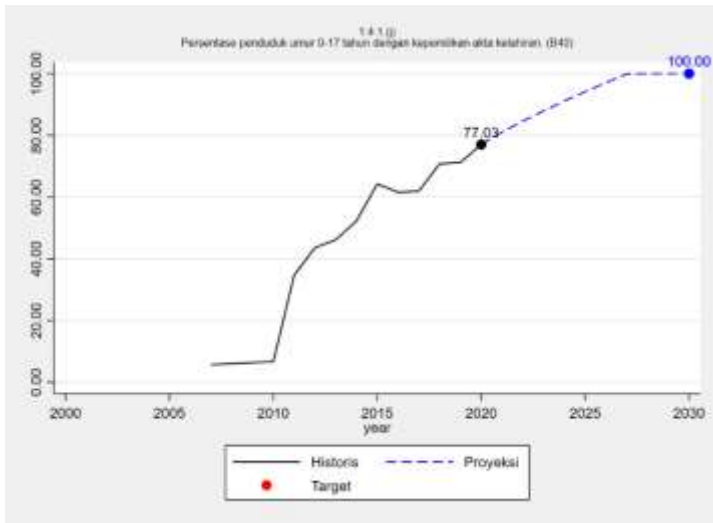
Gambar 4.7 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)

Berbeda dengan APM SMP/MTs/ sederajat, tahun 2007 menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 48,97%. Tren data historis menunjukkan nilai yang berfluktuasi yang cenderung meningkat namun tidak signifikan. Tahun 2019 mencapai 77,46% dan proyeksi untuk tahun 2030 mencapai 85,04%. Target yang ditetapkan oleh United Nations adalah 100%, sehingga indikator ini mendapatkan *scorecard* C. Seluruh anak di Kabupaten Bandung Barat dengan usia SMP/MTs/ sederajat yang berasal dari kelompok penduduk 40% pendapatan terendah diprediksikan belum dapat bersekolah secara tepat waktu.



Gambar 4.8 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)

Sama halnya dengan indikator APM SMP/MTs/ sederajat, untuk indikator APM SMA/MA/ sederajat bagi kelompok penduduk 40% pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat memperoleh *scorecard* C karena diprediksikan mencapai 83,01% pada tahun 2030. Data historis sangat berfluktuasi dengan tren yang secara garis besar meningkat (Gambar 4.8). Data terakhir tahun 2019 mencapai angka yang cukup rendah yaitu 39,87%.



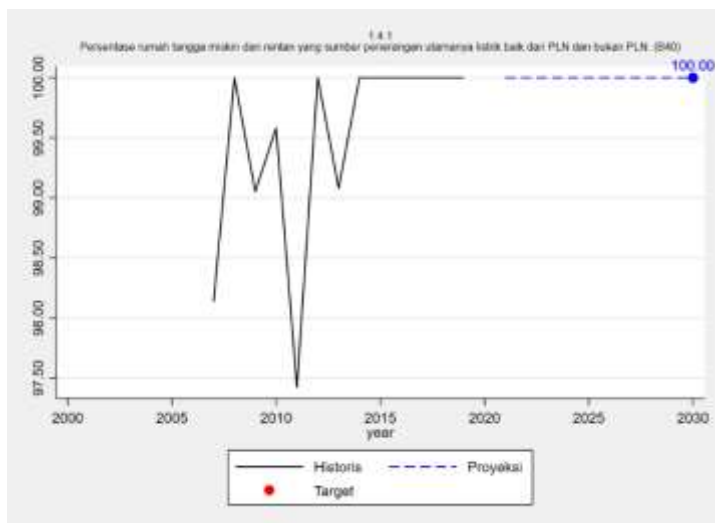
Gambar 4.9 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (B4)

Data historis dimulai dari tahun 2007 dengan angka 5,7% sampai dengan tahun 2020 dengan angka pencapaian 77,03% dengan pola meningkat secara signifikan. Pencapaian target yang ditetapkan oleh United Nations (100%) diproyeksikan terjadi pada tahun 2028, sehingga persentase umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran bagi kelompok penduduk 40% pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat memperoleh *scorecard* A.

Indikator persentase penduduk umur 0-17 tahun pada kelompok penduduk 40% pendapatan terendah dengan kepemilikan akta kelahiran digunakan untuk menghitung banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati usia yang masih dianggap sebagai anak atau sebelum tergolong ke dalam usia yang sudah dapat memasuki dunia kerja maupun usia yang sudah dapat menikah. Setelah memiliki akta kelahiran, maka setiap individu akan diberikan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) yang juga terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Apabila telah terdaftar dan diakui identitasnya, maka akses terhadap layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat akan dengan mudah diberikan. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran dalam pengukuran indikator ini karena pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran dianggap sebagai langkah pertama dalam menjamin pengakuan di hadapan hukum, melindungi haknya, serta menjadi jaminan tidak terjadinya kelalaian dalam hak.

Ketika seorang anak tidak memiliki dokumen identifikasi resmi, maka anak tersebut akan kesulitan atau bahkan ditolak dalam memperoleh layanan kesehatan serta pendidikan. Dampak lainnya yang bisa dirasakan oleh anak yang tidak memiliki akta adalah anak tersebut dapat melangsungkan pernikahan, masuk ke dalam dunia kerja, dipaksa masuk kedalam militer sebelum usia legal yang telah ditentukan. Saat sudah dewasa akta kelahiran dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti untuk memperoleh jaminan sosial, pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak untuk memilih, dan membuat paspor.

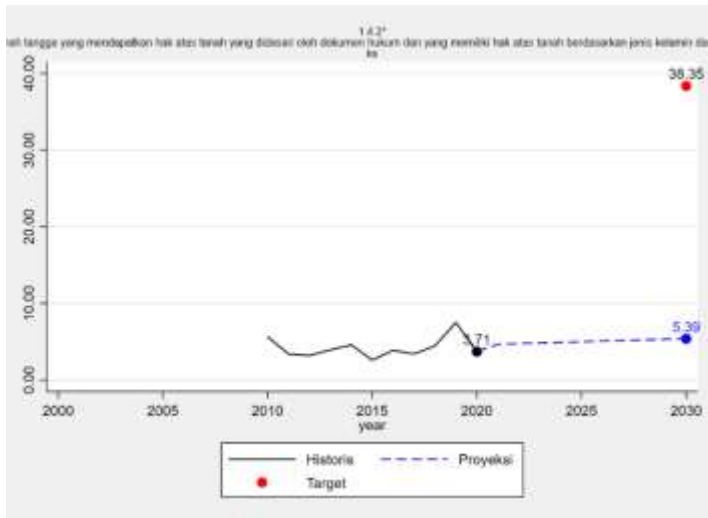


Gambar 4.10 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (B40)

Indikator persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN maupun non PLN diperlukan untuk melihat kecenderungan perilaku dari rumah tangga miskin yang sudah memiliki akses terhadap listrik penerangan. Ketersediaan akses kepada fasilitas listrik diharapkan dapat dimanfaatkan oleh keluarga tersebut untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi. Dengan tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, pemberian akses terhadap listrik juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Data historis untuk indikator rasio elektrifikasi pada kelompok rumah tangga yang berada pada 40% pendapatan terendah Kabupaten

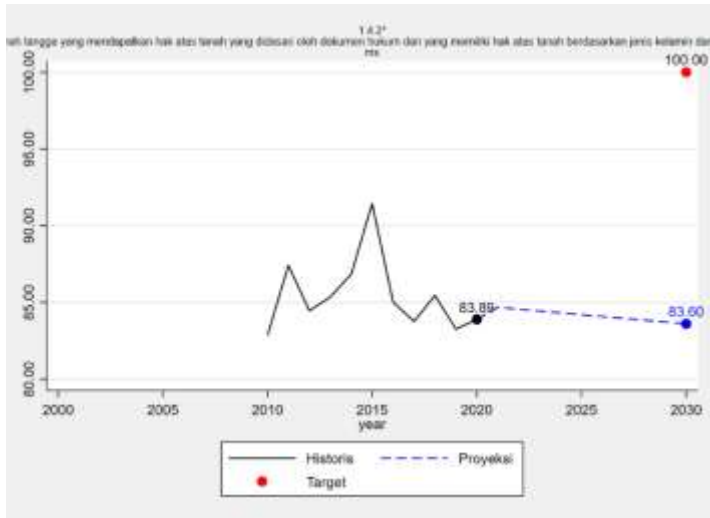
Bandung Barat diperoleh dari tahun 2007 sampai tahun 2019. Meskipun sempat mengalami penurunan dan kenaikan, namun data historis menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi pada kelompok rumah tangga yang berada pada 40% pendapatan terendah Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai target 100% yang ditentukan oleh United Nations sejak tahun 2014, sehingga *scorecard* indikator ini bernilai A. Rumah tangga miskin dan rentan di Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2014 sudah mendapatkan akses kepada sistem penerangan secara menyeluruh.



Gambar 4.11 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa

Berdasarkan data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk indikator proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa, menunjukkan nilai yang sangat rendah,

cukup berfluktuasi dan cenderung menurun (Gambar 4.11). Target yang ditetapkan oleh Tim Penyusun sekitar 38,35%, namun hasil proyeksi tahun 2030 masih sangat jauh dari yang diharapkan yaitu hanya mencapai 5,39% sehingga memperoleh *scorecard* E, satu-satunya di tujuan 1.



Gambar 4.12 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah tipe kepemilikan milik sendiri

Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum berdasarkan tipe kepemilikan milik sendiri di Kabupaten Bandung Barat lebih baik dibandingkan dengan kontrak/sewa. Data historis yang dari tahun 2010 (82,84%) sampai 2020 (83,89%) berfluktuasi cenderung naik namun tidak signifikan. Selama 10 tahun tersebut hanya mengalami kenaikan sebesar 11,05% sehingga proyeksi pencapaian pada tahun 2030 adalah 83,60% dan

memperoleh *scorecard* C jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang telah ditentukan oleh tim penyusun yaitu 100%.

4.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tanpa kelaparan diartikan dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan 2 diwakili oleh 4 indikator (7 indikator jika memperhitungkan sub indikator) yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Untuk indikator 2.1.1.(a), 2.2.1*, dan 2.2.2* menggunakan dua sumber data yang berbeda yaitu dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat dan Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES. Perbedaan sumber data ini dapat mempengaruhi hasil dari proyeksi, namun secara keseluruhan perolehan nilai *scorecard* tetap sama. 3 indikator tujuan ini diproyeksikan sudah mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2030 (*scorecard* A dan B). Sedangkan 4 indikator lainnya belum bisa mencapai target karena memperoleh nilai C diantaranya prevalensi *wasting* dan *stunting*. Artinya prevalensi kekurangan gizi pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 diproyeksikan baru mencapai 75% dari target SDGs.

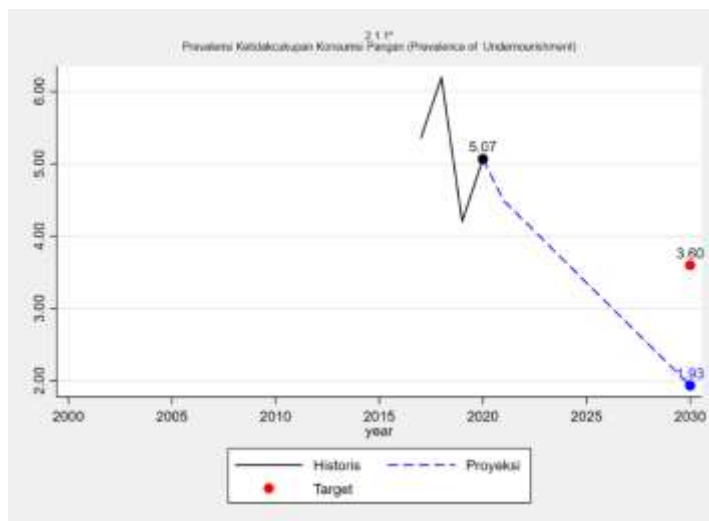
Tabel 4-2 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 2

KODE	INDIKATOR	KETERANGAN	2015	2020	2030*	TARGET	NILAI
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	5,34 ^f	5,06	1,93	3,6	A

KODE	INDIKATOR	KETERANGAN	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	(Prevalence of Undernourishment)						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	22,4 ^d	13,48 ^g	17,94	0	C
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	16,9	16,7 ^f	12,93	0	C
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 0-59 bulan.	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	52,5 ^d	36,69 ^g	44,59	31,5	C
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	29,6	34,3 ^f	32,16	17,76	C
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita. 0-59 bulan.	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	13,2 ^d	9,67 ^g	11,43	5	B
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	7,3	8,19 ^f	7,03	5	A

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018.

Hal yang ingin dicapai sesuai dengan target 2.1 adalah pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

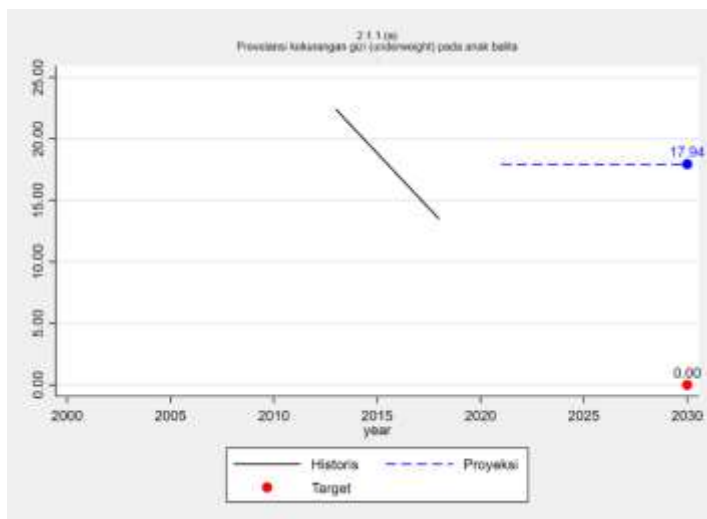


Gambar 4.13 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan

Data historis dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 relatif rendah dan menunjukkan tren yang cenderung menurun untuk indikator prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Gambar 4.13). Proyeksi pada tahun 2030 sebesar 1,93% dan melampaui target kuantitatif yaitu 3,6% sebagaimana tercantum di dalam *Roadmap* SDGs Indonesia, sehingga *scorecard* yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat untuk indikator ini adalah A.

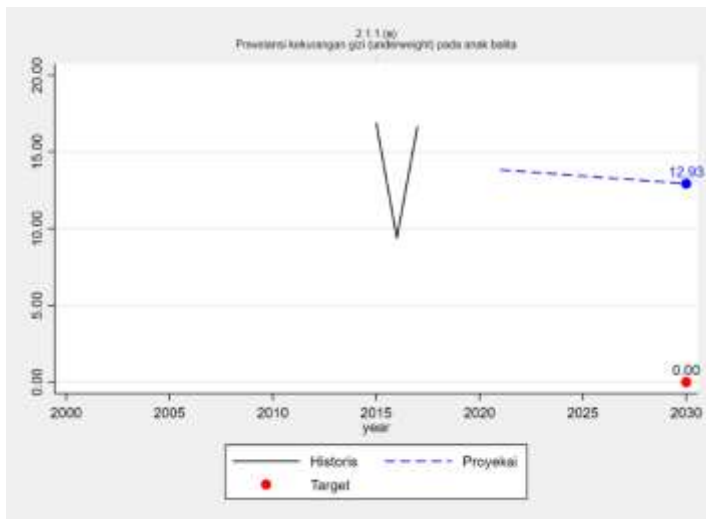
Target 2.2 SDGs menyatakan bahwa pada tahun 2030 dapat menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun

2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.



Gambar 4.14 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

Data historis untuk indikator prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita yang diperoleh dari data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 4.14. Data historis hanya terdapat pada tahun 2013 dan 2018 dengan hasil proyeksi dari indikator tersebut pada tahun 2030 sebesar 17,94%. Target kuantitatif sebesar 0% sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perolehan *scorecard* untuk Kabupaten Bandung Barat adalah C.

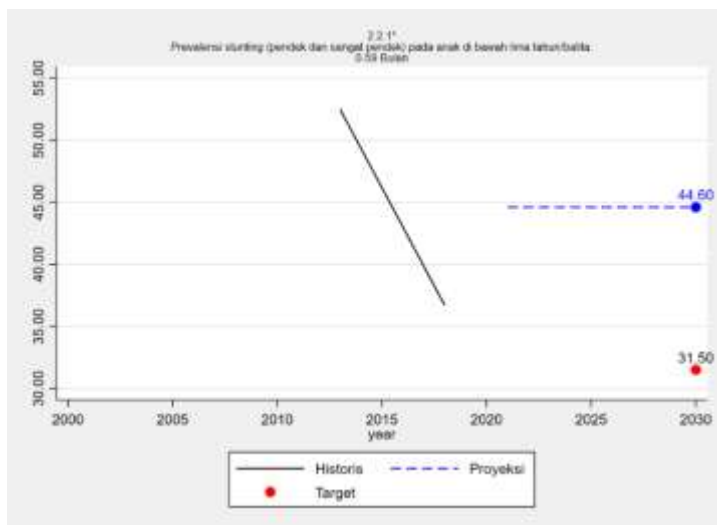


Gambar 4.15 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

Terdapat data historis prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita yang diperoleh dari Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia yang dipublikasikan oleh KEMENKES pada tahun 2015-2017 (Gambar 4.15). Grafik tersebut menunjukkan pola yang berbentuk U dengan titik terendah pada tahun 2016 (9,4%). Proyeksi dari indikator tersebut pada tahun 2030 sebesar 12,93%. Angka proyeksi tersebut masih jauh dari target kuantitatif yaitu 0% (ditetapkan pada Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Oleh karena itu, *scorecard* yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat adalah C.

Indikator prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita digunakan untuk menghitung persentase anak berusia di bawah lima tahun yang mengalami kurang gizi kronis dengan membandingkan tinggi badannya dengan tinggi rata-rata dari

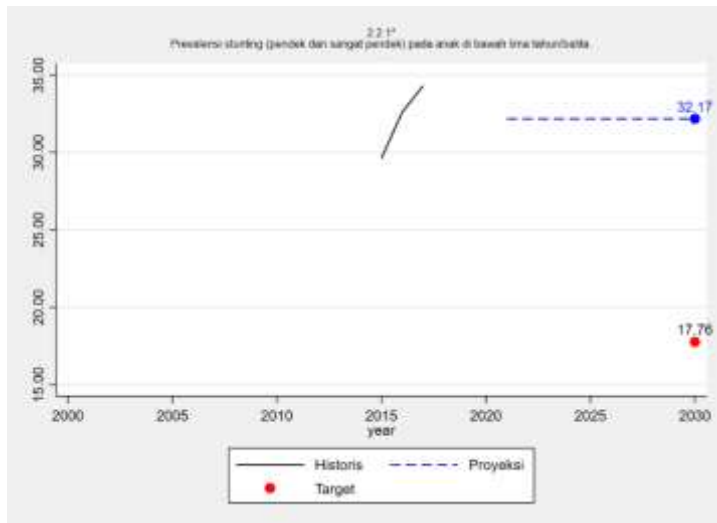
penduduk acuan. Permasalahan *stunting* pada anak-anak juga dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. *Stunting* yang dialami oleh anak-anak dapat memberikan efek yang serius untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional. Berdasarkan kajian empiris dampak buruk yang dapat dirasakan dari *stunting* pada usia muda adalah kerusakan pada perkembangan otak sehingga sulit untuk memperbaikinya pada usia dewasa walaupun sudah memperoleh gizi yang tepat. Lalu, anak *stunting* lebih beresiko untuk terkena penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular pada usia lanjut seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Maka dari itu, indikator ini dapat menjelaskan bahwa memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak sangat penting.



Gambar 4.16 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)

Pola data historis tahun 2013 ke tahun 2018 untuk indikator prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan) yang diperoleh dari data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat, menunjukkan pola yang menurun (Gambar 4.16). Namun menghasilkan proyeksi tahun 2030 sebesar 44,60%. Sedangkan target 31,50% sebagaimana ditetapkan oleh United Nations dan World Health Organization, sehingga menghasilkan *scorecard C* untuk Kabupaten Bandung Barat.

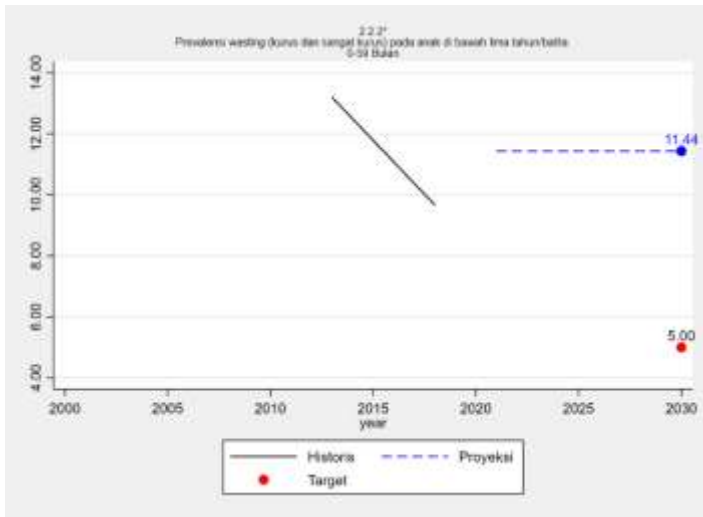
Begitu juga dengan *scorecard* indikator prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita yang diperoleh dari Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia dan dipublikasikan oleh KEMENKES, memperoleh nilai C.



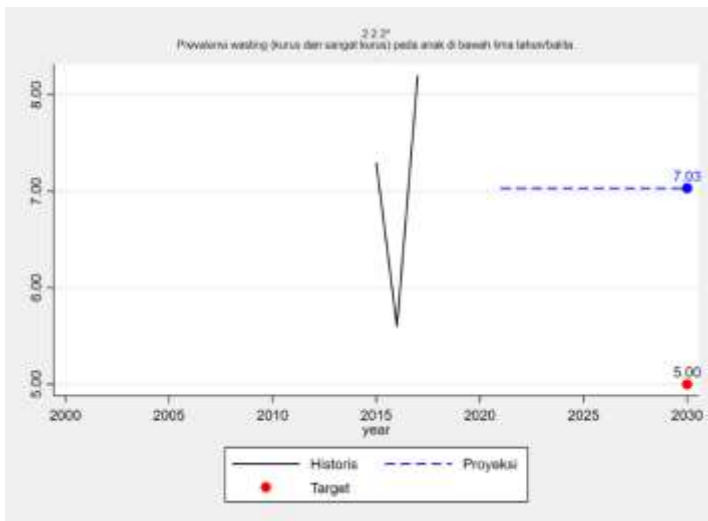
Gambar 4.17 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Gambar 4.17 memperlihatkan bahwa data historis mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Berdasarkan data historis tersebut, maka pada tahun 2030 diproyeksikan akan mencapai angka 32,17%. Angka proyeksi tersebut masih belum sesuai target yang ditetapkan oleh United Nations dan World Health Organization yaitu menurun 40% menjadi 17,76%.

Masih mengenai kekurangan gizi, *scorecard* untuk indikator prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan) Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat adalah C. Tren data historis dari tahun 2013 ke tahun 2018 cenderung menurun (Gambar 4.18). Proyeksi tahun 2030 akan mencapai 11,43% setidaknya 90% mendekati target kuantitatif yaitu di bawah 5 % (United Nations dan World Health Organization).



Gambar 4.18 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)



Gambar 4.19 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita

Berbeda dengan data indikator prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita yang diperoleh dari Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES, memperoleh *scorecard* A. Hasil proyeksi pencapaian Kabupaten Bandung Barat tahun 2030 berada pada angka 7,03% (Gambar 4.19). Angka proyeksi tersebut hampir mencapai target yang ditetapkan oleh United Nations dan World Health Organization, yaitu 5%.

4.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia merupakan Tujuan 3 SDGs. Indikator SDGs yang terpilih sebanyak 5 indikator, dengan 2 indikator yang dianalisis berdasarkan sub indikator tertentu (3.1.2* dan 3.8.2*) sehingga terdapat 7 indikator sesuai yang tertera pada Tabel 4.3. Hasil proyeksi indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik walaupun masih ada 2 indikator yang masih belum mencapai target pada tahun 2030. Hasil proyeksi yang mendapat nilai D adalah indikator proporsi perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi modern dan proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau.

Tabel 4-3 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 3

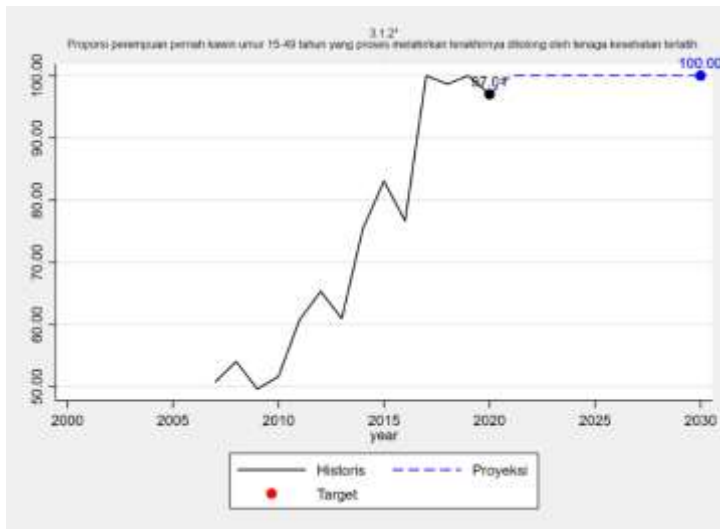
KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	83,06	97,01	100	100	A

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih					
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan di fasilitas kesehatan	78,40	95,96	100	100	A
3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	56,29	45,84	40,10	64,55	D
3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	2,61	7,91	8,43	0	B
3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% total Pengeluaran Rumah Tangga)	1,80 ^b	1,15	2,11	0	A
3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai	0,23 ^b	0,11	0,44	0	A

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga)					
3.a.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	36,63	35,05	34,52	0	D

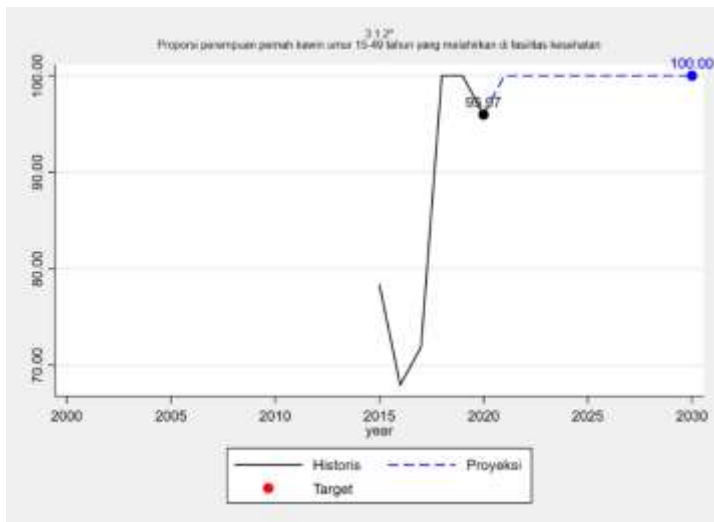
Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b data tahun 2018.

Target 3.1 menentukan bahwa pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 4.20 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Gambar 4.20 menunjukkan grafik pola data untuk indikator proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menunjukkan angka yang berfluktuatif dengan tren yang bersifat positif. Tahun 2019, indikator ini sudah mencapai targetnya yaitu 100% (sesuai target yang ditetapkan oleh United Nations), namun turun kembali di tahun 2020 menjadi 97,01%. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih diproyeksikan akan mencapai 100% pada tahun 2021, sehingga *scorecard* untuk indikator ini memperoleh nilai A.

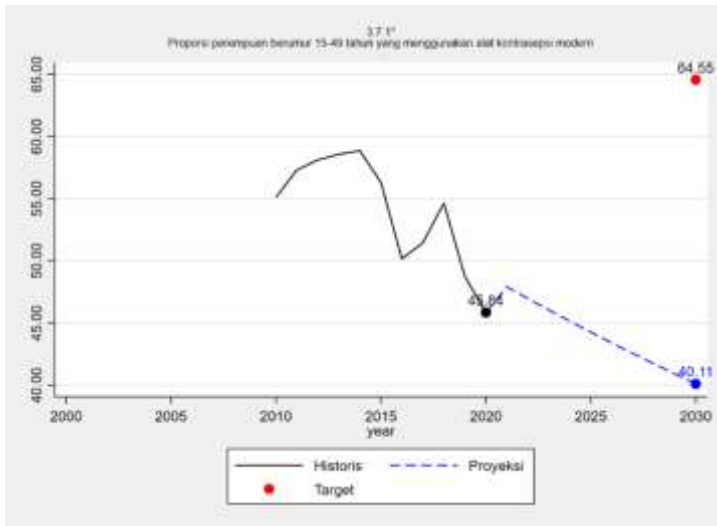


Gambar 4.21 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan

Sebanding dengan indikator sebelumnya, indikator proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan juga menunjukkan pola data yang positif (Gambar

4.21) dan memiliki *scorecard* A. Sempat mencapai 100% pada tahun 2018 dan 2019 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 (76,65%) dan 2020 (95,96%). Hasil proyeksi pencapaian tahun 2030 untuk Kabupaten Bandung Barat berada mencapai angka 100% (sesuai target yang ditetapkan United nations) bahkan diproyeksikan terjadi dari tahun 2021. Proses melahirkan yang dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dari pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan bantuan dari fasilitas kesehatan dapat menurunkan risiko kematian ibu melahirkan.

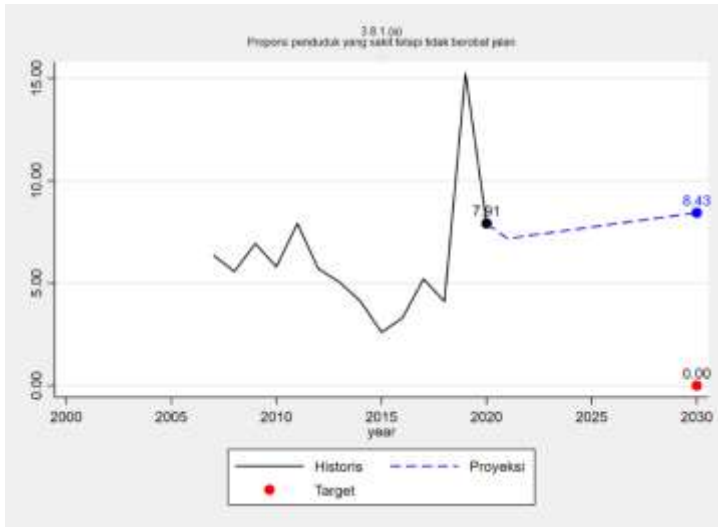
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional merupakan target 3.7. Berdasarkan target tersebut, indikator terpilih untuk Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya akan dibahas adalah proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern (3.7.1*).



Gambar 4.22 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern

Tren data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk indikator proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Hasil proyeksi dari indikator tersebut pada pada tahun 2030 adalah 40,11%, menjauhi target kuantitatif yang tercantum dalam *Roadmap* SDGs Indonesia (Gambar 4.22). Perbandingan hasil proyeksi tersebut dengan target kuantitatif memperoleh *scorecard* D.

Berusaha untuk mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang adalah target 3.8 TPB/SDGs.

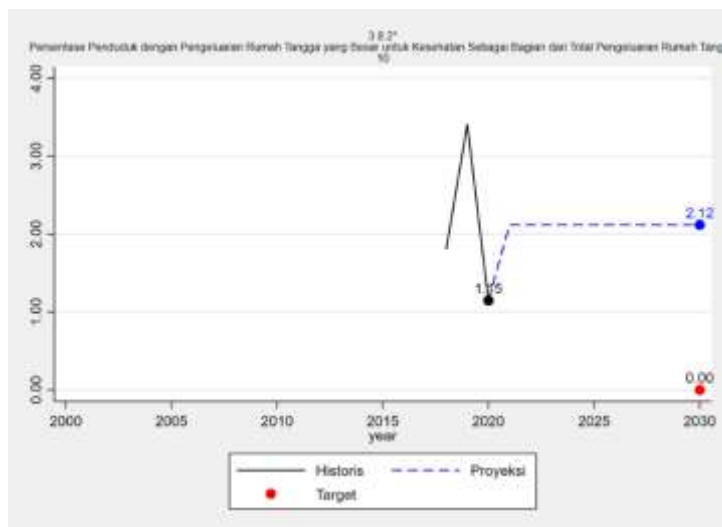


Gambar 4.23 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan

Indikator proporsi penduduk yang sakit tapi tidak berobat jalan dapat menggambarkan penduduk yang seharusnya berobat ketika sakit tetapi memutuskan untuk tidak berobat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut diantaranya adalah tidak memiliki biaya berobat, biaya transportasi, tidak tersedia sarana transportasi, atau disebabkan oleh lamanya waktu tunggu pelayanan yang menyebabkan rasa berat hati untuk melakukan pengobatan.

Apabila dilihat berdasarkan grafik yang diperoleh dari data historis tahun 2001 sampai tahun 2020 untuk indikator proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan, menunjukkan angka yang berfluktuasi namun cenderung meningkat (Gambar 4.23). Pencapaian tahun 2020 berada di angka 7,91%. Sehingga, hasil proyeksi indikator tersebut pada pada tahun 2030 di Kabupaten Bandung Barat adalah 8,43%. Angka hasil proyeksi ini jika dibandingkan dengan target kuantitatif

yang ditetapkan oleh United Nations yaitu 0% (Gambar 4.23), menghasilkan *scorecard* untuk Kabupaten Bandung Barat yaitu B, namun harus menjadi perhatian khusus karena trennya cenderung meningkat dan tidak menuju 0%.

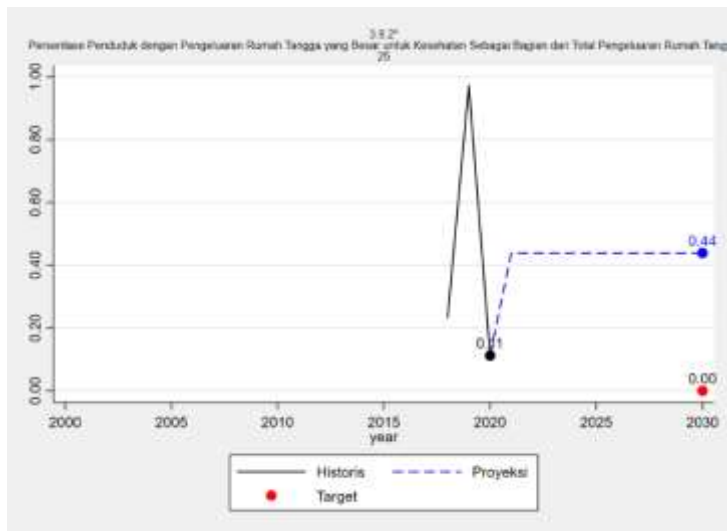


Gambar 4.24 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 10% total pengeluaran rumah tangga)

Indikator persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (lebih dari 10% total pengeluaran rumah tangga) terdiri dari 3 data historis, yaitu 2018, 2019 dan 2020. Persentase mengalami kenaikan pada tahun 2019 namun kembali turun pada tahun 2020 menjadi 1,15%. Berdasarkan data historis ini maka dihasilkan proyeksi pencapaian tahun 2030 untuk Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 2,12 %. Hasil angka proyeksi ini jika dibandingkan dengan

target kuantitatif yaitu 0% sebagaimana ditetapkan oleh tim penyusun, memperoleh *scorecard* A.

Begitu juga dengan persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (lebih dari 25% total pengeluaran rumah tangga), memperoleh *scorecard* A karena proyeksi pencapaian tahun 2030 hampir mencapai target 0% (ditetapkan oleh tim penyusun) yaitu pada angka 0,44% (Gambar 4.25).

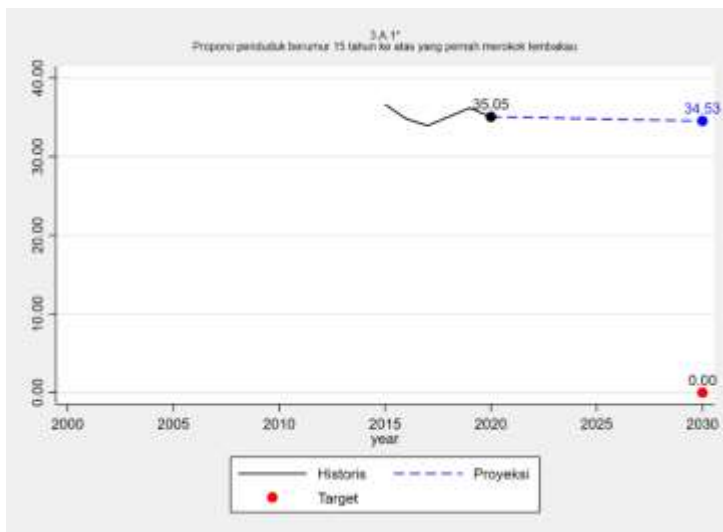


Gambar 4.25 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga)

Target 3.a TPB/SDGs berusaha memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Persentase jumlah perokok yang berusia 15 tahun ke atas merupakan indikator proksi untuk memonitor

pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) World Health Organization (WHO) di Indonesia. Ketika prevalensi penduduk yang merokok tinggi, maka dapat memberikan resiko terhadap kondisi kesehatan dari masyarakat.

Indikator lainnya yang memiliki *scorecard* D pada tujuan 3 di Kabupaten Bandung Barat adalah proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau. Berdasarkan data historis tahun 2015 (36,63%) sampai tahun 2020 (35,05%) tidak menunjukkan penurunan yang signifikan (Gambar 4.26). Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 masih dalam kisaran 34,53% sedangkan target yang ditetapkan oleh OECD adalah 0%.



Gambar 4.26 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau

4.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam studi ini terdapat 12 indikator terpilih, namun beberapa indikator dianalisis berdasarkan sub indikator tertentu (4.1.2* memiliki 3 sub indikator, 4.4.1.(a) memiliki 2 sub indikator, 4.5.1* memiliki 16 sub indikator, dan 4.6.1.(b) memiliki 2 sub indikator) sehingga total indikator untuk tujuan 4 menjadi 31 indikator.

Scorecard tujuan 4 Kabupaten Bandung Barat menunjukkan hasil yang baik karena 15 indikator dari 31 indikator terpilih mencapai atau hampir mencapai target SDGs (A). Terdapat 4 indikator dari 31 indikator terpilih mendekati target SDGs dengan nilai B, 7 indikator masih seperempat jalan menuju target TPB/SDGs, 3 indikator kurang dari seperempat jalan menuju target SDGs atau nilai D, dan 2 indikator masih cukup jauh mencapai target TPB/SDGs sehingga memerlukan perhatian khusus yaitu rasio kuintil APK PT dan rasio kuintil APM PT.

Tabel 4-4 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 4

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030^a	TARGET	NILAI
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	108.58	104.54	106.27	100	A
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	93.18	90.99	100.80	100	A
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat	58.30	66.99	142.61	100	A
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	7.81	- ^b	9.87	12	C
4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	88.91	96.10	100	100	A
4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	33.33	61.83	81.36	100	C
4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	66.94	84.26	100	100	A
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	89.48	98.55	100	100	A

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.38	- ^b	86.58	100	C
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	9.72	16.17	22.79	42.08	D
4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	35.03	91.73	100	100	A
4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	16.93	69.75	100	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	84.80	141.70	94.29	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	- ^b	75.00	16.18	100	E

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030^a	TARGET	NILAI
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	98.65	98.05	100.23	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	108.62	101.84	104.90	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ Sederajat untuk perempuan/ laki-laki	121.84	119.19	114.05	100	C
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	66.53	105.72	55.56	100	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	94.11	112.62	105.15	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	75.25	78.06	77.77	100	C

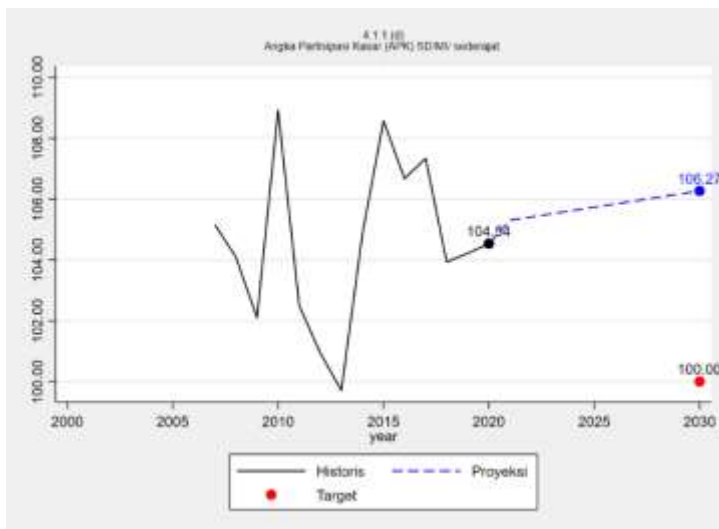
KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	134.02	208.34	107.27	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/ teratas	- ^b	43.48	15.40	100	E
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	107.04	98.08	101.16	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/ teratas	100.70	98.44	100.27	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	94.41	119.23	113.44	100	C

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	65.07	72.24	52.88	100	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	97.50	104.67	106.40	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	77.95	74.19	80.12	100	C
4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/ lainnya	98.90	99.66	100	100	A
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	99.91	99.91	100	100	A
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100	100	100	100	A

Catatan: ^aHasil Analisis Proyeksi. ^bData tidak tersedia pada tahun tersebut

Target 4.1 TPB/SDGs menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Indikator yang dianalisis diantaranya angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan.

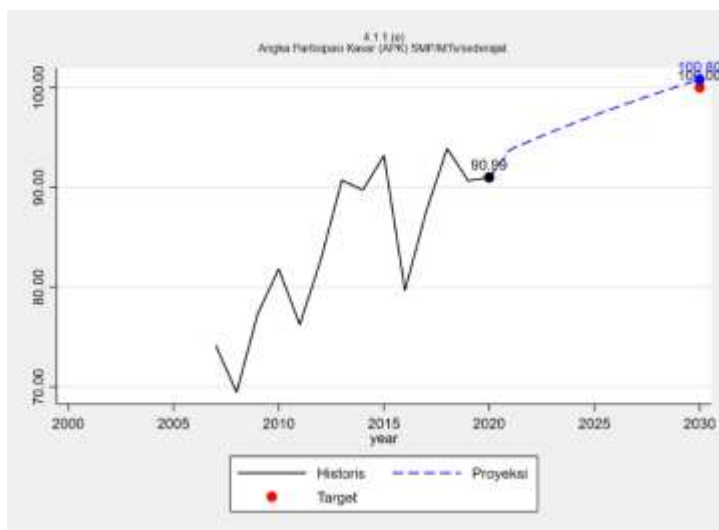
APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tanpa memperhitungkan kesesuaian umur. Dengan menghitung APK dapat diketahui banyaknya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.



Gambar 4.27 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SD/MI/ sederajat

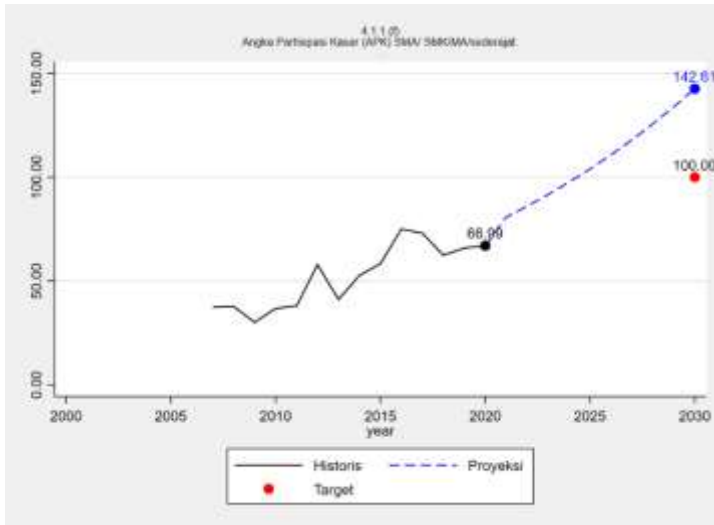
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat Kabupaten Bandung Barat memiliki data dari tahun 2007 (105,16%) hingga 2020 (104,53%). Plot data historis indikator tersebut berfluktuasi dan cenderung meningkat (Gambar 4.27). Hasil proyeksi untuk pencapaian pada tahun 2030 adalah 106,27%. Hasil proyeksi ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan target kuantitatif yaitu 100% yang ditetapkan oleh United Nations. Maka, perolehan *scorecard* untuk Kabupaten Bandung Barat adalah A.

Begitu juga dengan indikator APK SMP/MTs/ sederajat, tren data historis dari tahun 2007 (74,17%) sampai tahun 2020 (90,99%) cenderung meningkat (Gambar 4.28). Target yang ditetapkan oleh United Nations yaitu 100% diprediksikan akan tercapai pada tahun 2029 dengan angka pencapaian 100,13%, sehingga *scorecard* untuk indikator tersebut di Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai A.



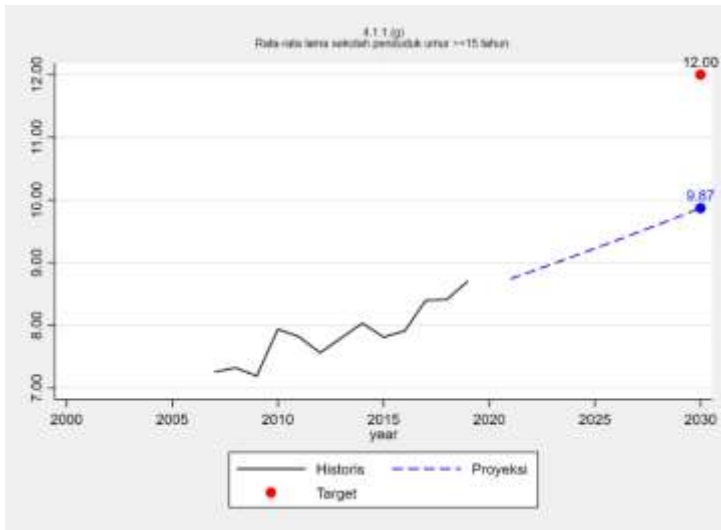
Gambar 4.28 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMP/MTS/ sederajat

Scorecard A diperoleh juga untuk indikator APK SMA/MA/ sederajat karena proyeksi pencapaian target 100% (United Nations) akan terjadi dari tahun 2025 (103,96%). Tren data historis yang dimiliki dari tahun 2007 hingga 2020 cenderung meningkat seperti yang terlihat pada Gambar 4.29.



Gambar 4.29 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMA/SMK/Sederajat

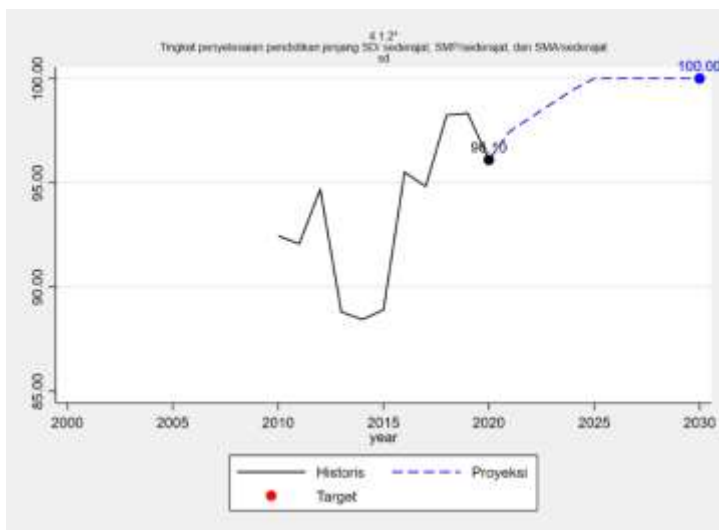
Selanjutnya indikator rata-rata lama sekolah (RLS) yang merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan SD diperhitungkan memiliki lama sekolah 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SMA 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Gambar 4.30 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun keatas

Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan mencapai 9,87 tahun pada 2030 (*scorecard C*). Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP dan belum mencapai target yang ditentukan oleh tim penyusun yaitu 12 tahun. Data historis berasal dari tahun 2007 (7,25) sampai tahun 2019 (8,70) cenderung meningkat (Gambar 4.30).

Tingkat penyelesaian pendidikan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan kualitas penduduk yang semakin baik.

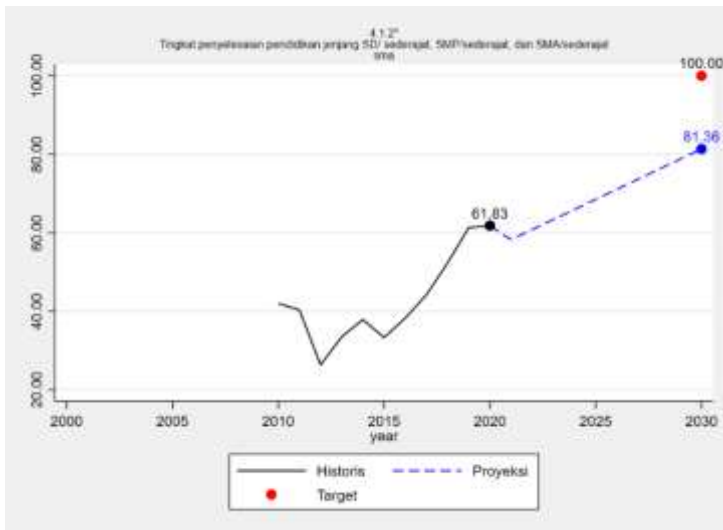


Gambar 4.31 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat

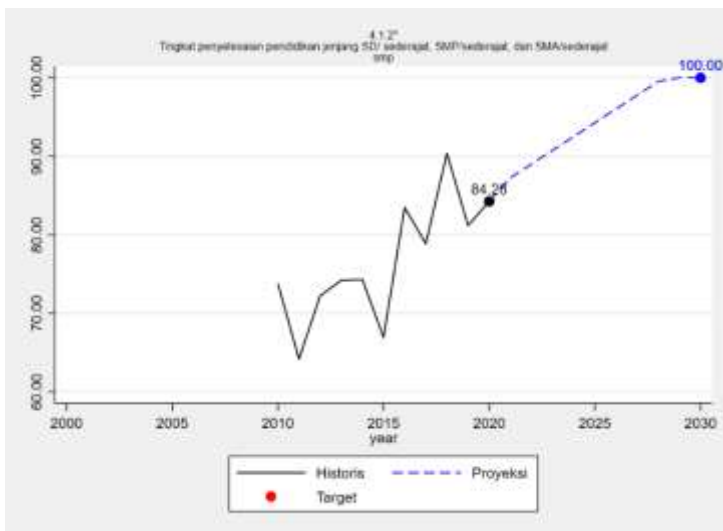
Data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk indikator tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/Sederajat (Gambar 4.31), menunjukkan pola yang berfluktuasi namun secara umum mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2015 dan tahun 2020 (96,10%). Target menurut Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II adalah 100%, diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2025, sehingga kesesuaian antara hasil proyeksi dengan target TPB/SDGs membuat indikator tersebut memperoleh nilai A.

Berbeda dengan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat, memperoleh nilai C karena proyeksi pencapaian tahun 2030 mencapai 81,36% dari target 100% (Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II). Data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (61,83%) cenderung meningkat namun belum

cukup untuk mencapai target yang seharusnya (Gambar 4.32).



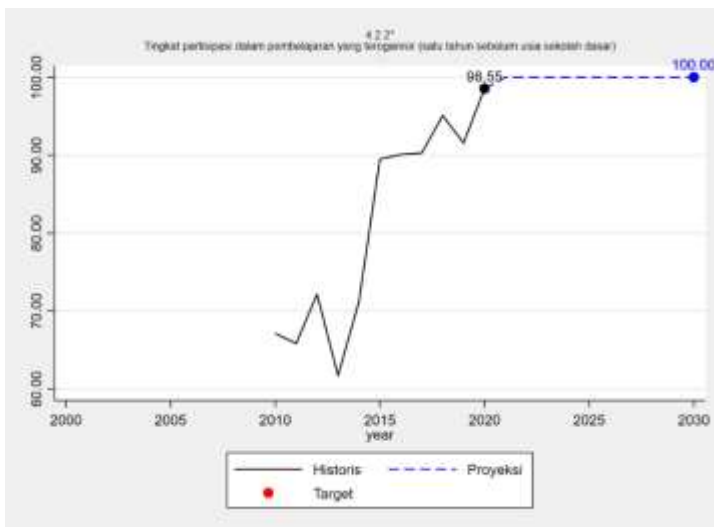
Gambar 4.32 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat



Gambar 4.33 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat

Sama halnya dengan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat Kabupaten Bandung Barat juga mendapatkan *scorecard* A dengan proyeksi pencapaian tahun 2030 sebesar 100% sesuai dengan target kuantitatif dalam Metadata SDGs Indonesia edisi II. Tren data historis dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan kenaikan yang cukup untuk dapat mencapai target (Gambar 4.33).

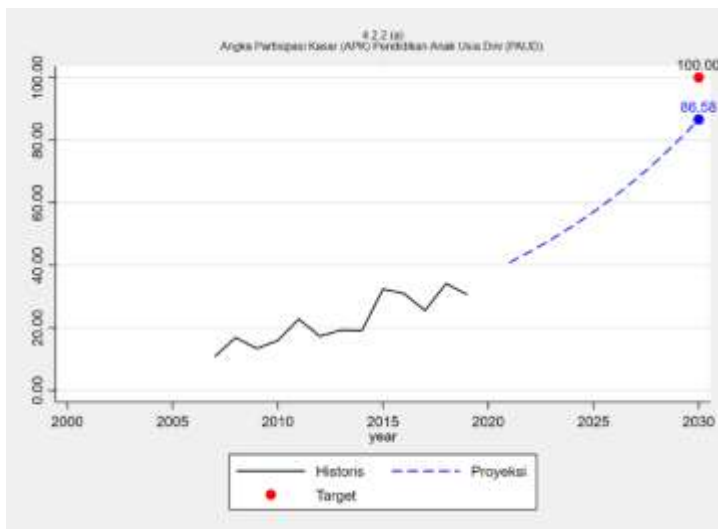
Target 4.2 menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Indikator yang dianalisis adalah tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD).



Gambar 4.34 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir

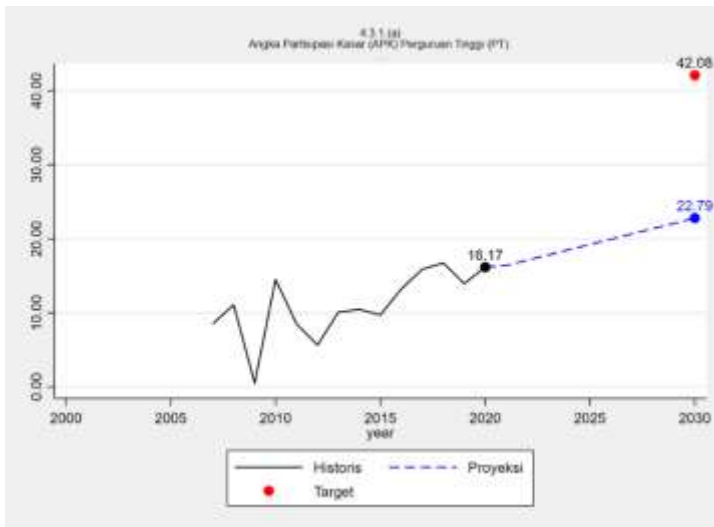
Data historis tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir dari tahun 2010 sampai tahun 2020 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tren yang cenderung meningkat cukup signifikan (Gambar 4.34). Pencapaian tahun 2020 berada di angka 98,55% di mana angka tersebut sudah mendekati target 2030 (100%). Ketika data historis untuk Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan sampai tahun 2030, maka diperoleh angka 100% sesuai dengan target yang tercantum di dalam Metadata SDGs Indonesia Edisi II, bahkan diproyeksikan tercapai dari tahun 2021, sehingga memperoleh nilai A.

Gambar 4.35 memperlihatkan data historis APK PAUD dari tahun 2007 hingga 2019, data membentuk pola yang berfluktuasi dengan tren yang cenderung meningkat namun tidak cukup untuk mencapai target tahun 2030. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 sebesar 86,58%. Angka tersebut belum cukup mendekati target yang ditetapkan United Nations yaitu 100%, sehingga, diperoleh nilai C.



Gambar 4.35 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

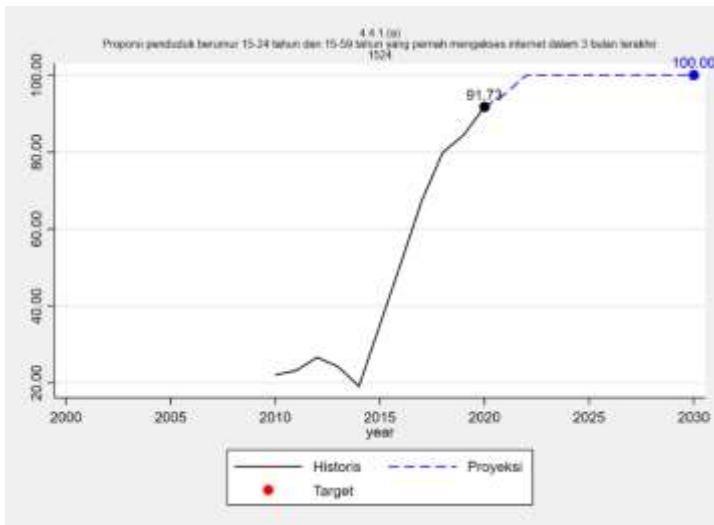
Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas merupakan target 4.3, yang dianalisis melalui indikator angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT).



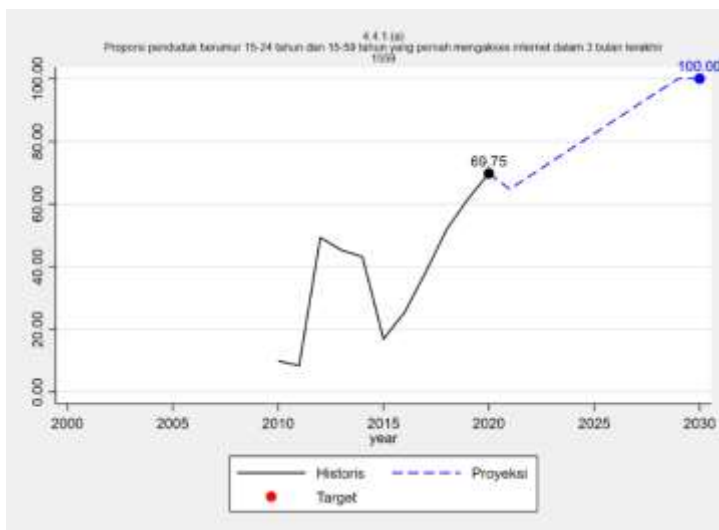
Gambar 4.36 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Gambar 4.36 menunjukkan data historis untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dari tahun 2007 sampai tahun 2020 (16,17%). Pola data historis tersebut cenderung meningkat namun belum cukup mencapai target 2030. Pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 22,79%. Apabila hasil proyeksi dibandingkan dengan target kuantitatif yang telah ditentukan oleh tim penyusun yaitu 42,08% (meningkat dua kali lipat dari tahun 2015), maka Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai D.

Selanjutnya adalah target 4.4, pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Indikator yang digunakan adalah proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.



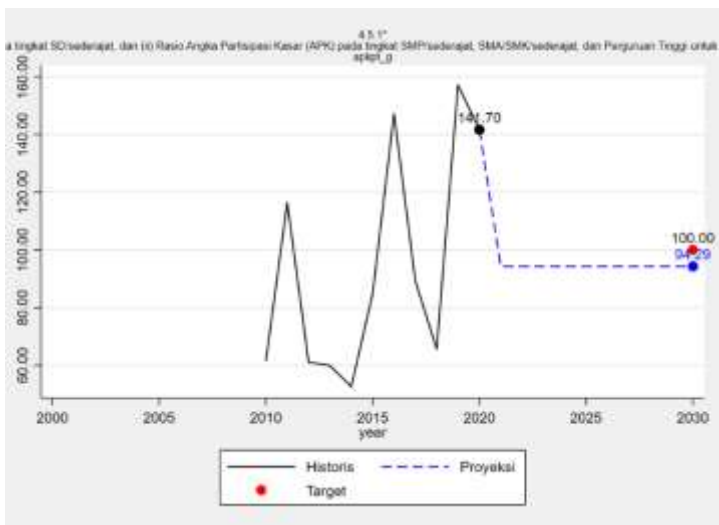
Gambar 4.37 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir



Gambar 4.38 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir

Data proporsi individu yang menggunakan internet memiliki manfaat untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital. Secara umum grafik data historis dari tahun 2010 sampai 2020 untuk indikator proporsi penduduk berumur 15-24 dan 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir memiliki tren yang bersifat positif (Gambar 4.37 dan Gambar 4.38). Meskipun data terakhir tahun 2020 untuk usia 15-59 tahun angkanya lebih rendah (69,75%) dibandingkan dengan umur 15-24 tahun (91,73%) namun keduanya diproyeksikan akan mencapai target yang ditetapkan oleh tim penyusun 100% pada tahun 2030. Oleh karena itu, indikator proporsi penduduk yang menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir memperoleh nilai A baik untuk subindikator 15-24 tahun maupun 15-59 tahun.

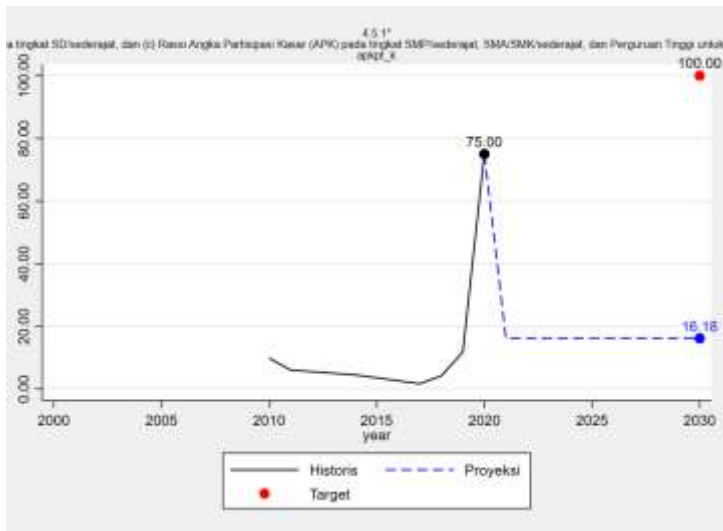
Target 4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Terdapat satu indikator (dengan 16 sub-indikator) yang dianalisis yaitu rasio angka partisipasi kasar (APK) dan murni (APM) pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK, serta perguruan tinggi atau sederajat yang di disagregasi berdasarkan jenis kelamin dan kuintil terbawah/teratas.



Gambar 4.39 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki

Rasio APK PT untuk perempuan/laki-laki dapat kita lihat pada Gambar 4.39, data dari tahun 2010 sampai dengan 2020 berfluktuasi namun dengan kecenderungan datar (Gambar 4.39). Meskipun telah mencapai 157,16% pada tahun 2019 dan 141,70% pada tahun 2020, hasil proyeksi tahun 2030 belum mencapai target 100% (United

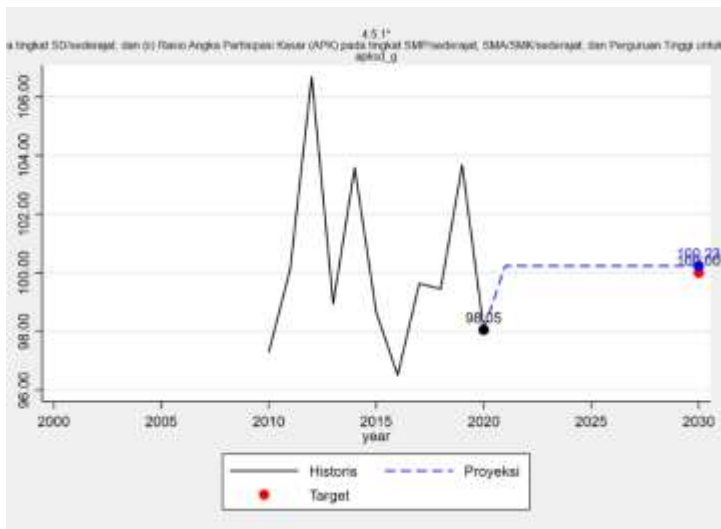
Nations) karena hanya mencapai 94,29%. Oleh karena itu, *scorecard* APK PT untuk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat adalah B. Masih relatif timpang antara laki-laki dengan partisipasi perempuan.



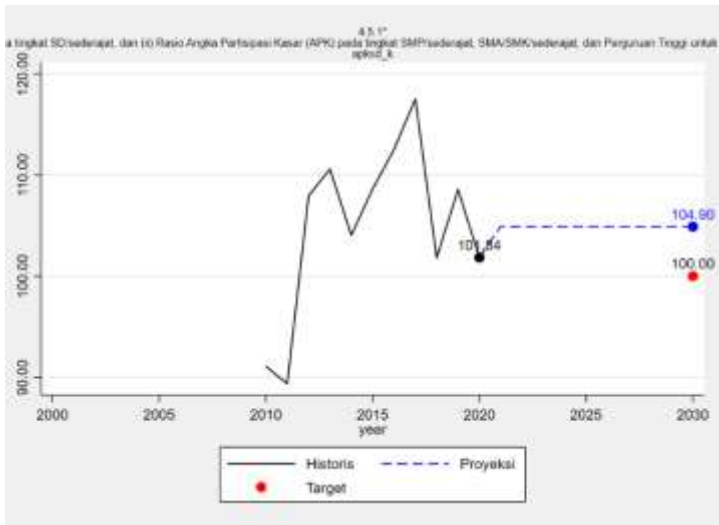
Gambar 4.40 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas

Rasio APK PT yang di disagregasi berdasarkan kuintil teratas dan terbawah memiliki tren data historis cenderung datar (Gambar 4.40). Data terakhir tahun 2020 adalah 75% dan hasil proyeksi Kabupaten Bandung Barat hanya mencapai angka 16,17%. Proyeksi tersebut menjauhi target yang ditetapkan United Nations yaitu 100%. Masih terdapat ketimpangan antara kuintil terbawah dan teratas, kuintil teratas partisipasinya sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kuintil terbawah. Hal ini membuat Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai E.

Data historis Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2020 berfluktuasi dan selalu berada di atas 96%. Gambar 0.41 memperlihatkan grafik data historis indikator rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ Sederajat antara perempuan dan laki-laki dengan data terakhir di tahun 2020 mencapai angka 98,05%. Proyeksi pencapaian dari indikator tersebut pada tahun 2030 melampaui target United Nations (100%) yaitu 100,23% sehingga memperoleh nilai A.



Gambar 4.41 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki

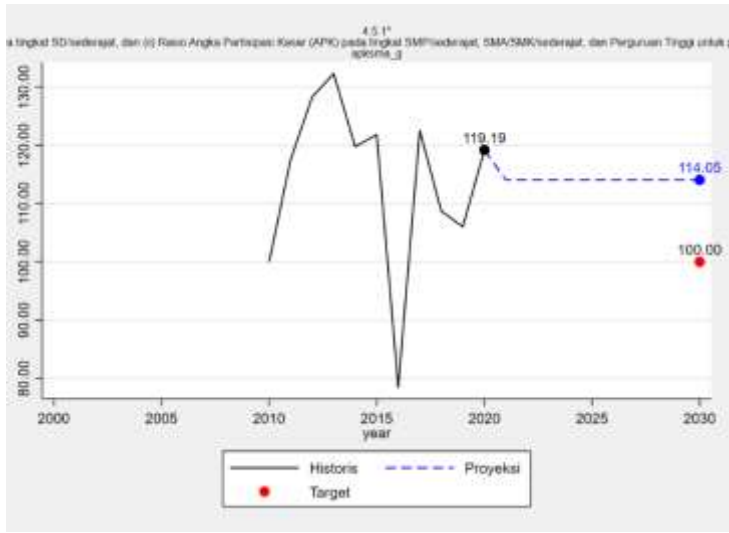


Gambar 4.42 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/serata untuk kuintil terbawah/teratas

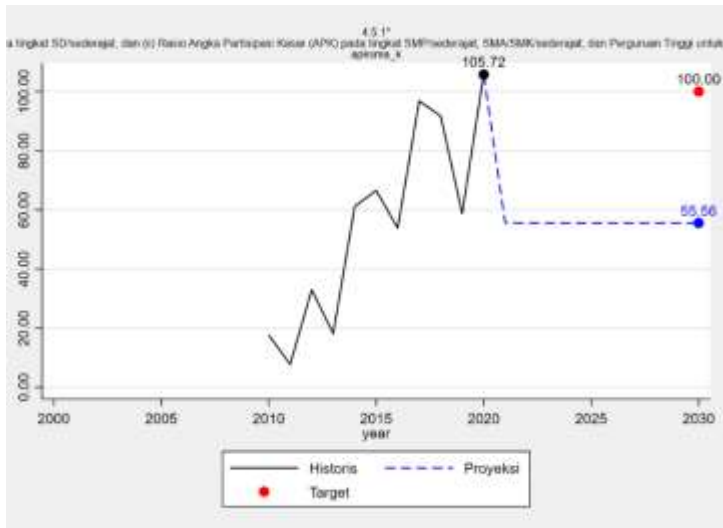
Gambar 4.42 menunjukkan tren data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (101,84%) untuk indikator rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/serata antara penduduk kuintil terbawah dan kuintil teratas memiliki nilai yang fluktuatif dan cenderung datar. Berdasarkan data historis tersebut, proyeksi angka pencapaian pada tahun 2030 adalah 104,9%, mendekati target kuantitatif yang ditentukan oleh United Nations yaitu 100%, sehingga nilainya A.

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/serata antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai C karena proyeksi pencapaian tahun 2030 adalah 114,05% sedangkan target yang ditetapkan oleh United Nations adalah 100%. Artinya, partisipasi perempuan tingkat SMA/serata di Kabupaten

Bandung Barat masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tren data historis dari tahun 2010 sampai 2020 berfluktuatif dan cenderung datar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.43.

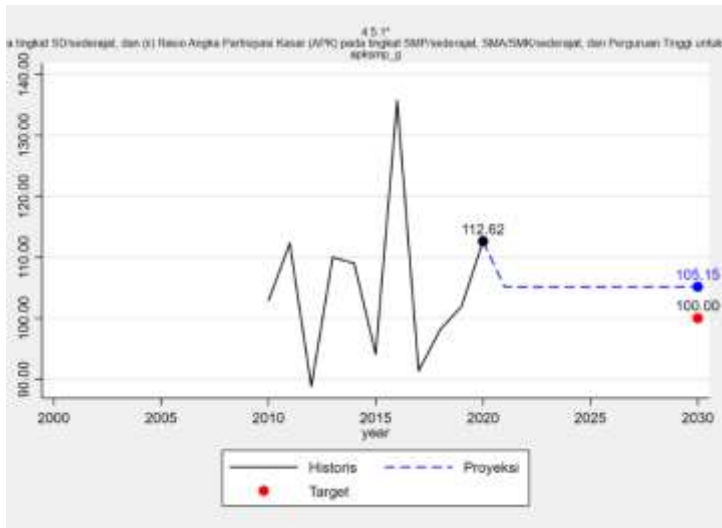


Gambar 4.43 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki



Gambar 4.44 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

Gambar 4.44 menunjukkan data historis Rasio APK tingkat SMA/ sederajat antara kuintil terbawah dan kuintil teratas dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (105,72%) yang cenderung naik namun ketika diproyeksikan cenderung mendatar sehingga menghasilkan angka proyeksi 55,56%. Hasil proyeksi tersebut masih sangat jauh dari target kuantitatif yang ditentukan oleh United Nations yaitu 100%, maka perolehan nilainya adalah D. Dengan kata lain, pada tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum dapat menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ Sederajat antara penduduk kuintil terbawah dan kuintil teratas, kondisinya masih akan lebih tinggi kuintil teratas dibandingkan kuintil terbawah.

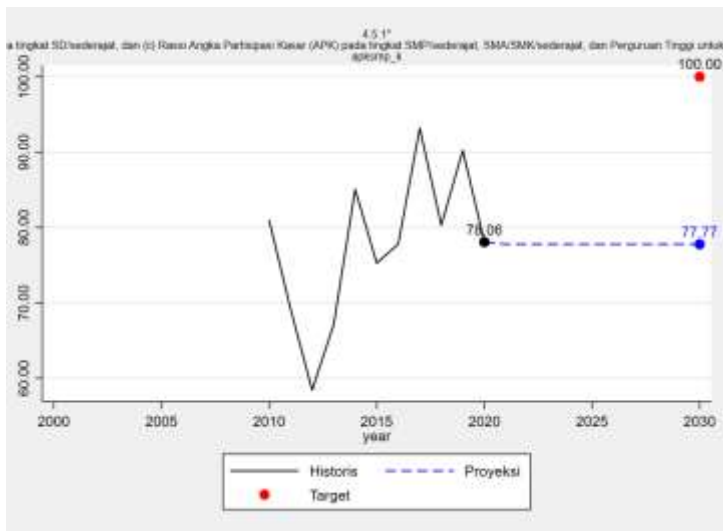


Gambar 4.45 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, untuk perempuan/ laki-laki

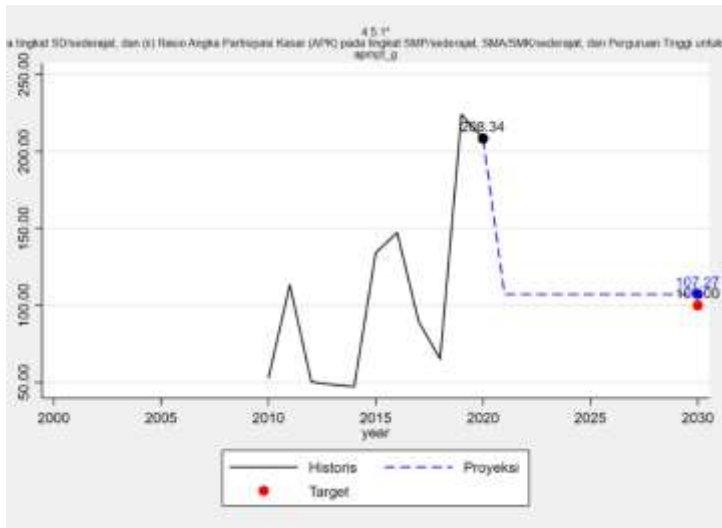
Untuk rasio APK SMP/ sederajat antara perempuan dan laki-laki ditunjukkan Gambar 4.45. Data historis tersebut memiliki angka yang berfluktuatif dengan tren yang cenderung datar. Pada tahun 2020, rasio mencapai 112,62% dan hasil proyeksi tahun 2030 mencapai angka 105,15%. Jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang telah ditentukan oleh United Nations yaitu 100%, maka perolehan nilainya adalah B. Pada tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan sudah hampir bisa menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ Sederajat antara perempuan dan laki-laki, meskipun tingkat partisipasi perempuan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Pola data yang sama terjadi untuk rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ Sederajat antara kuintil terbawah dan kuintil teratas

(Gambar 4.46). Tren terlihat meningkat namun hasil proyeksi cenderung menunjukkan pola mendatar, sehingga hasil proyeksi hanya mencapai 77,77%. Hasil proyeksi tersebut dibandingkan dengan target SDGs yang telah ditentukan oleh United Nations yaitu 100%, indikator ini memperoleh nilai C. Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum dapat menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat antara penduduk yang berada di kuintil terbawah dan kuintil teratas (lebih tinggi partisipasi kuintil teratas dibandingkan kuintil terbawah).

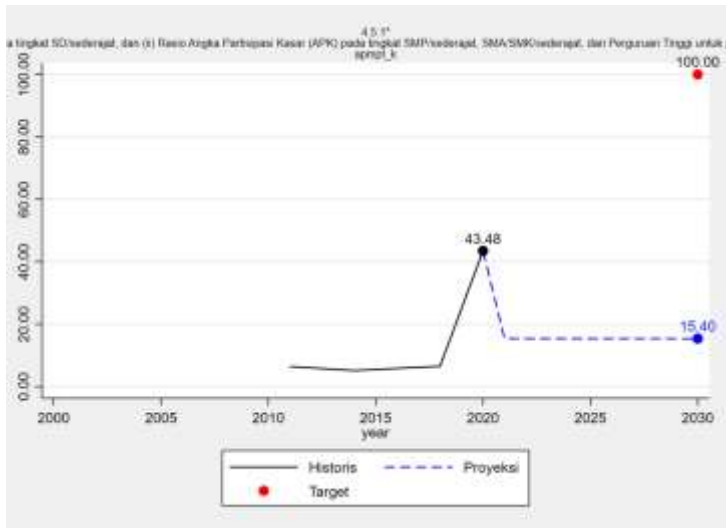


Gambar 4.46 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas



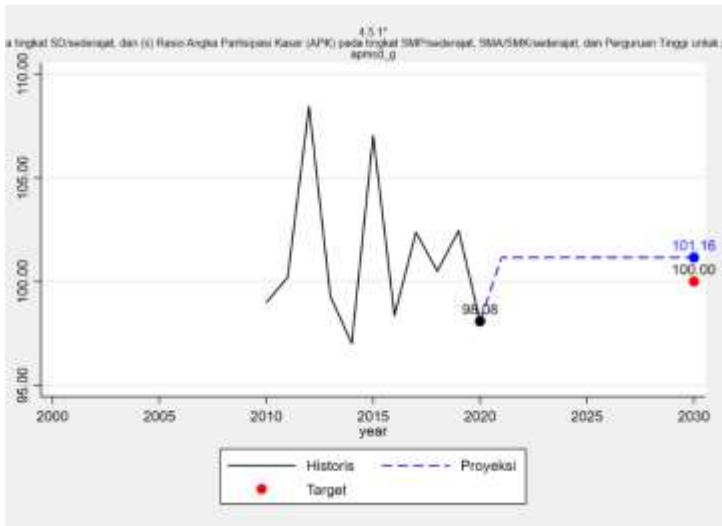
Gambar 4.47 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki

Gambar 0.47 menggambarkan tren data historis tahun 2010 sampai tahun 2020 (208,28%) untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi antara perempuan dan laki-laki. Grafik tersebut menunjukkan data yang berfluktuasi, dengan hasil proyeksi untuk pencapaian dari indikator tersebut pada tahun 2030 adalah 107,27%. Angka hasil proyeksi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditentukan oleh United Nations yaitu 100%. Maka, perolehan nilai untuk Kabupaten Bandung Barat adalah B. Dengan kata lain, pada tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan sudah hampir bisa menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi antara perempuan dan laki-laki (partisipasi perempuan sedikit masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki).



Gambar 4.48 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi antara penduduk kuintil terbawah dan kuintil teratas menggunakan data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (47,58%). Hasil proyeksi data historis tersebut adalah 15,40% (Gambar 4.48). Angka tersebut jauh dari target yang ditentukan oleh United Nations, maka memperoleh nilai E. Pada tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum berhasil menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi antara penduduk yang berada di kuintil terbawah dan kuintil teratas, partisipasi kuintil teratas jauh lebih tinggi dibandingkan kuintil terbawah.

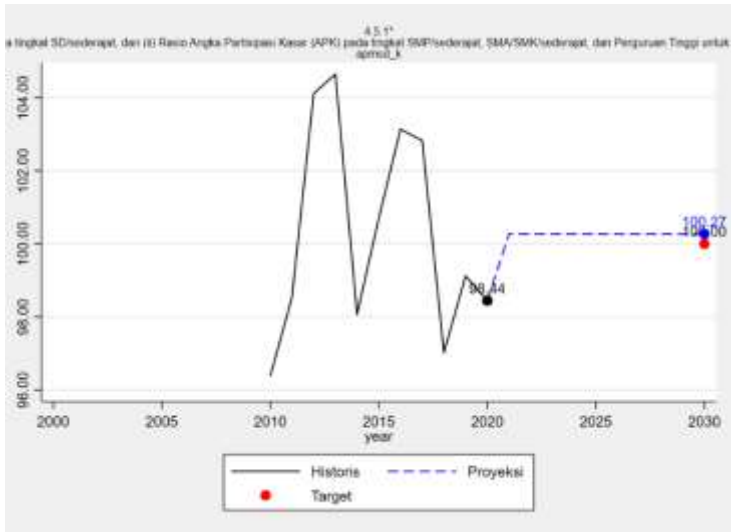


Gambar 4.49 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/serajat untuk perempuan/ laki-laki

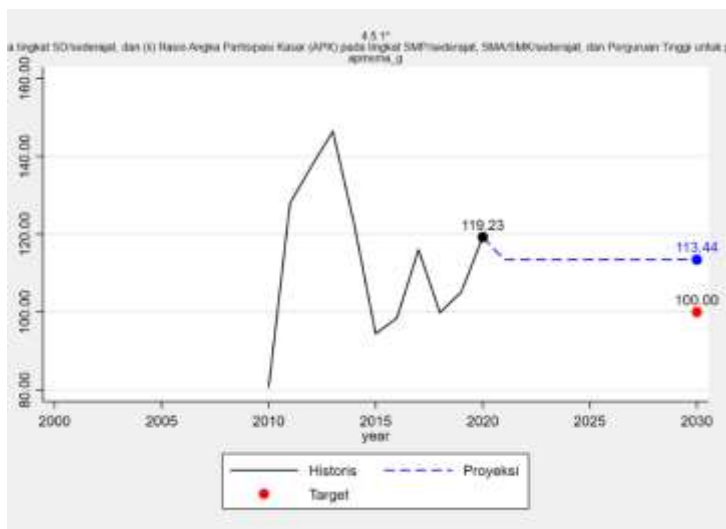
Gambar 0.49 menampilkan data historis dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (98,08%) untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/serajat antara perempuan dan laki-laki. Pola pada data historis tersebut secara umum cenderung mendatar walaupun angkanya sangat fluktuatif. Sehingga, data historis tersebut menghasilkan angka proyeksi pada tahun 2030 sebesar 101,16%. Hasil proyeksi tersebut sudah hampir mencapai target kuantitatif yang telah ditentukan oleh United Nations yaitu 100%. Maka, perolehan nilai untuk Kabupaten Bandung Barat adalah A.

Berdasarkan grafik yang diperoleh dari data historis tahun 2010 sampai tahun 2020 (98,44%) untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/Sederajat antara penduduk kuintil terbawah dan kuintil teratas, menunjukkan angka yang sangat fluktuatif dengan

tren yang secara umum mendarat (Gambar 4.50). Hasil proyeksi untuk pencapaian dari indikator tersebut pada tahun 2030 di Kabupaten Bandung Barat adalah 100,27%. Hasil proyeksi tersebut jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditetapkan oleh United Nations yaitu 100% memperoleh nilai A.

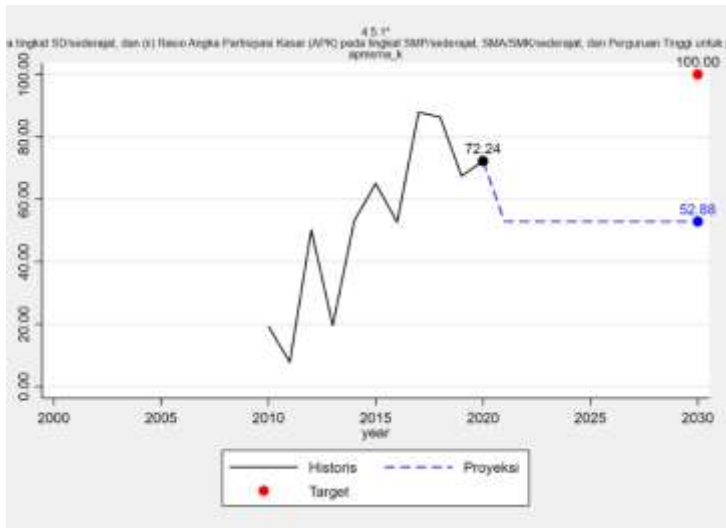


Gambar 4.50 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas



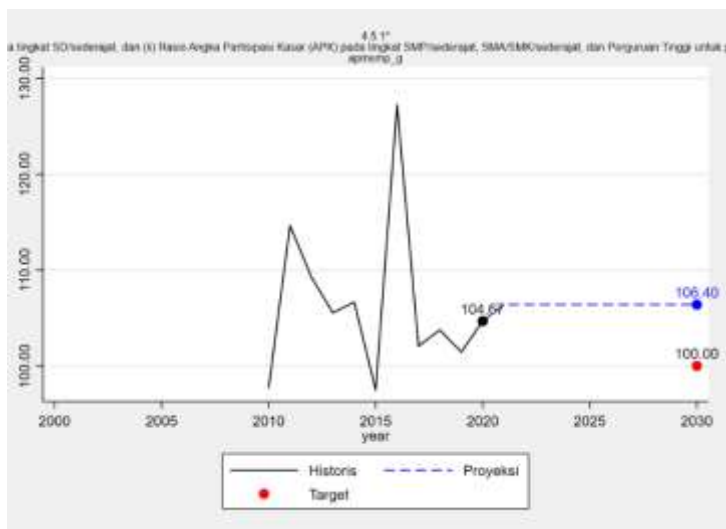
Gambar 4.51 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki

Gambar 4.51 memperlihatkan data historis yang diperoleh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (119,23%) untuk indikator rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/Sederajat antara perempuan dan laki-laki. Data historis tersebut, memiliki angka yang sangat fluktuatif namun mendatar. Diproyeksikan pada tahun 2030 akan mencapai 113,44%. Apabila hasil pencapaian tersebut dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditentukan oleh United Nations yaitu 100%, maka perolehan nilai *scorecard* adalah C. Pada tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan sudah 75% bisa menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/Sederajat antara perempuan dan laki-laki, namun masih lebih tinggi partisipasi laki-laki.



Gambar 4.52 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

Gambar 4.52 memperlihatkan tren data historis Rasio APM SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (72,24%). Grafik tersebut menunjukkan bahwa tren data berfluktuasi dengan hasil proyeksi mendatar seperti pada gambar. Tahun 2030 rasio APM SMA/SMK/ sederajat di Kabupaten Bandung Barat mencapai 52,88%. Apabila membandingkan hasil proyeksi dengan target SDGs yang ditentukan oleh United Nations yaitu 100%, maka memperoleh nilai D. Kesimpulannya, tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum bisa menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan SMA/SMK/ Sederajat antara penduduk yang berada di kuintil terbawah dan kuintil teratas (masih akan lebih tinggi partisipasi kuintil teratas).

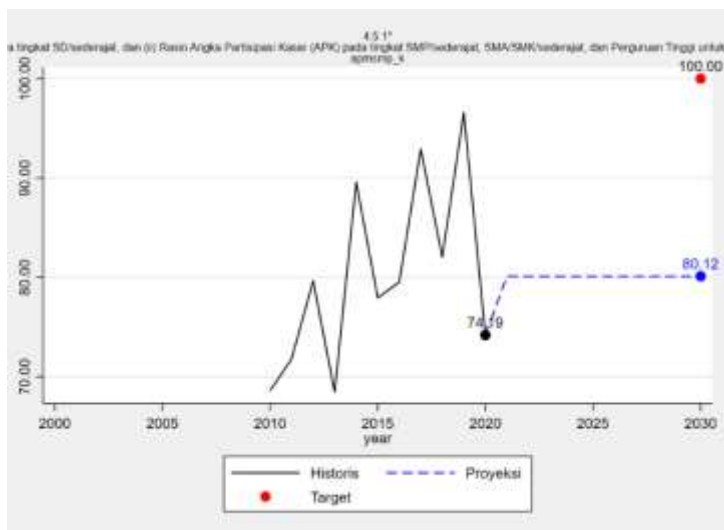


Gambar 4.53 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki

Rasio APM SMP/ sederajat diproyeksikan akan mencapai angka 106,40% pada tahun 2030. Dengan target yang ditentukan oleh United Nations adalah 100%, proyeksi tersebut sudah mendekati target, sehingga *scorecard* indikator ini adalah B. Seperti grafik APK dan APM lainnya, tren data dari tahun 2010 hingga 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan mendatar. Pada tahun 2020, pencapaian Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 104,67%. Partisipasi murni SMP/ sederajat perempuan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Terakhir, data historis untuk rasio APM tingkat SMP/ sederajat ditunjukkan pada Gambar 4.54 dengan tren yang sama yaitu berfluktuasi dengan kecenderungan proyeksi mendatar. Tahun 2020 mencapai 74,19% dan hasil proyeksi tahun 2030 akan mencapai

80,11%. Hasil proyeksi tersebut sudah menuju target SDGs yang telah ditentukan oleh United Nations yaitu 100% namun belum cukup sehingga mendapatkan nilai C. Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum dapat menghilangkan ketimpangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat pendidikan SMP/Sederajat antara penduduk yang berada di kuintil terbawah dan kuintil teratas (kuintil terbawah lebih tinggi partisipasinya dibandingkan kuintil terbawah).

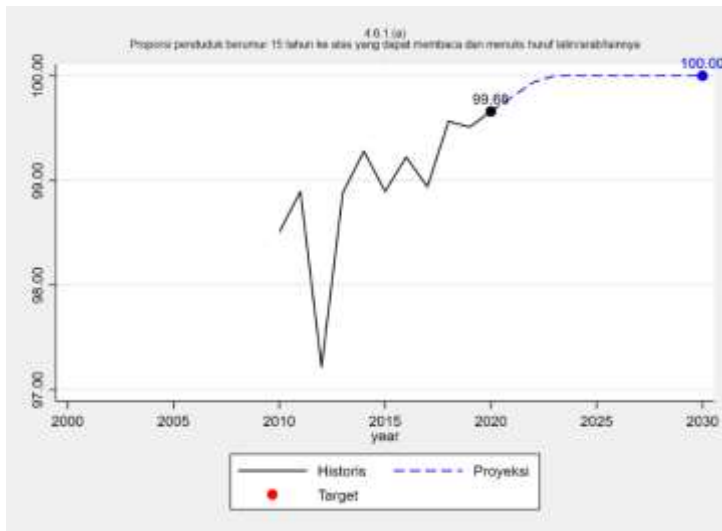


Gambar 4.54 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

Target 4.6 menginginkan tahun 2030 dapat menjamin semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang dianalisis dengan indikator terpilih proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf

latin/arab/lainnya dan indikator persentase angka melek aksara penduduk (15-24 tahun dan 15-59 tahun).

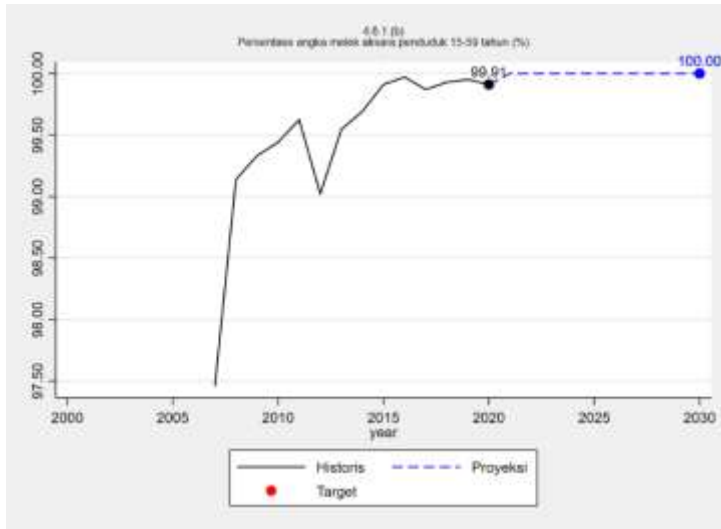
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Pencapaian indikator persentase melek aksara di Kabupaten Bandung Barat sudah sangat baik (mencapai target yang ditentukan pada tahun 2030). Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 4.55, 4.56, dan 4.57.



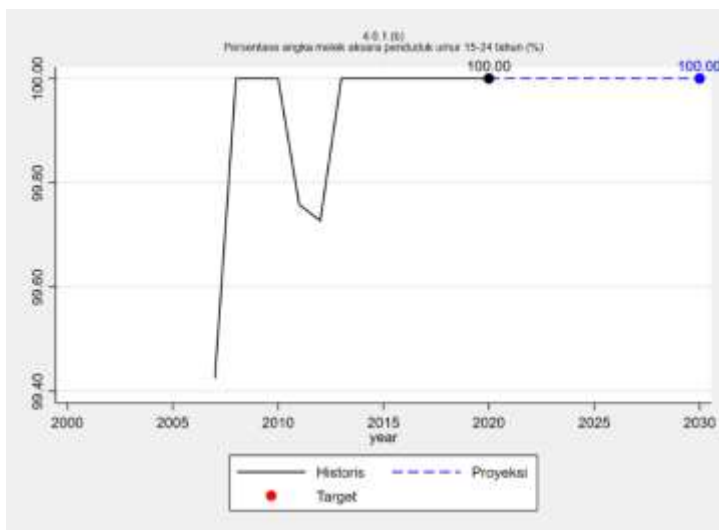
Gambar 4.55 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya

Data historis proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya dimulai dari tahun 2010 hingga 2020. Dengan tren data yang cenderung meningkat (Gambar 4.55), membuat proyeksi pencapaian pada tahun 2030 mencapai target

100% (Metadata SDGs Indonesia Edisi II), bahkan akan terjadi dari tahun 2023. Perolehan nilai indikator ini di Kabupaten Bandung Barat adalah A. Pada tahun 2030 diproyeksikan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat sudah dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya.



Gambar 4.56 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya



Gambar 4.57 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya

Gambar 4.56 dan 4.57 menunjukkan tren data historis untuk indikator persentase angka melek aksara penduduk berumur 15-59 dan 15-24 tahun yang diperoleh dari tahun 2007 sampai 2020 dengan pola meningkat. Untuk disagregasi umur 15-24 tahun, sudah mencapai target 100% sejak tahun 2013, sedangkan untuk umur 15-59 tahun diproyeksikan mencapai target 100% pada tahun 2021. Kedua indikator tersebut memperoleh nilai A karena pada tahun 2030 dapat mencapai target 100% yang ditetapkan oleh United Nations. Tahun 2030 penduduk umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun di Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya.

4.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, yang selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam menciptakan pembangunan manusia yang merata. Target yang akan dianalisis adalah target 5.3, 5.5, dan 5.b dengan 3 indikator pilihan (indikator 5.3.1* dianalisis berdasarkan 2 kelompok umur) yang tercantum pada tabel di bawah ini (Tabel 4.5). Dari 3 indikator terpilih hanya 1 indikator yang sudah mendekati target yaitu proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun. Sedangkan, 3 indikator lainnya masih jauh dari target, terutama proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Hal ini dikarenakan nilai untuk indikator proporsi perempuan yang berada di posisi managerial memperoleh nilai E, indikator proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir dan proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun mendapatkan nilai C.

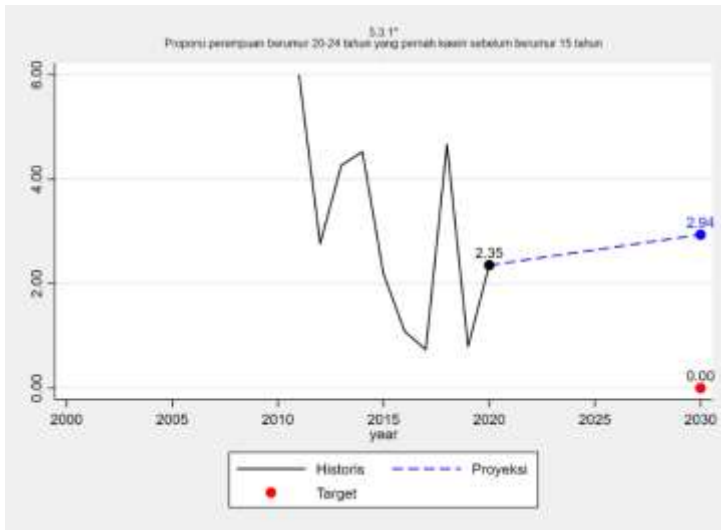
Tabel 4-5 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 5

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	2.18	2.35	2.94	0.00	B

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	22.37	19.12	19.57	0.00	C
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	9.28 ^c	21.84	18.52	50	E
5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	55.10	56.63	86.05	100	C

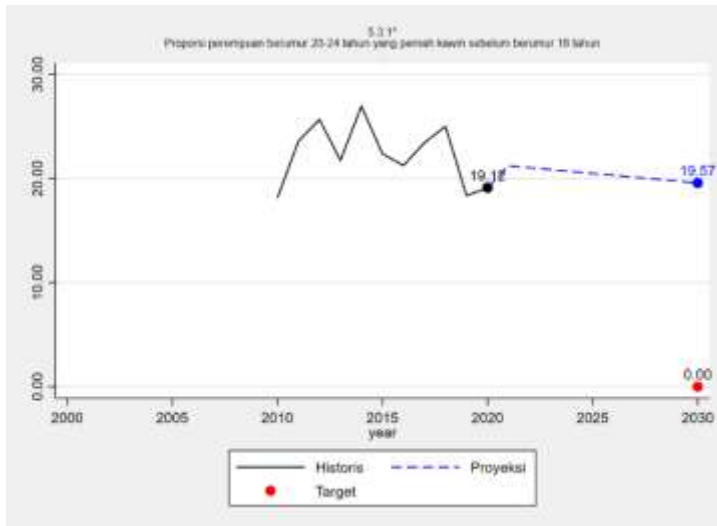
Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b tidak ada data pada tahun tersebut. ^c data tahun 2017

Target 5.3 berusaha menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Melalui target tersebut terdapat 1 indikator (2 sub indikator) yang hasil proyeksinya akan dijelaskan di bawah ini.



Gambar 4.58 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun

Pola data historis yang diperoleh dari tahun 2011 sampai tahun 2020 untuk indikator proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun, menunjukkan data yang berfluktuasi dan sedikit meningkat hingga hasil proyeksi tahun 2030 menghasilkan angka 2,94% (Gambar 4.58) dari 2,35% pada tahun 2020. Pencapaian tersebut mendekati target kuantitatif yaitu 0% yang ditetapkan oleh United Nations, sehingga *scorecard* indikator ini B. Kabupaten Bandung Barat belum dapat menghilangkan perkawinan perempuan berumur 20-24 tahun sebelum berumur 15 tahun.

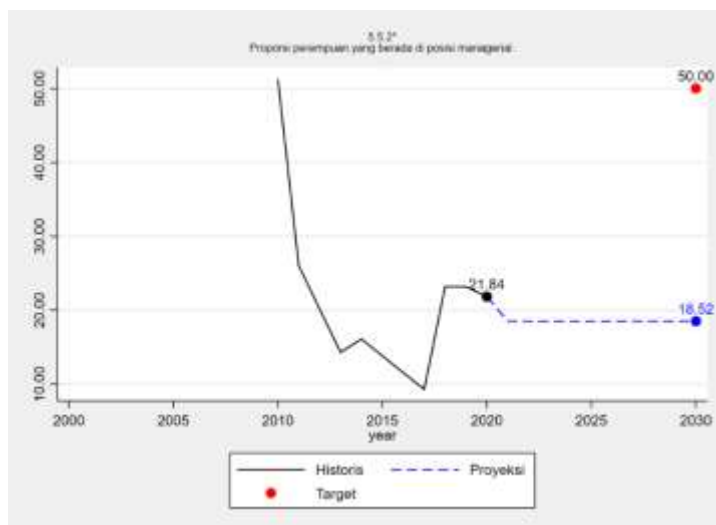


Gambar 4.59 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun

Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum 18 tahun di Kabupaten Bandung Barat angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan di bawah 15 tahun. Data 2020 berada pada angka 19,12%, berfluktuasi dan cenderung menurun ke angka 19,57% pada tahun 2030 (Gambar 4.59). Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh United Nations yaitu 0%. Hasil dari proyeksi tersebut jika dibandingkan dengan target kuantitatif, memperoleh nilai C. Kabupaten Bandung Barat masih belum bisa menghilangkan perkawinan perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum 18 tahun.

Target 5.5. berusaha untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi,

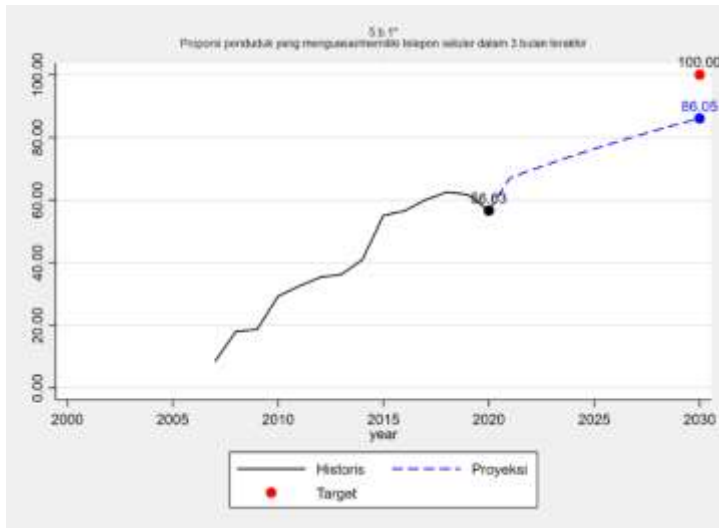
dan masyarakat. Penjelasan mengenai hasil proyeksi dari satu indikator terpilih pada target ini akan dijelaskan di bawah ini.



Gambar 4.60 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.60, data historis yang diperoleh dari tahun 2007 sampai tahun 2020 untuk proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial, menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Angkanya sempat meningkat tinggi di tahun 2018 namun menurun hingga 21,83% di tahun 2020. Target kuantitatif yang ditetapkan oleh ILO adalah 50%. Ketika data historis tersebut diproyeksikan sampai tahun 2030, diperoleh angka 19,73%. Angka tersebut masih sangat jauh dari target kuantitatif yaitu 50% yang telah ditetapkan oleh International Labour Organization. Ketika hasil dari proyeksi dibandingkan dengan target kuantitatif, maka nilai untuk Kabupaten Bandung Barat adalah E. Posisi manajerial di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh laki-laki.

Hal yang ingin dicapai target 5.b pada tahun 2030 yaitu meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.



Gambar 4.61 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir

Grafik data historis proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir, menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tren secara keseluruhan meningkat (Gambar 4.61) dengan pencapaian terakhir tahun 2020 berada di angka 56,63%. Pada tahun 2030 diproyeksikan akan mencapai 86,05% karena pola data cenderung meningkat. Target kuantitatif yang telah ditentukan oleh tim penyusun yaitu sebesar 100%, maka Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai C.

4.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masyarakat merupakan Tujuan 6. Target yang akan dianalisis adalah target 6.1 dan 6.2, dengan total subindikator sebanyak 4, yang ditampilkan pada tabel 4.6. Dua indikator diantaranya diproyeksikan dapat mencapai target, 1 indikator sudah menuju pencapaian target dan 1 indikator masih jauh dari target yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman karena memperoleh nilai E.

Tabel 4-6 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 6

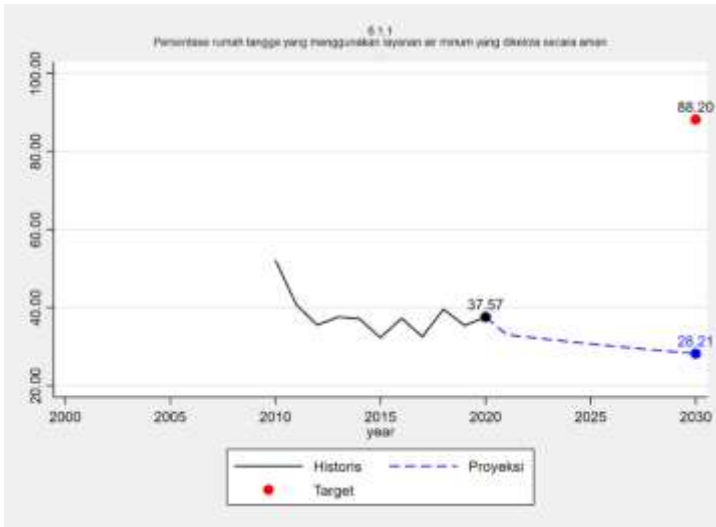
KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	32.28	37.57	28.21	88.20	E
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	51.70	68.39	99.30	100	A

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
6.2.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	48.55 ^b	73.99	100	100	A
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	43.04	71.47	82.49	100	C

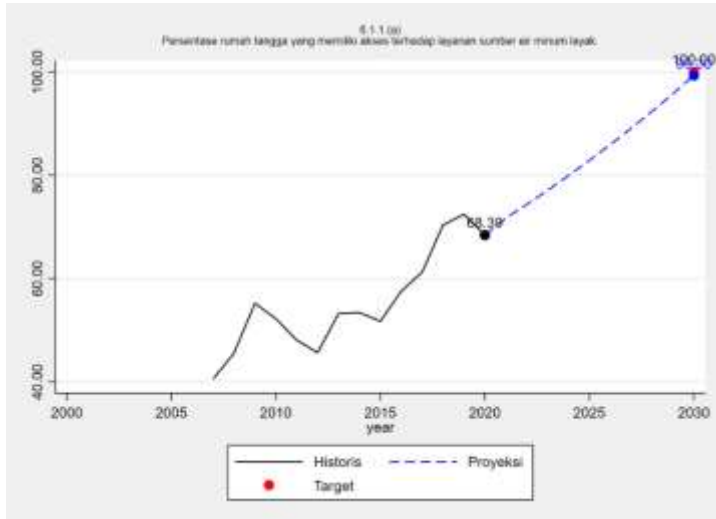
Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b data tahun 2017

Target 6.1 menginginkan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil proyeksi empat indikator terpilih yang termasuk dalam target ini.

Gambar 4.62 menggambarkan data historis tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk indikator persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Pola data historis cenderung menurun dengan hasil proyeksi pada tahun 2030 adalah 28,21%. Pola tersebut menjauhi target yang seharusnya yaitu 88,2% (ditentukan oleh tim penyusun) dan memperoleh nilai E. Rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat masih belum menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.



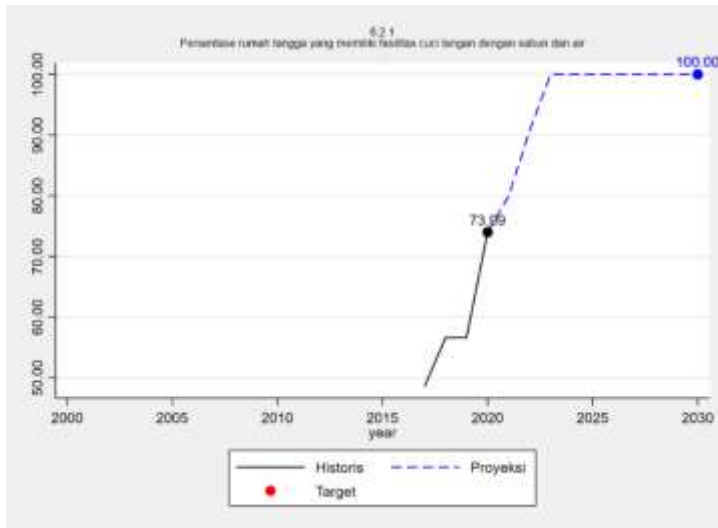
Gambar 4.62 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman



Gambar 4.63 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Grafik data historis untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dari tahun 2007 (40,53%) sampai tahun 2020 (68,39%), menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan peningkatan yang cukup signifikan (Gambar 4.63). Proyeksi pencapaian dari indikator tersebut pada tahun 2030 sebesar 99,3%, hampir mencapai target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh United Nations yaitu 100%. Oleh karena itu, perolehan nilai untuk indikator ini adalah A. Hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 dapat memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Berusaha mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan merupakan target 6.2. Hasil proyeksi dua indikator yang digunakan akan dijelaskan di bawah ini.

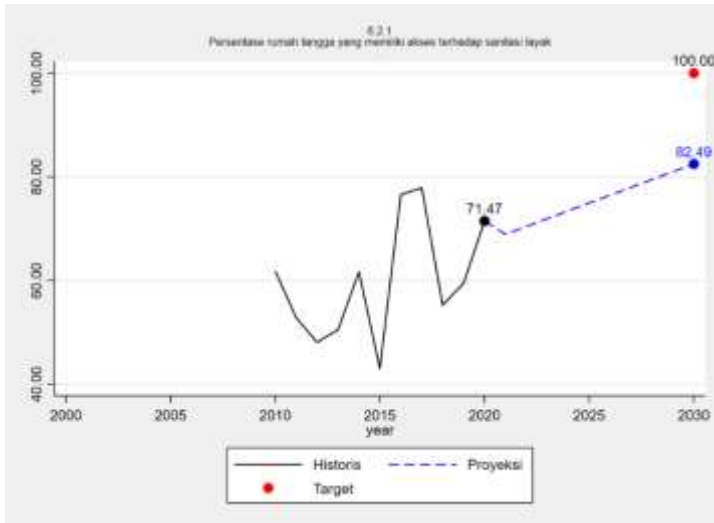


Gambar 4.64 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

Gambar 4.64 memperlihatkan pola data historis dari tahun 2017 (48,55%) sampai 2020 (73,99%) dengan tren yang meningkat secara signifikan (Gambar 4.64). Berdasarkan data historis tersebut hasil proyeksi pencapaian tahun 2030 untuk Kabupaten Bandung Barat sebesar 100%, bahkan akan dicapai dari tahun 2023. Proyeksi tersebut sudah sesuai dengan target kuantitatif yang tercantum di dalam *Roadmap* SDGs Indonesia yaitu 100%, sehingga memperoleh nilai A. Pada tahun 2030, rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat akan memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Indikator pilihan terakhir pada Tujuan 6 adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Tren data historis dari tahun 2010 sampai tahun 2020 berfluktuasi dan cenderung meningkat (Gambar 4.65) namun tidak cukup untuk mencapai target 100% United Nations di tahun 2030. Hasil proyeksi pencapaian dari

indikator tersebut pada tahun 2030 adalah 82,49%. Perolehan nilai indikator ini adalah C, rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2030.



Gambar 4.65 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak

4.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

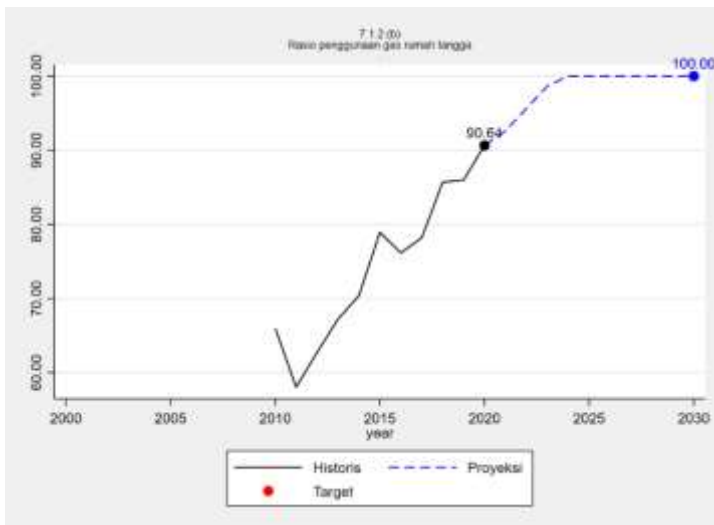
Energi bersih dan terjangkau dapat diartikan dengan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua masyarakat. Hanya terdapat satu indikator yang dianalisis untuk tujuan ini yaitu rasio penggunaan gas rumah tangga dengan nilai proyeksi A yang diperkirakan akan tercapai dari tahun 2024.

Tabel 4-7 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 7

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
7.1.2(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	78.92	90.64	100	100	A

Catatan: ^aHasil analisis proyeksi

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.



Gambar 4.66 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 rasio penggunaan gas rumah tangga.

Gambar 4.66 menunjukkan data historis untuk indikator rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2010 sampai tahun 2020 dengan tren yang meningkat secara signifikan. Data tersebut diproyeksikan sampai tahun 2030, maka diperoleh angka 100% sebagaimana target yang telah ditentukan oleh United Nations. Kesesuaian antara hasil proyeksi dengan target SDGs yang telah ditentukan membuat indikator ini mendapatkan nilai A. Dengan kata lain, pada tahun 2030 seluruh rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan sudah menggunakan gas rumah tangga.

4.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi mencakup indikator dalam aspek perekonomian yang secara garis besar bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dari 11 indikator terpilih, proyeksi pencapaian Kabupaten Bandung Barat di tahun 2030 untuk Tujuan 8 belum cukup baik. Indikator yang dianalisis memiliki hasil proyeksi 1 indikator bernilai A, 2 indikator bernilai B, 2 indikator bernilai C, 3 indikator bernilai D, 1 indikator bernilai E dan 2 indikator yang tidak bernilai seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4-8.

Tabel 4-8 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 8

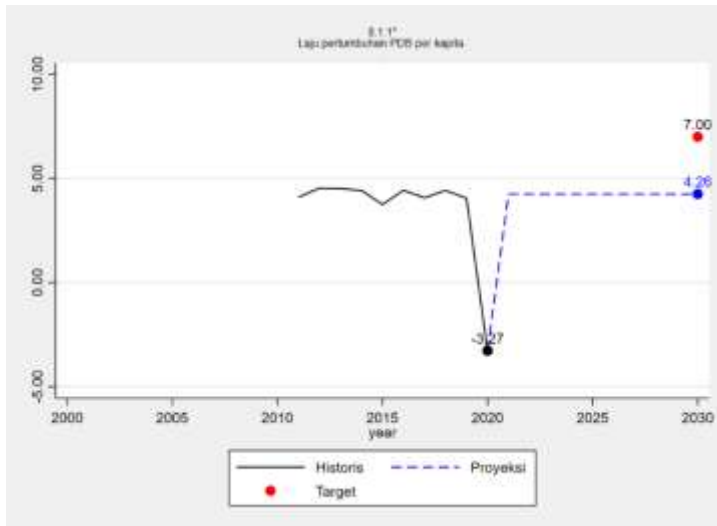
KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	3.75	-3.27	4.26	7	D
8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	20861.14	27101.68	57859.38	119635.88	E
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	9.18	4.40	3.73	3.78	A
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	75.88	59.48	55.62	25	D
8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal	24.12	40.52	44.38	75	D
8.3.1(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	81.36	- ^b	80.47		B
8.5.1*	Upah rata-rata per jam	7348.22	- ^b	22157.91		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	10.01	12.25	10.86	3.80	B

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	12.01	12.48	9.26		
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	35.80	37.09	25.19	3.80	C
8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	24.02	- ^b	28.94	36.03	C

Catatan: ^aHasil analisis proyeksi. ^bTidak ada data pada tahun tersebut. ^cData tahun 2017.

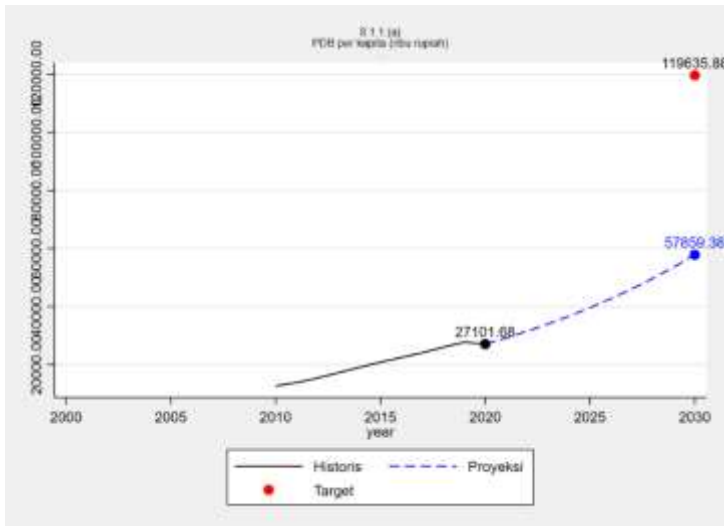
Target 8.1 bermaksud mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang dianalisis dengan 2 indikator yaitu PDB per kapita dan laju pertumbuhannya.

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. Lajunya diukur untuk dapat melihat pertumbuhan PDB pada periode tertentu, sehingga dapat terlihat perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk.



Gambar 4.67 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per kapita

Data historis laju pertumbuhan PDB per kapita ditunjukkan pada Gambar 4.67. Tren data dari tahun 2011 hingga 2019 menunjukkan tren yang tidak berubah secara signifikan (cenderung datar) bahkan turun sampai mencapai nilai -3,27% (pertumbuhannya negatif) di tahun 2020. Hasil proyeksi tahun 2030 mencapai nilai 4,26% sedangkan target yang ditentukan oleh UN laju PDB per kapita harus mencapai 7%. Maka laju PDB per kapita Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai D.



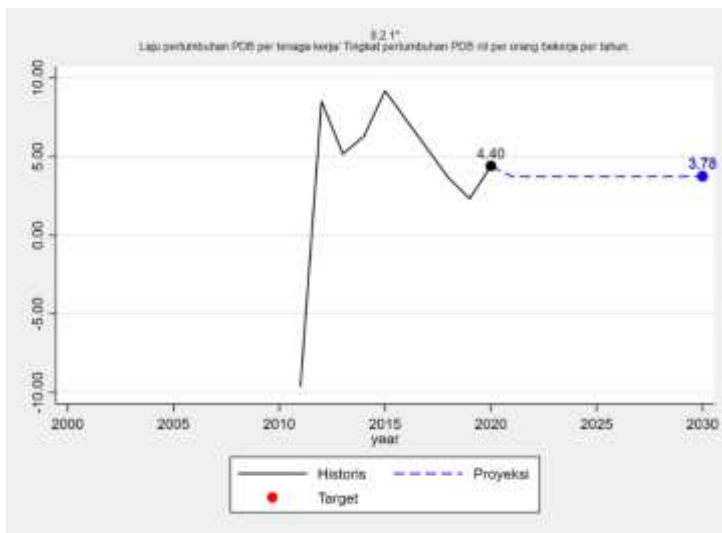
Gambar 4.68 Grafik data historis PDB per kapita (ribu rupiah)

Data historis PDB per kapita (Gambar 4.68) menunjukkan tren yang cenderung naik (dari tahun 2010 sampai 2019), dan sempat turun di tahun 2020 mencapai 27101,68. Pada tahun 2030 diproyeksikan PDB per kapita Kabupaten Bandung Barat mencapai 57859,38. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* (tim penyusun) yaitu 119.635,88, sehingga indikator PDB per kapita Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai E.

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya adalah target 8.2 TPB/SDGs Indonesia, diukur menggunakan indikator laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Gambar 4.69 menggambarkan tren data laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

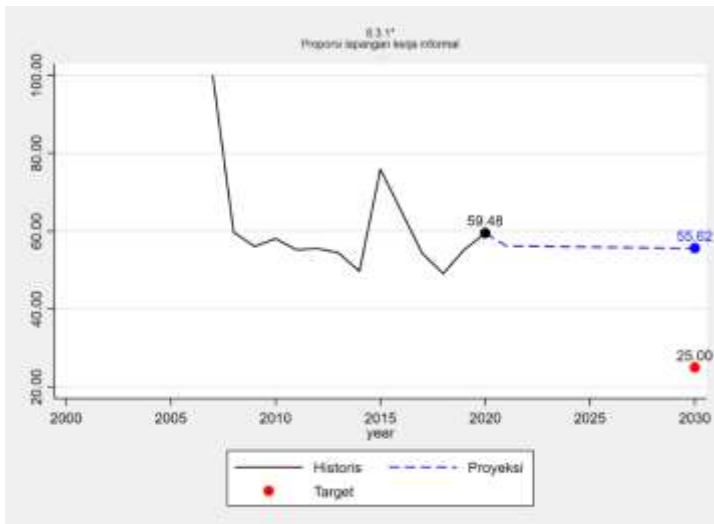
yang cenderung fluktuatif. Lajunya sempat bernilai negatif pada tahun 2013 (-9,65%) dan meningkat ke nilai positif pada tahun-tahun berikutnya. Ketika tren tersebut diproyeksikan pada tahun 2030 mencapai angka 3,75% dan mendekati target yang telah ditentukan oleh OECD yaitu 3,78%. *Scorecard* Kabupaten Bandung Barat untuk indikator ini mendapatkan nilai A.



Gambar 4.69 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Target 8.3 bermaksud mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan. Target tersebut diukur menggunakan 3 indikator diantaranya proporsi lapangan kerja informal, persentase tenaga kerja formal dan persentase tenaga kerja informal bidang

pertanian.

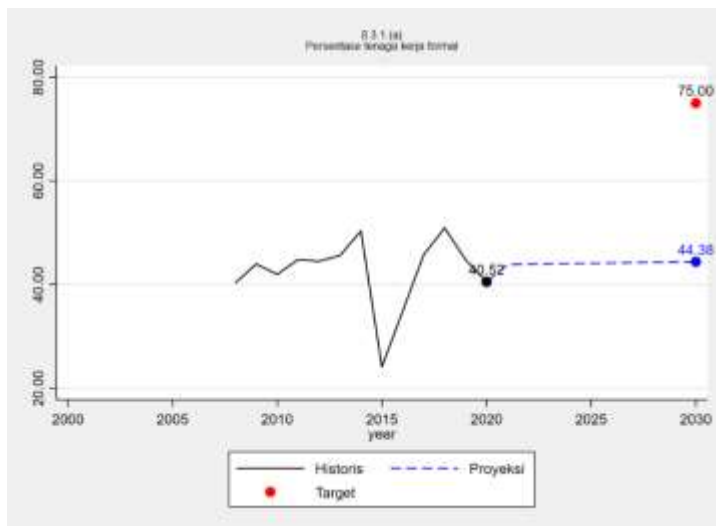


Gambar 4.70 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi lapangan kerja informal.

Dari Gambar 4.70 dapat terlihat bahwa proporsi lapangan kerja informal di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2007 hingga 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan agak sedikit menurun. Pada tahun 2020 mencapai 59,48% dan diproyeksikan tahun 2030 mencapai 55,62%. Angka tersebut masih jauh dari target berdasarkan *expert judgement* (tim penyusun) yaitu 25%. Pekerjaan informal di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 masih mendominasi sehingga memperoleh nilai D.

Persentase tenaga kerja formal mengindikasikan adanya kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan

pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (Badan Pusat Statistik, 2021a).

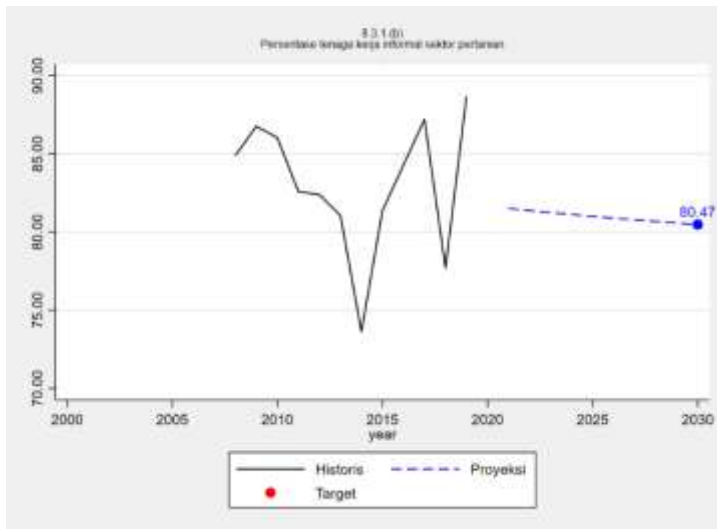


Gambar 4.71 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja formal.

Sebanding dengan banyaknya persentase pekerjaan informal, proyeksi persentase tenaga kerja formal di Kabupaten Bandung Barat tahun 2030 juga masih kecil yaitu 44,38% dan jauh dari target 75% yang ditetapkan oleh tim penyusun. Data historis pada Gambar 4.71 dari tahun 2008 hingga 2020 memiliki tren yang cenderung datar dan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2015 (24,12%). Tenaga kerja formal di Kabupaten Bandung Barat belum banyak pada tahun 2030 sehingga memperoleh nilai D.

Selanjutnya, persentase tenaga kerja informal di bidang pertanian dengan data historis ditunjukkan pada Gambar 4.72. Grafik memperlihatkan tren data historis yang berfluktuasi dan cenderung agak sedikit menurun dengan angka tertinggi di tahun 2019 (88,67%).

Hasil proyeksi persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di tahun 2030 adalah 80,47% menurun dari tahun 2019. Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat semakin berkurang di tahun 2030 sehingga mendapatkan nilai B.

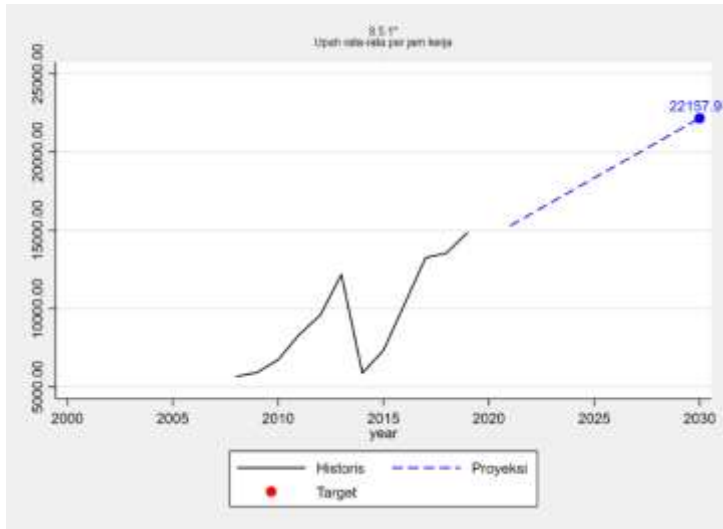


Gambar 4.72 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.

Target 8.5 menginginkan pada tahun 2030 dapat memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Target tersebut diukur menggunakan 3 indikator diantaranya upah rata-rata per jam kerja, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran.

Upah rata-rata per jam kerja dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Gambar 4.73 menggambarkan data historis upah rata-rata per jam masyarakat Kabupaten Bandung Barat

yang memiliki kecenderungan naik, meskipun sempat turun di tahun 2014. Data terakhir tahun 2019 yaitu 14872,14 dan diproyeksikan akan terus naik hingga tahun 2030 mencapai 22157,91.

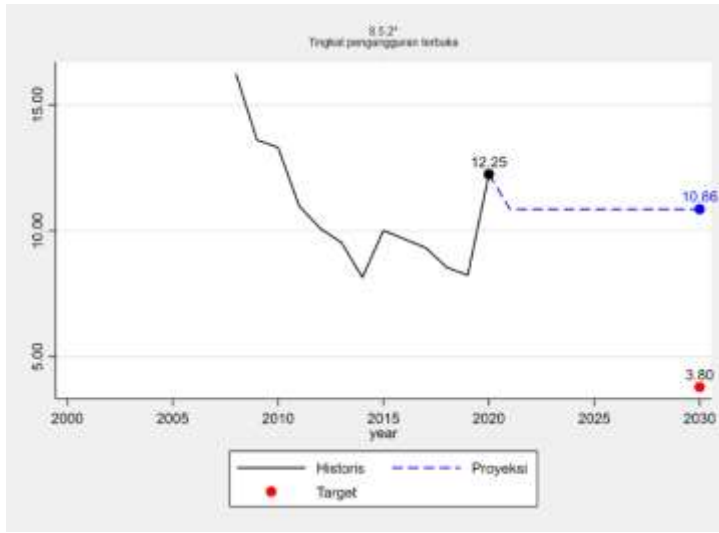


Gambar 4.73 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 upah rata-rata per jam kerja (rupiah).

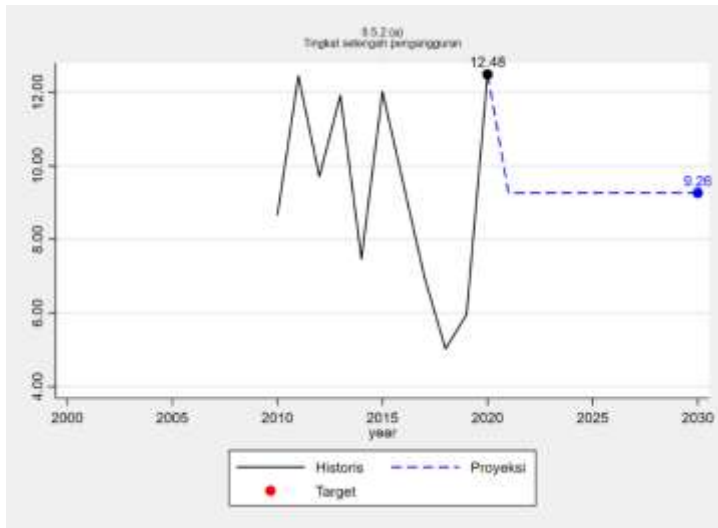
Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.

Pola data historis tingkat pengangguran terbuka yang ditunjukkan pada Gambar 4.74 berfluktuasi cenderung datar secara keseluruhan. Roadmap SDGs Indonesia menargetkan indikator ini pada angka 3,8%, sedangkan hasil proyeksi tahun 2030 akan mencapai 10,86%.

Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2030 namun sudah mendekati target, sehingga memperoleh nilai B.



Gambar 4.74 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 tingkat pengangguran terbuka.



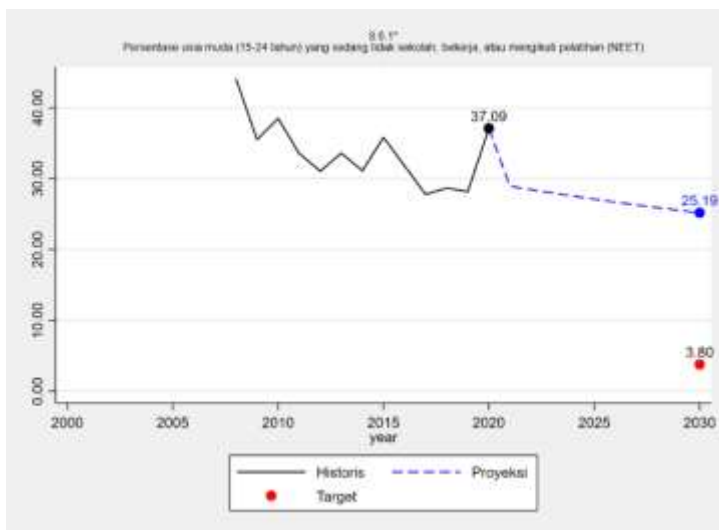
Gambar 4.75 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 tingkat setengah pengangguran.

Selanjutnya adalah indikator tingkat setengah pengangguran, menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

Berdasarkan grafik data historis pada Gambar 4.75 tingkat setengah pengangguran memiliki tren yang berfluktuasi. Terlihat pada tahun 2017 dimana angka yang diperoleh sempat turun ke angka 6,97% dan kembali naik di tahun 2020 menjadi 12,48%. Tahun 2030, tingkat setengah pengangguran Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan menurun kembali ke angka 9,26%.

Target 8.6 Indonesia menargetkan untuk dapat mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah. Hal tersebut diukur menggunakan indikator persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET). Dengan begitu, kita dapat mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (*discouraged worker*) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.

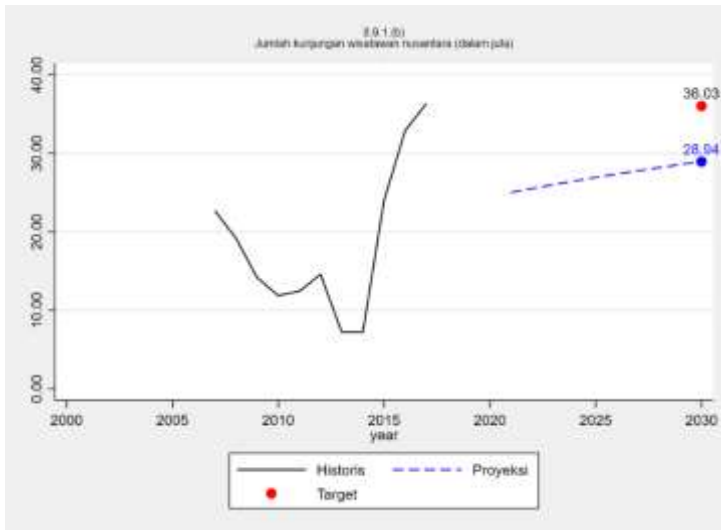
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) memiliki tren data historis yang cenderung menurun (Gambar 4.76) namun belum cukup untuk mencapai target di tahun 2030. Hasil proyeksi untuk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 adalah 25,19% sedangkan target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh tim penyusun yaitu 3,80%. Usia muda yang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan di Kabupaten Bandung Barat masih cukup banyak sehingga mendapatkan nilai C.



Gambar 4.76 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET).

Indonesia menargetkan pada tahun 2030, dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Hal ini dianalisis menggunakan indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Target 8.9).

Data historis yang diperoleh dari tahun 2007 sampai tahun 2017 untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara cenderung menurun pada tahun 2007 hingga 2014 lalu meningkat pada tahun 2015 hingga 2017. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 adalah 28,94 juta, sedangkan target yang ditetapkan oleh tim penyusun adalah 36,03 juta (meningkat 50%). Proyeksi pencapaian tersebut masih jauh dari target kuantitatif yang telah ditentukan oleh tim penyusun (*expert judgement*), maka perolehan nilainya C.



Gambar 4.77 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta).

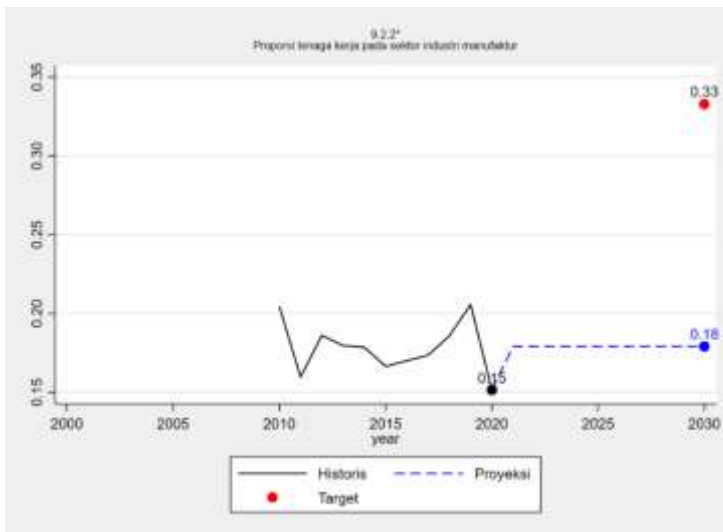
4.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan ke-9 dari SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Satu indikator yang dianalisis mendukung pencapaian target TPB/SDGs dalam mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB) sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Di bawah ini terdapat tabel yang berisikan indikator terpilih tujuan 9.

Tabel 4-9 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 9

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0.17	0.18	0.18	0.33	D

Catatan: ^aHasil analisis proyeksi



Gambar 4.78 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Berdasarkan Gambar 4.78, data historis menunjukkan perubahan yang tidak terlalu signifikan yang berkisar di antara 0,15% (Tahun 2020) hingga 0,2% (Tahun 2019). Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur ditargetkan meningkat dua kali lipat dari tahun 2015, yaitu menjadi 0,33%. Namun hasil proyeksi pencapaiannya hanya 0,18% yang menyebabkan indikator ini memperoleh nilai D. Pada tahun 2030, tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kabupaten

Bandung Barat tidak meningkat 2 kali lipat dari tahun 2015.

4.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

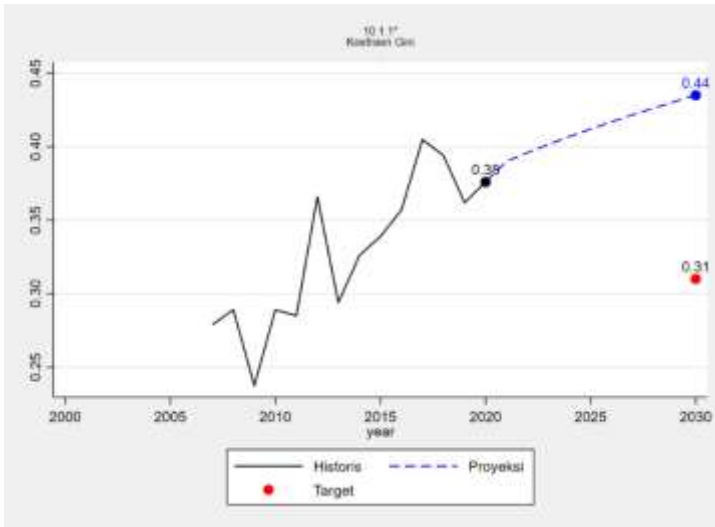
Dari tahun ke tahun Koefisien Gini mengalami kenaikan, sehingga untuk mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sulit tercapai pada tahun 2030. Kesenjangan di Indonesia masih tinggi pada beberapa tahun terakhir. Solusi untuk mengurangi kesenjangan yaitu dengan memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

Nilai rata-rata untuk tujuan 10 Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai C, yang artinya 2 indikator terpilih sudah lebih dari seperempat jalan menuju target SDGs. Indikator terpilih tujuan 10 dapat dilihat pada table 4-10.

Tabel 4-10 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 10

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
10.1.1*	Koefisien Gini	0.34	0.38	0.44	0.31	D
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	4.29	5.18	8.44	0	B

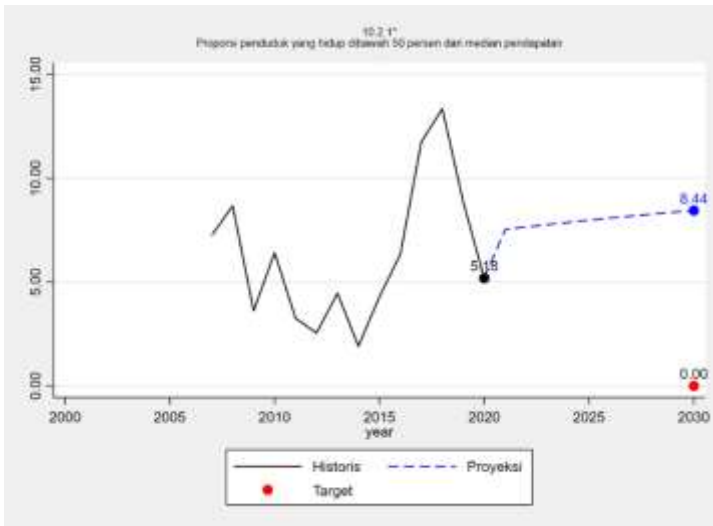
Catatan: ^aHasil analisis proyeksi



Gambar 4.79 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 koefisien gini.

Koefisien gini atau rasio gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Apabila rasio gini semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi, sedangkan apabila mendekati 0 ketimpangan semakin kecil (pemerataan pendapatan).

Gambar 4.79 menunjukkan grafik data historis koefisien gini dengan tren yang cenderung naik dan tidak berubah secara signifikan. Tahun 2020 mencapai nilai 0,38 dan hasil proyeksi tahun 2030 mencapai 0,44. Tren yang cenderung naik, bertentangan dengan tren yang seharusnya menurun untuk mencapai target 0,31 (ditentukan oleh *expert judgement* tim penyusun) meskipun nilainya mendekati 0, nilai untuk indikator ini adalah D. Kabupaten Bandung Barat belum dapat mengurangi target kesenjangan di tahun 2030.



Gambar 4.80 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk yang hidup 50 persen dari median pendapatan.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, di disagregasi menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas, merupakan ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di sejumlah negara maju untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara *relative* penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Apabila persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan kesejahteraan. Indikator ini juga dapat menunjukkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kesenjangan antar penduduk.

Data historis indikator ini diperlihatkan oleh gambar 4.80, tren datanya berfluktuasi dan cenderung agak naik. Sempat tinggi di tahun 2018 (13,34%) dan menurun di tahun 2020 menjadi 5,18%. Proyeksi

pencapaian untuk tahun 2030 mencapai 8,44%, jika dibandingkan dengan target 0% yang ditentukan oleh OECD, proyeksi tersebut sudah mencapai 90% target TPB/SDGs (B). Penduduk yang hidup dengan 50% di pendapatan rata-rata hampir berhasil dikurangi oleh Kabupaten Bandung Barat.

4.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs yaitu ingin menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Indikator terpilih dari tujuan ini hanya satu indikator (lihat tabel 4.11) dalam rangka mendukung target menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

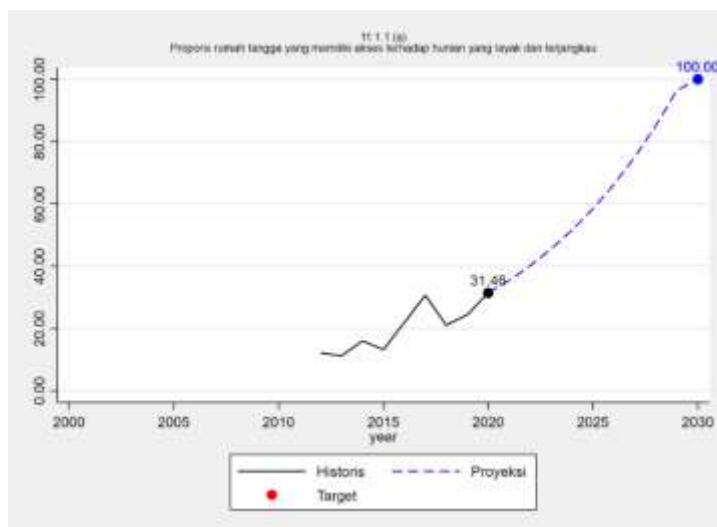
Tabel 4-11 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 11

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	13.25	31.46	100	100	A

Catatan: ^aHasil analisis proyeksi

Dua indikator lainnya (Tabel 4-12 (b)) seperti jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang dan jumlah orang terkena dampak (luka) per 100.000 orang tidak dilakukan proyeksi dan hanya dianalisis berdasarkan data historisnya saja.

Analisis indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, bermanfaat dalam memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, guna mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.



Gambar 4.81 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Grafik data historis proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menunjukkan tren naik secara signifikan (Gambar 4.81). Tahun 2020 proporsi hanya

mencapai 31,46%, namun karena grafik meningkat secara signifikan, hasil proyeksi tahun 2030 mencapai target 100% yang ditentukan oleh United Nations. Seluruh rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat memiliki akses hunian layak dan terjangkau pada tahun 2030 (ditunjukkan dengan *scorecard A*).

Data historis dari tahun 2010 hingga 2018 untuk jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang cenderung semakin berkurang dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk jumlah korban terkena dampak (luka) akibat bencana tidak ada tren yang pasti, sempat meningkat pada tahun 2013 kemudian turun hingga tahun 2016 dan kembali naik ke kisaran 0,4 pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 4-12 Data indikator 11.5.1*

KODE	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	^{-b}	0.24	0.12	^{-b}
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	0.61	0.24	0.48	0.42

^{-b} data tidak tersedia pada tahun tersebut

4.12 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat bertujuan untuk menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional

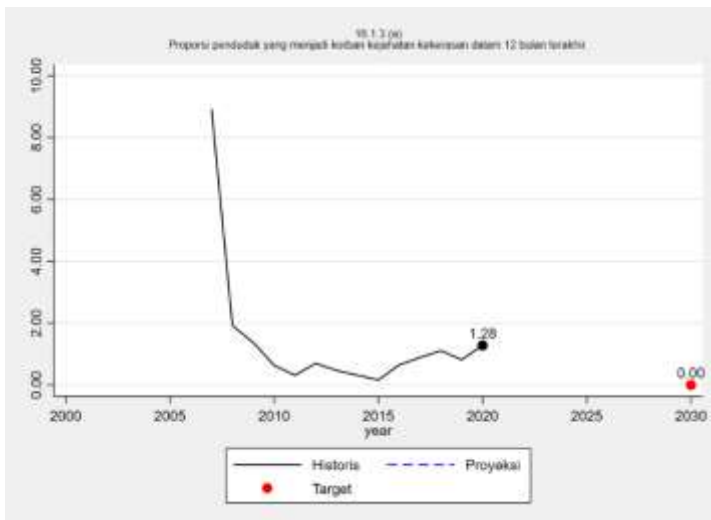
dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua masyarakat merupakan tujuan 16 TPB/SDGs. Tujuan ini mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Berikut ini tabel yang berisikan tiga indikator terpilih untuk tujuan 16 dengan nilai rata-rata C.

Tabel 4-13 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 16

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0.16	1.28	0	0	A
16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	24.81	34.98	43.16	100	E
16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	74.04	68.65	87.33	100	C

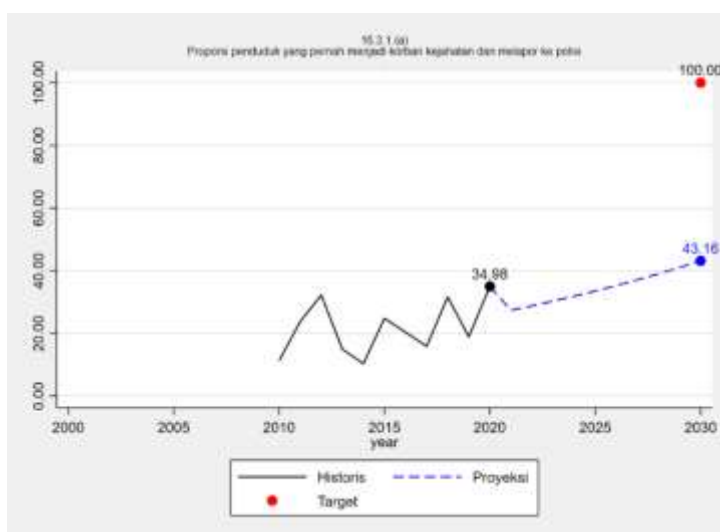
Catatan: ^aHasil analisis proyeksi

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan adanya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan serta menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.



Gambar 4.82 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Proporsi penduduk korban kejahatan kekerasan paling banyak terjadi pada tahun 2007 dengan persentase sebesar 8,92% dan kemudian berangsur menurun hingga tahun 2020 menjadi 1,28% (Gambar 4.82). Proyeksi pada tahun 2030 bahkan 2021 indikator ini mencapai 0%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh United Nations. Pada tahun 2030, tidak ada korban kejahatan kekerasan di Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu memperoleh nilai A.

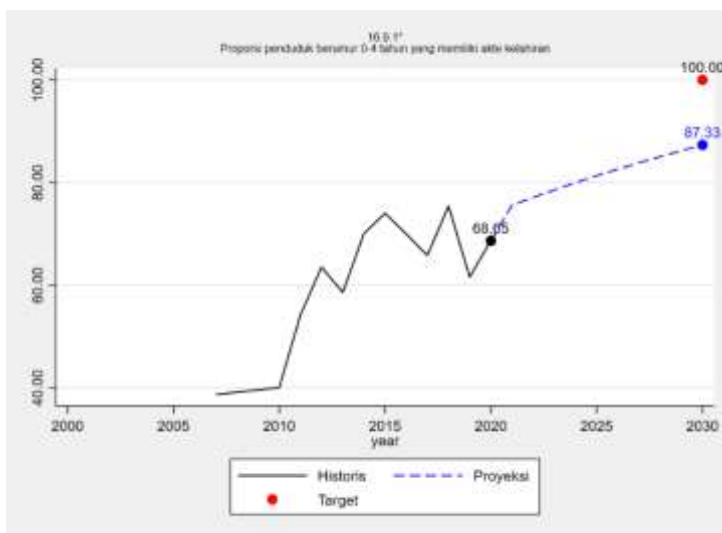


Gambar 4.83 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi.

Gambar 4.83 memperlihatkan grafik data historis proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi. Tahun 2020 proporsi berada di angka 34,98%, dengan tren data historis yang cenderung mengalami peningkatan, menghasilkan proyeksi di tahun 2030 sebesar 43,16%. Proyeksi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan *expert judgement* (tim penyusun) yaitu 100%, sehingga

memperoleh nilai E pada *scorecard*. Penduduk Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban kejahatan belum seluruhnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Berikutnya adalah proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran diperlihatkan pada gambar 4.84 dengan tren data historis yang cenderung meningkat. Tahun 2020 proporsi mencapai angka 68,65% dengan tren yang meningkat hasil proyeksi tahun 2030 menjadi 87,33%. Angka tersebut hampir mencapai target yang ditentukan oleh United Nations yaitu 100%. Tahun 2030 anak umur 0-4 tahun di Kabupaten Bandung Barat hampir seluruhnya memiliki akte kelahiran.



Gambar 4.84 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran.

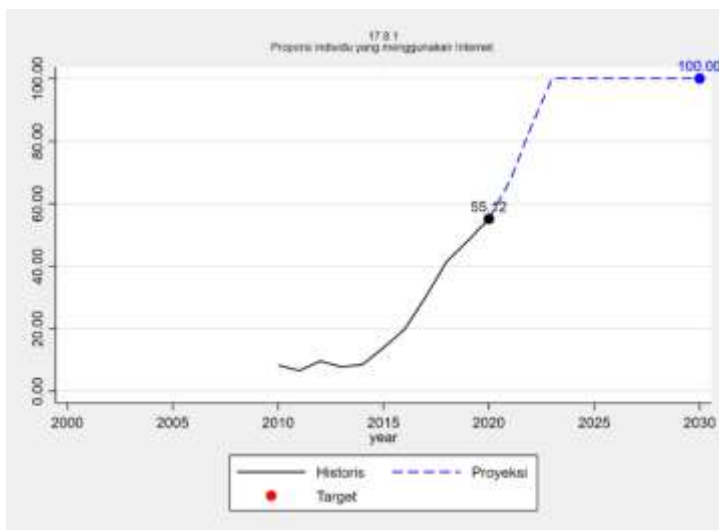
4.13 Tujuan 17 Kemitraan dan Mencapai Tujuan

Tujuan 17 ingin menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, salah satunya diukur dengan indikator proporsi individu yang menggunakan internet yang bermanfaat untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital. Dalam rangka mencapai target untuk dapat mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 4-14 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 17

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan internet	13.94	55.12	100.00	100.00	A

Catatan: ^aHasil analisis proyeksi



Gambar 4.85 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi individu yang menggunakan internet.

Data historis proporsi individu yang menggunakan internet pada tahun 2010 masih sangat kecil yaitu sebesar 8,38%. Namun, terus mengalami kenaikan yang signifikan sehingga tahun 2020 proporsinya mencapai 55,12%. Hasil proyeksi pada tahun 2030 mencapai target yang ditentukan oleh *expert judgement* (tim penyusun) yaitu sebesar 100% (*scorecard A*). Bahkan dari tahun 2023, individu Kabupaten Barat diproyeksikan dapat menggunakan internet secara menyeluruh.

4.14 Indikator TPB/SDGs Tambahan Kabupaten Bandung Barat

Terdapat 25 indikator SDGs tambahan dan 3 indikator SDGs dengan data time series lebih lengkap dari yang dimiliki SDGs Center

UNPAD (ada tambahan data tahun 2021) yang bersumber dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2018-2023. Dari 25 indikator SDGs tambahan hanya 14 indikator SDGs yang dapat diproyeksikan pencapaiannya pada tahun 2030 karena minimal memiliki 3 data series, dan angkanya rasional. Sedangkan 3 indikator SDGs dengan data *time series* tambahan pada tahun 2021 diantaranya indikator 2.1.1.(a), 2.2.1* dan 2.2.2*, namun hanya 2 indikator yang dapat diproyeksikan. Daftar indikator SDGs tambahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4-15 Data, target, dan scorecard indikator SDGs

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	9.4	16.7	13.48			12.7	0.00	Target WHO (tambahan data 2021)
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	32.6	34.3	36.69	32.12		29.6	17.6	Target UN, WHO (tambahan data 2021)
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	5.6	8.2	9.67			1.9	5	Target UN, WHO (tambahan data 2021) Tidak dapat diproyeksi data berbeda jauh dengan yang dimiliki oleh SDGs Center
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		2164	1976	4222			0.2 pada tahun 2024	Target RAN Tidak dapat diproyeksi

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		49.64	44.28	50.84			Meningkat	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		5.14	5.19	9.71			28	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).		5.57	5.69	5.65			38	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			74.02	79.05	76.64		98 pada tahun 2024	Target RAN
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan	78.1	81.6	86.1	93.1			Meningkat	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
	(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	39.6	40.4	40.5	42.1			Meningkat	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		3	3	3				Tidak dapat diproyeksi karena data series senilai
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		17	8	27			Menurun	Target RAN
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol		26	26	26				Tidak dapat diproyeksi data series senilai

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	39.31	39.45	39.48				Meningkat	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat Target RAN 21 pada tahun 2024
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	8.127	8.179	8.305				Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat Target RAN 8.1 pada tahun 2024
10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		10.6	9.8	9.8			14	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		22.26	23.18	25.99			80	Target RAN
12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	21.5	65.67	473.68				20	Tidak diproyeksikan data tahun 2018 melonjak signifikan
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		2164	1976	4222			Menurun	Tidak dapat diproyeksi
16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	21	41	52	55			Menurun	Tidak dapat diproyeksikan data series tidak rasional
16. 6.1(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		75	75	100			85 (RAN 2024)	Tidak diproyeksikan sudah mencapai 100

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
16.6.1(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	64.88	65.72	66				80 pada tahun 2024	Target RAN
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	10	10	12				17 pada tahun 2024	Target RAN
16.7.1(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	21.8	17	13				Meningkat	Target KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	100	100	100				10.22-11.1 pada tahun 2024	Target RAN Tidak dapat diproyeksikan data tidak rasional
17.8.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100	100	100				45 pada tahun 2024	Target RAN

KODE	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET	Keterangan
									Tidak diproyeksikan data sudah mencapai 100
17.18.1(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.		100	100	100			86 pada tahun 2024	Target RAN Tidak diproyeksikan data sudah mencapai 100
17.19.2(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		100	100	100			100 pada tahun 2024	Target RAN Tidak diproyeksikan data sudah mencapai 100

Keterangan: baris dengan warna adalah indikator yang tidak diproyeksikan

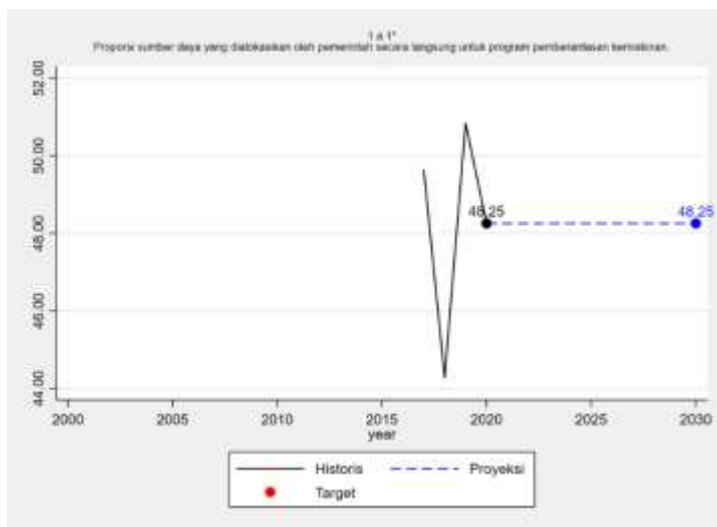
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Target 1.a SDGs menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil dari proyeksi untuk 1 indikator pada target tersebut.

Tabel 4-16 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 1

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	49,64 ^f	b	48,25	Meningkat	

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018.



Gambar 4.86 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

Data proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan memiliki 3 data pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun karena keterbatasan data yang memiliki pola yang fluktuatif sehingga proyeksi untuk indikator ini dilakukan dengan merata-ratakan data. Hasil proyeksi pada tahun 2030 mencapai angka 48,25 sedangkan target berdasarkan dokumen KLHS seharusnya meningkat.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

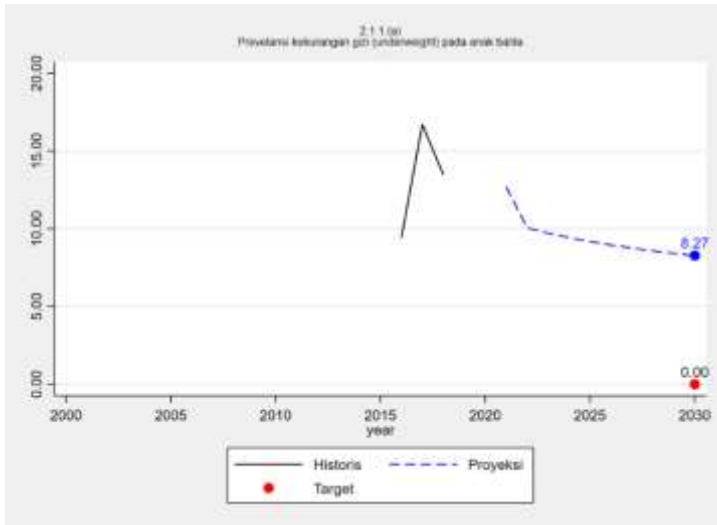
Indikator 2.1.1(a) dan 2.2.1* telah diproyeksikan sebelumnya oleh tim SDGs Center, perbedaan dengan data yang diperoleh dari dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat adalah adanya data pada tahun 2021.

Tabel 4-17 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 2

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	9.40	12.70 ^b	8.27	0.00	B
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	32.60 ^e	29.60 ^b	16.00	17.76	A
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	5.14 ^f	11.25	34.1	28	E

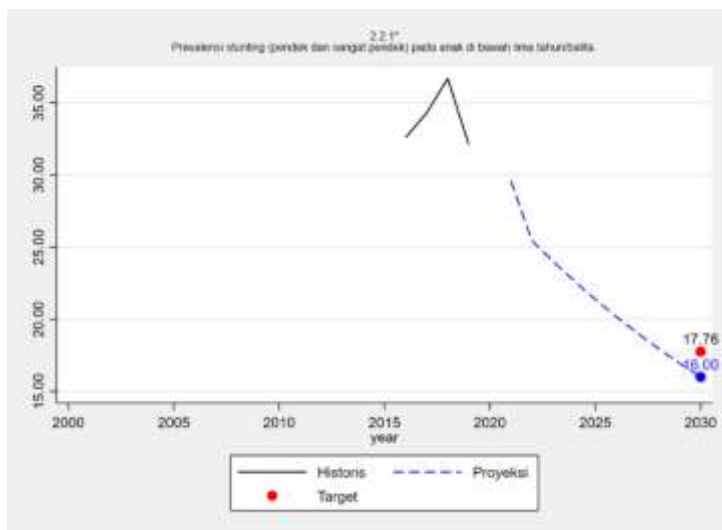
Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Data historis indikator prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Kabupaten Bandung Barat memiliki pola yang cenderung menurun (Gambar 4.87), sehingga pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 8,27% dan memperoleh nilai B karena diproyeksikan minimal 90% menuju target 0%.

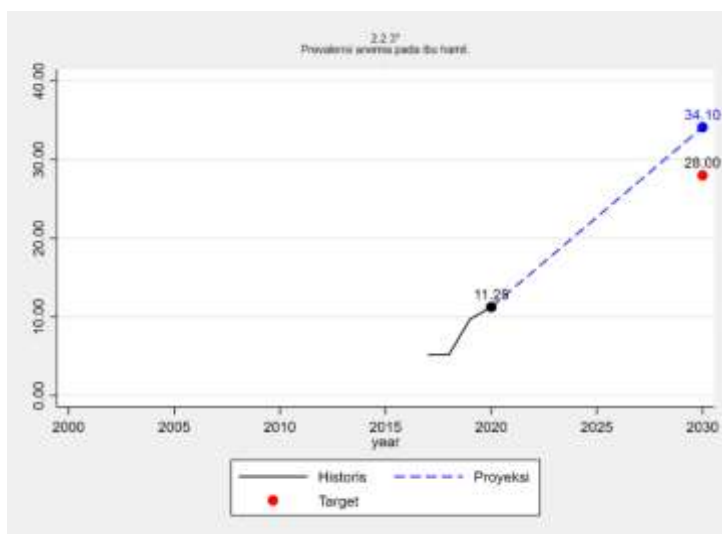


Gambar 4.87 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.

Gambar 4.88 menunjukkan data prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita yang cenderung menurun. Pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai angka 16% dan angka tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu 17,76% sehingga memperoleh *scorecard* A.



Gambar 4.88 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.



Gambar 4.89 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Prevalensi anemia pada ibu hamil.

Indikator tambahan dari dokumen KLHS adalah indikator anemia pada ibu hamil. Pada tahun 2017 berada pada angka 5,14% dan terus naik tahun 2018 dan 2019 sehingga pola grafiknya cenderung naik (Gambar 4.89). Tahun 2030 diproyeksikan mencapai 34,1%, meskipun targetnya berada pada angka 28% namun seharusnya polanya menurun sehingga memperoleh nilai E.

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Terdapat 2 indikator tambahan untuk tujuan 3 yaitu indikator 3.7.2* angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) dan 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini.

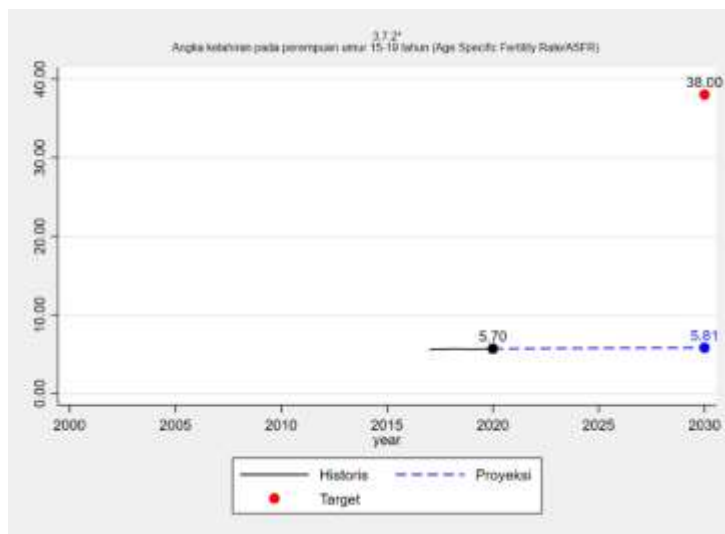
Tabel 4-18 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 3

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	5.57 ^f	^b	5.81	38	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	74.02 ^g	76.64	82.57	95	C

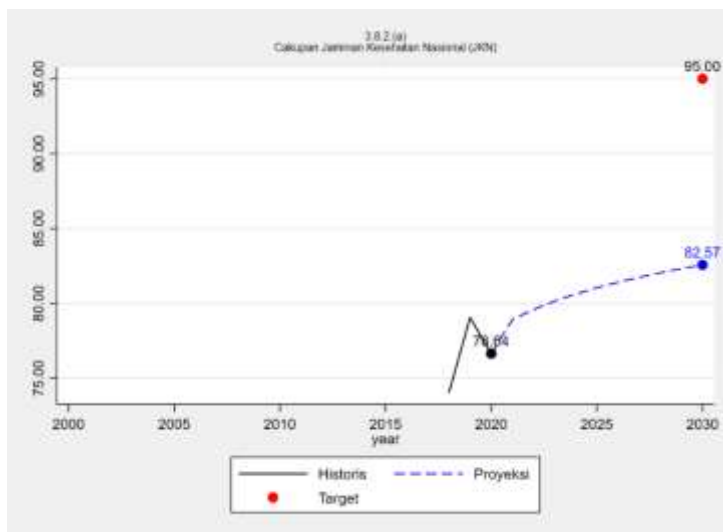
Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun memiliki target 38% (Gambar 4.90) dari dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat dan angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan data historis yang ada serta proyeksi tahun 2030 (5,81%).

Indikator 3.8.2.(a) ditunjukkan oleh Gambar 4.91 dengan pola data historis yang cenderung naik dan menghasilkan proyeksi pencapaian tahun 2030 sebesar 82,57%. Target pada tahun 2030, 95% penduduk Kabupaten Bandung Barat harus sudah memiliki jaminan kesehatan nasional, sehingga nilai yang diperoleh adalah C.



Gambar 4.90 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*)



Gambar 4.91 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Indikator tambahan untuk tujuan 4 diantaranya 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke sarana dan prasarana: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) dan 4.c.1* persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik pada tabel 4.19 berikut.

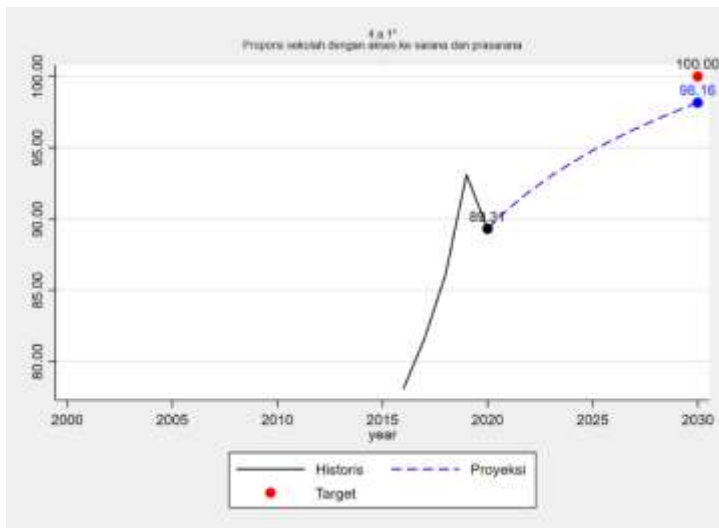
Tabel 4-19 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 4

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke sarana dan prasarana: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	78.1 ^e	^b	98.16	100	A
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	39.6 ^e	^b	51.27	100	C

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^h data tahun 2021.

Target 4.a adalah membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

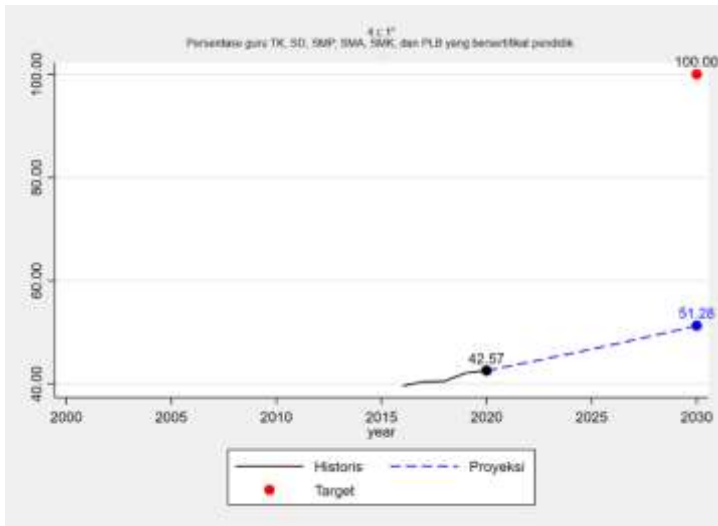
Gambar 4.92 menunjukkan proporsi sekolah dengan akses sarana dan prasarana yang layak yang cenderung meningkat. Semula 78,1% pada tahun 2016 menjadi 93,1 pada tahun 2019. Tahun 2030 diproyeksikan mencapai angka 98,16% sehingga memperoleh nilai A karena minimal telah mencapai 95% menuju target 100%.



Gambar 4.92 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi sekolah dengan akses ke sarana dan prasarana: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))

4.c menargetkan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Kabupaten Bandung Barat memiliki data persentase guru TK, SD, SMP, SMA, dan PLB yang bersertifikat pendidik pada tahun 2016 hingga 2019 dengan pola yang cenderung meningkat namun tidak terlalu signifikan. Proyeksi pencapaian tahun 2030 sebesar 51,28 sehingga memperoleh nilai D karena baru mencapai setidaknya 50% dari target yang ditentukan yaitu 100%.



**Gambar 4.93 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, dan PLB yang bersertifikat
pendidik**

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

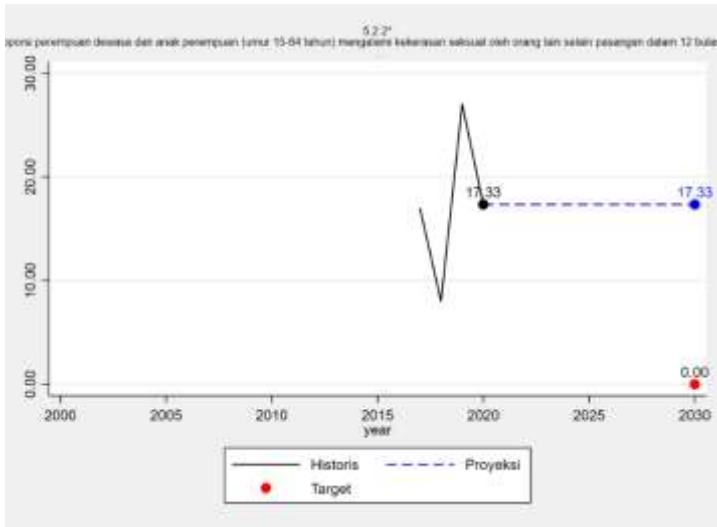
Indonesia menargetkan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya (target 5.2) pada tahun 2030. Indikator yang dianalisis adalah 5.2.2* yaitu proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir yang datanya dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 4-20 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 5

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ⁱ	TARGET	NILAI
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	17 ^f	^b	17.33	0.00	C

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Data historis tahun 2017 hingga 2019 sangat fluktuatif, sehingga proyeksi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata dari data yang ada. Hasil proyeksi pencapaian tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat sebesar 17,33% dan memperoleh nilai C karena minimal telah mencapai 75% menuju target 0%.



Gambar 4.94 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Terdapat 2 indikator yang dianalisis untuk data tambahan yang berasal dari dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat dengan perolehan nilai A untuk keduanya (Tabel 4-20).

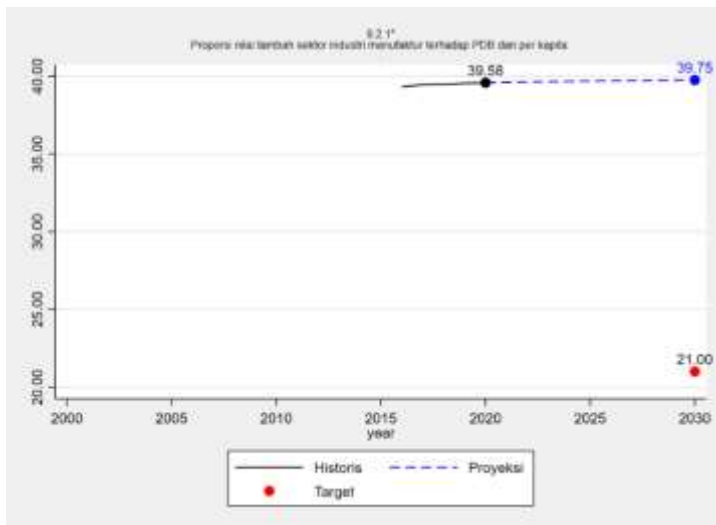
Tabel 4-21 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 9

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	39.31 ^e	^b	39.75	21	A

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	8.127 ^c	^b	8.20	8.1	A

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

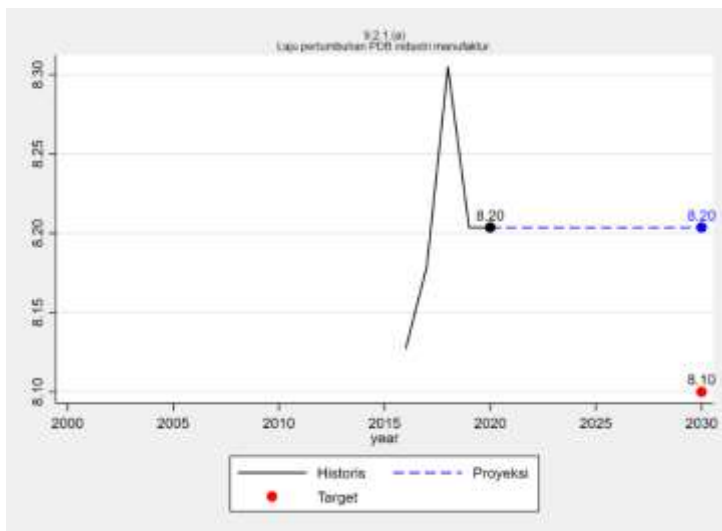
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita Kabupaten Bandung Barat memiliki tren yang cenderung sedikit meningkat (Gambar 4.95). Diproyeksikan tahun 2030 akan mencapai 39,75%. Target yang ditetapkan adalah 21% dan sebetulnya proporsi pada tahun 2016 telah melebihi target tersebut (39,31%) sehingga nilainya A.



Gambar 4.95 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

Untuk data laju pertumbuhan PDB industri manufaktur proyeksi dilakukan dengan menghitung rata-rata dengan angka pencapaian pada

tahun 2030 adalah 8,2%. Suatu pertumbuhan sulit untuk diproyeksikan menggunakan tren tertentu karena terdapat siklus bisnis dan kapasitas ekonomi yang mempengaruhinya. Sama dengan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita, data laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Kabupaten Bandung Barat (2016-2018) sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 8,1% seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4.96 di bawah ini.



Gambar 4.96 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

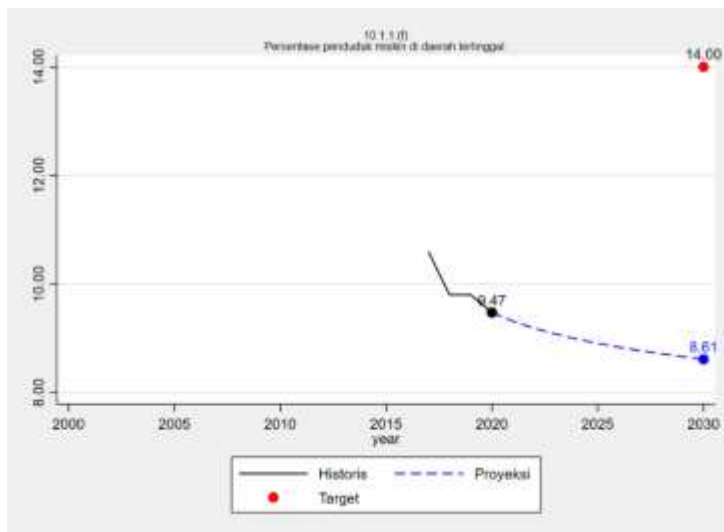
Dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat memberikan tambahan satu indikator SDGs yaitu 10.1.1.(f) persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dengan perolehan *scorecard* A (Tabel 4-21).

Tabel 4-22 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 10

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	10.6 ^f	^b	8.6	14	A

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Data historis tahun 2017 hingga 2019 untuk persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Kabupaten Bandung Barat sudah berada di angka yang lebih rendah dari target yang ditentukan (14%). Tren cenderung sedikit menurun sehingga proyeksi pencapaian tahun 2030 berada pada angka 8,6% (Gambar 4.97).



**Gambar 4.97 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal**

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

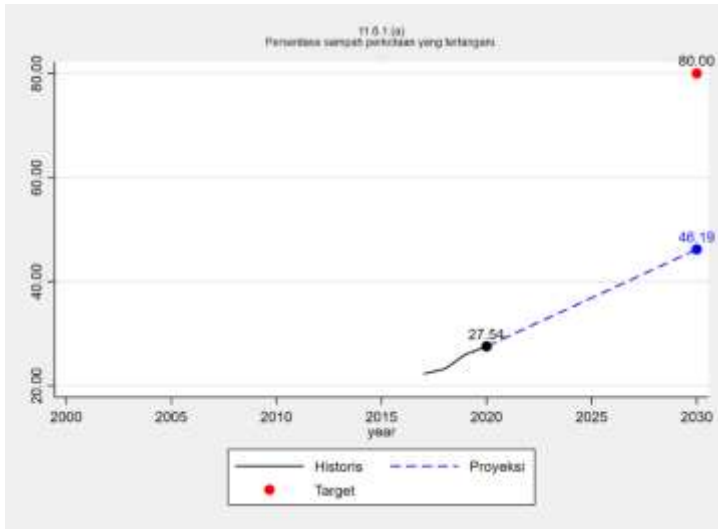
Persentase sampah perkotaan yang tertangani menjadi satu indikator yang datanya diperoleh dari dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat dengan data yang dapat dilihat pada Tabel 4-22.

Tabel 4-23 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 11

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	22.26 ^f	^b	46.19	80	E

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Data persentase sampah perkotaan yang tertangani di Kabupaten Bandung Barat memiliki tren yang cenderung meningkat namun tidak cukup untuk mencapai target 80% pada tahun 2030 karena hasil proyeksinya masih di angka 46,19%. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh adalah E karena pencapaiannya masih kurang dari 50% (Gambar 4.98).



**Gambar 4.98 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase sampah perkotaan yang tertangani**

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Terdapat 4 indikator tambahan dari data dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk tujuan 16 yang dapat dilihat pada tabel 4-23.

Tabel 4-24 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 16

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan	75 ^f	b	100	100	A

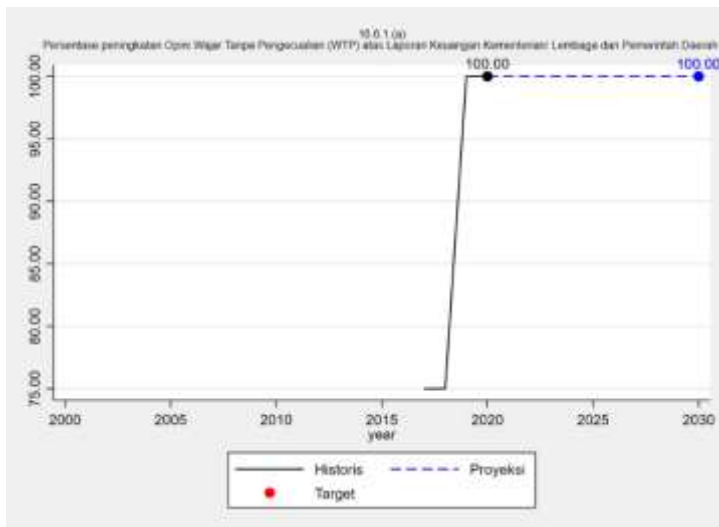
KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
	Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).					
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	64.88 ^f	^b	67.65	100	D
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	10 ^f	^b	13.37	17	C
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	21.8 ^f	^b	17.26		

Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Pada penelitian ini dilihat dari indikator 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan 16.6.1.(b)

Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

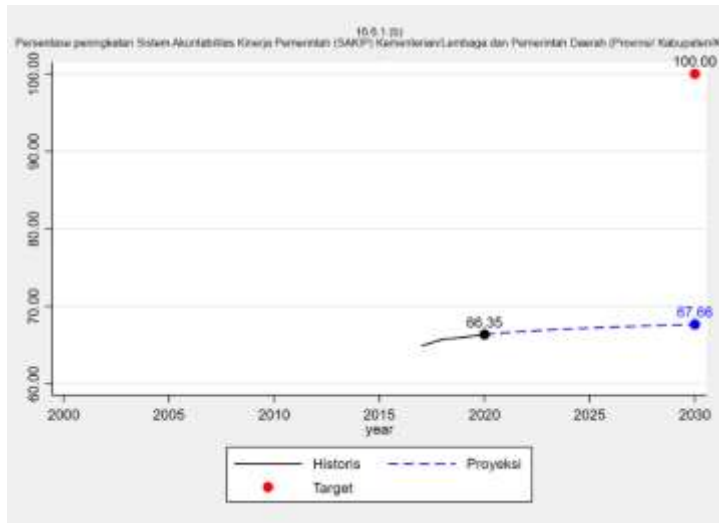
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 mencapai angka 75% dan sudah mencapai 100% pada tahun 2019. Sehingga hasil proyeksi hingga tahun 2030 berada pada angka 100% dan memperoleh nilai A (Gambar 4.99).



Gambar 4.99 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gambar 4.100 menunjukkan data persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang cenderung sedikit meningkat namun tidak cukup untuk mencapai target 100% pada tahun 2030. Hasil

proyeksi hanya sampai angka 67,66% sehingga memperoleh nilai D (baru 50% mencapai target).

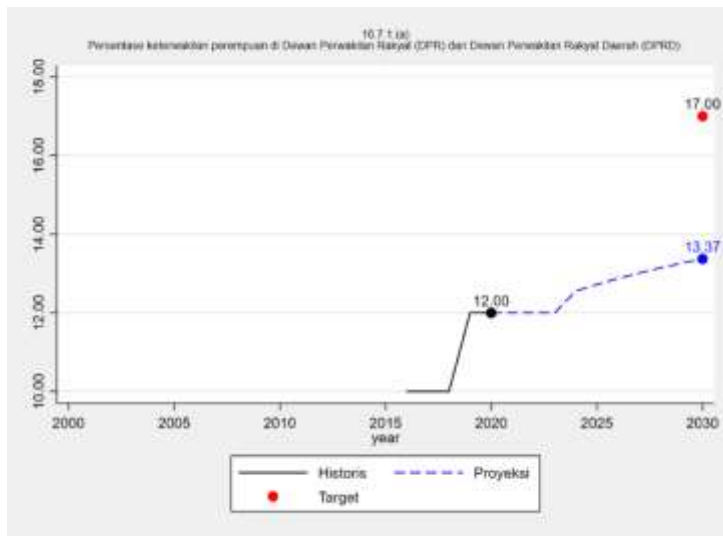


**Gambar 4.100 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
Pemerintah Daerah**

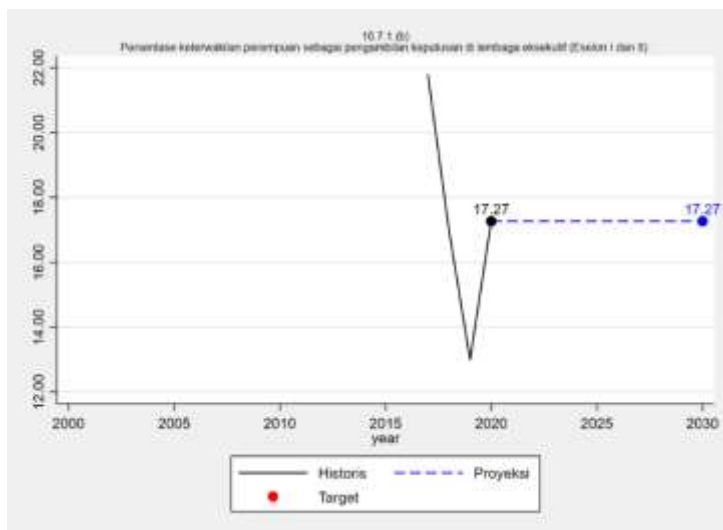
Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, terdapat 2 indikator diantaranya 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Tahun 2017 dan 2018 terdapat 10 perempuan di DPRD Kabupaten Bandung Barat dan 12 pada tahun 2019. Dengan asumsi jumlahnya sama dalam satu periode jabatan, maka 2016 peneliti anggap 10 dan tahun 2020-2023 dianggap 12 meskipun pada kenyataannya dapat berbeda. Tren datanya cenderung sedikit meningkat namun tidak

cukup untuk mencapai target 17 pada tahun 2030 karena hasil proyeksi hanya mencapai 13,37% sehingga nilainya C dengan data yang ditunjukkan pada Gambar 4.101 di bawah ini.



**Gambar 4.101 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**



Gambar 4.102 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif

Data persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) cenderung menurun, sehingga proyeksi dilakukan dengan menghitung rata-rata yaitu 17,27%. (Gambar 4.102)

Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Terdapat 3 indikator tambahan dari data dokumen KLHS Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk tujuan 17 yang sudah mencapai target 100% pada tahun 2017 (dapat dilihat pada tabel 4-24 sehingga memperoleh nilai A.

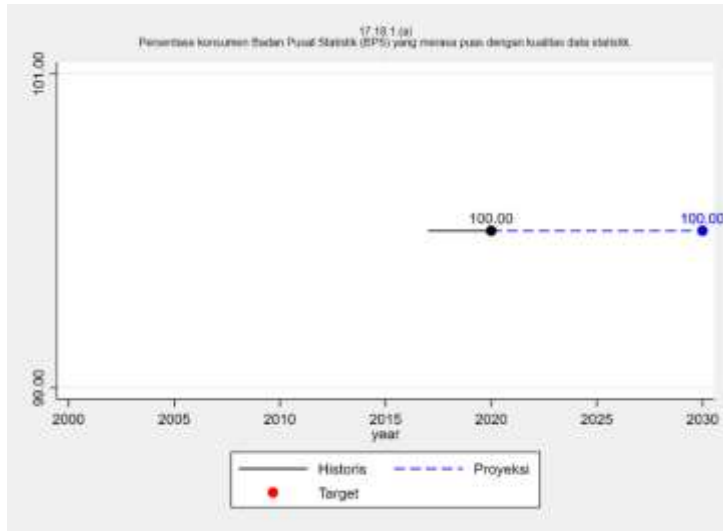
Tabel 4-25 Data, target, dan scorecard indikator pada tujuan 17

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030 ^a	TARGET	NILAI
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100 ^f	^b	100	100	A
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	100 ^f	^b	100	100	A
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100 ^f	^b	100	100	A

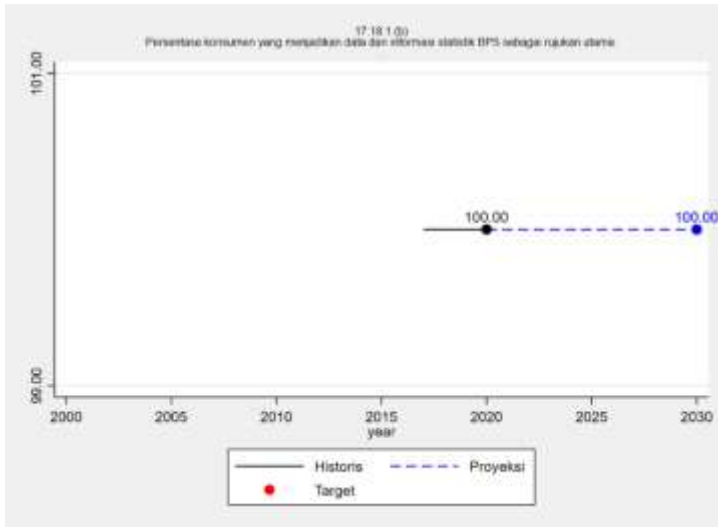
Catatan: ^a Hasil analisis proyeksi. ^b Data tahun tersebut belum tersedia. ^c data 2007. ^d data 2013. ^e data tahun 2016. ^f data tahun 2017. ^g data tahun 2018 ^hdata tahun 2021.

Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional merupakan target 17.18 dari tujuan

pembangunan berkelanjutan. Dilihat dari indikator 17.18.1.(a) persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik pada Gambar 4.103 dan indikator 17.18.1.(b) persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama pada Gambar 4.104.

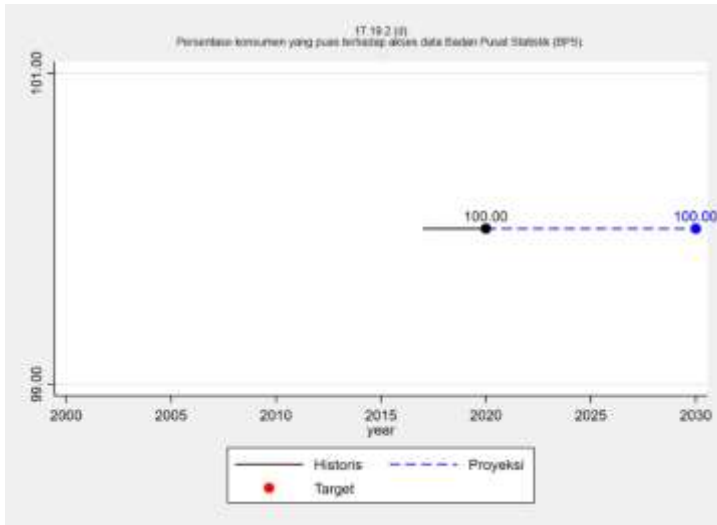


**Gambar 4.103 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data
statistik**



**Gambar 4.104 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik
BPS sebagai rujukan utama**

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang (target 17.19). Satu indikator pada tujuan 17 yang mendukung target 17.19 adalah 17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat dilihat pada Gambar 4.105.



**Gambar 4.105 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS**

Bab 5

Penutup

Dalam upaya pencapaian SDGs, setiap daerah menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya. Tidak semua indikator dapat mencapai TPB/SDGs dengan skema *business as usual* (BAU). Terutama, indikator yang pencapaiannya masih belum baik dan memerlukan perhatian khusus serta upaya inovatif.

Kesiapan pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat diperoleh dengan melakukan proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs di tahun 2030 dengan asumsi skema BAU, dan kemudian membandingkannya dengan target SDGs yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, indikator diberi nilai berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- Nilai A (skor 4) diberikan jika hasil proyeksi mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target TPB/SDGs.
- Nilai B (skor 3) diberikan jika hasil proyeksi pada tahun 2030 mendekati target TPB/SDGs setidaknya 90%.
- Nilai C (skor 2) diberikan apabila hasil proyeksi lebih dari 75% menuju target TPB/SDGs.
- Nilai D (skor 1) diberikan jika hasil proyeksi pencapaian indikator di tahun 2030 setidaknya mencapai 50% dari target TPB/SDGs.

- Nilai E (skor 0) diberikan jika indikator masih cukup jauh dari mencapai target TPB/SDGs (dibawah 50%).

Proyeksi ini dilakukan pada 63 indikator pilihan TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat karena adanya keterbatasan data. Secara keseluruhan, Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 2,61 atau C. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai TPB/SDGs masih cukup berat. Apabila pembangunan ke depannya masih menggunakan skema BAU, maka target TPB/SDGs tahun 2030 kemungkinan besar tidak akan tercapai sepenuhnya. Hasil proyeksi pencapaian SDGs hingga tahun 2030 berdasarkan *scorecard* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	<i>Scorecard</i>	Jumlah Indikator
1	A	37
2	B	11
3	C	21
4	D	12
5	E	7
6	Belum dapat ditentukan nilainya	4
Total		92

Kabupaten Bandung Barat dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat dalam mencapai indikator-indikator SDGs-nya. Hal ini terlihat dari banyaknya indikator yang masih memperoleh nilai *scorecard* C, D, bahkan E. Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan stakeholder pembangunan lainnya agar pencapaiannya dapat ditingkatkan. Penting untuk mencatat bahwa peningkatan indikator ini tidak dapat tercapai hanya dengan mengandalkan skema *business as*

usual. Pencapaian indikator-indikator tersebut memerlukan berbagai upaya tambahan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak. Daftar indikator yang memiliki nilai C, D, dan E dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kode	Indikator	Nilai
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	D
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	D
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)	C
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)	C
1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan: kontrak/sewa	E
1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan: milik sendiri.	C
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (RISKESDAS)	C
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (KEMENKES)	C
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (RISKESDAS)	C
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (KEMENKES)	C
3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	D
3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	D

Kode	Indikator	Nilai
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	C
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	C
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	C
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	E
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	C
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	C
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	E
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	C
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat kuintil terbawah/teratas	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	C
5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	C
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	E
5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	C
6.1.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	E

Kode	Indikator	Nilai
6.2.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	C
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	D
8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	E
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	D
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	D
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	C
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	C
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	D
10.1.1*	Koefisien Gini	D
16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	E
16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	C

Indikator dengan nilai C, D, E diklasifikasikan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang pendidikan ditunjukkan dengan APM SD, SMP dan SMA yang masih jauh dari target terutama disagregasi berdasarkan kuintil untuk SD dan SMA; APK SMP, SMA, PT, PAUD berdasarkan kuintil untuk SMA dan PT; rata-rata lama sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat.
- Bidang kesehatan ditunjukkan dengan angka *stunting* dan *underweight* yang masih tinggi; penduduk di bawah 15 tahun yang merokok; rendahnya penggunaan alat kontrasepsi, dan rendahnya sumber air dan sanitasi layak di Kabupaten Bandung Barat.

- Bidang ekonomi ditunjukkan dengan tingginya angka usia muda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja; rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara; rendahnya laju PDB per kapita; tingginya lapangan kerja informal; rendahnya tenaga kerja formal (termasuk tenaga kerja industri manufaktur); serta semakin meningkatnya koefisien gini.
- Bidang sosial ditunjukkan dengan rendahnya proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran; rendahnya proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir; tingginya proporsi perempuan 20-24 yang kawin sebelum 18 tahun; rendahnya proporsi rumah yang memiliki hak atas tanah milik sendiri terutama kontrak/sewa; rendahnya proporsi perempuan yang menempati managerial; serta rendahnya proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi.

Peningkatan kinerja capaian indikator-indikator di atas tentu memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Mengingat kondisi sumber daya yang terbatas, pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan pemilihan atau memprioritaskan pencapaian indikator-indikator tersebut. Salah satu cara untuk melakukan pemilihan tersebut adalah dengan menggunakan hasil analisis SDGs interlinkages yang telah disusun oleh SDGs Center Unpad untuk Kabupaten Cirebon (Komarulzaman et al., 2020). Dengan menggabungkan hasil analisis baseline Kabupaten Bandung Barat dan analisis interlinkages tersebut, Kabupaten Bandung Barat direkomendasikan untuk memprioritaskan indikator-indikator berikut:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)
4. Persentase tenaga kerja formal
5. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

Perlu diperhatikan bahwa rekomendasi di atas menggabungkan hasil analisis SDGs baseline Kabupaten Bandung Barat dengan hasil analisis interlinkages pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Cirebon. Penggunaan hasil analisis interlinkages di Kabupaten Cirebon dilakukan karena belum ada analisis serupa yang tersedia untuk Kabupaten Bandung Barat. Meskipun demikian, hasil tersebut kemungkinan besar berbeda dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, sangat direkomendasikan untuk menyusun kajian SDGs interlinkages yang khusus dilakukan untuk Kabupaten Bandung Barat.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep target dan strategi implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2012). *Quantitative Methods for Business*. Cengage Learning. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=BjZ9KqybbpAC>
- Bappenas. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia (I)*. Jakarta, Indonesia: Bappenas.
- Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia (II)*. Jakarta, Indonesia: Bappenas.
- Diebold, F. X. (2007). *Forecasting: Applications And Methods*. Cengage Learning India Private Limited. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=B4bajgEACAAJ>
- Komarulzaman, A., Anna, Z., Yusuf, A. A., Andoyo, R., Napitupulu, H., Ghina, A. A., & Halim, P. R. (2020). *Studi SDGs Interlinkages Kabupaten Cirebon*. Bandung: Unpad.
- Le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. *Sustainable Development*, 23(3), 176–187. <https://doi.org/10.1002/sd.1582>
- Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). *The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=HveHAQAACAAJ>
- Yusuf, A. A., Komarulzaman, A., Alisjahbana, A. A., Anna, Z., Ghina, A. A., Setiawan, A., & Megananda. (2018). *SERI*

MENYONGSONG SDGs: Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Bandung: Unpad Press.